492
1961

MASALAH IRIAN BARAT
DI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA



DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

TIDAK UNTUK DIDJUAL - BELIKAN

PENERBITAN CHUSUS

192

MASALAH IRIAN BARAT
DI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Pernjataan-pernjataan

Menteri Luar Negeri R.I. dan Ketua Delegasi Indonesia,

Dr Subandrio

di Madjelis Umum ke XVI P.B.B.

TIDAK UNTUK DIDJUAL BELIKAN

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNJATAAN

DR SUBANDRIO

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAN

KETUA DELEGASI INDONESIA

KE MADJELIS UMUM KE-XVI P.B.B.

---

9 OKTOBER 1961.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Tuan Ketua,

Para Utusan jang terhormat.

Tiap-tiap sidang Madjelis Umum merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk memperluas tindjauan kita dan memandang dunia sebagai suatu keseluruhan. Tentu kita tidak dapat melepaskan diri dari masalah-masalah nasional kita sendiri jang sangat memenuhi pikiran kita sehari-hari. Tetapi kita memang dapat memperoleh keinsjafan jang lebih mendalam akan kenjataan bahwa masalah-masalah dunia jang ada itu djuga mempengaruhi kemadjuan jang akan kita tjapai kearah perkembangan dan pertumbuhan nasional kita sendiri.

Hal ini nistjaja berlaku bagi bangsa-bangsa jang sedang berdjuang untuk kemerdekaan nasional mereka. Hal ini berlaku bagi negara-negara jang baru merdeka jang sedang berusaha untuk mentjapai emansipasi sosial dan ekonomi. Dan ini tidak kurang pula berlaku bagi bangsa-bangsa jang sudah lama berdiri, jang berusaha untuk mempertahankan peranan mereka dalam urusan dunia setjara positif dan konstruktif.

Karena kita bersama-sama berada dalam dunia jang sedang bergolak dan menggelora ini. Ja, dunia kita adalah suatu dunia dalam peralihan. Ia bergerak — bergerak dengan tjepat dan seringkali dengan susah-pajah — dari suatu ketertiban masa-lampau jang berdasarkan pendjadjahan baik politik, ekonomi maupun militer, kesuatu ketertiban dunia baru jang menjambut tuntutan-tuntutan jang mendesak dari bagian terbesar ummat manusia — suatu ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan bagi semua bangsa dan kerdjasama antara semua bangsa, dimana tidak ada lagi penghisapan bangsa oleh bangsa, penghisapan orang oleh orang, dan dimana kesamaan dan keadilan terdapat dalam hubungan antara bangsa-bangsa.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kita sedang melalui djalan berkelok-kelok kearah keseimbangan baru ini. Namun kemerdekaan, kesamaan, keadilan bagi semua merupakan pra-sjarat bagi keseimbangan didalam dunia kita dewasa ini. Hal-hal itu merupakan pra-sjarat bagi perdamaian jang sedjati didalam dunia sekarang.

Atas latar belakang pokok-pokok inilah kita harus menilik kedudukan kita sekarang. Apakah kita telah, apakah kita sedang mengusahakan kemadjuan? Djawabnja ialah: Ja — pasti ja!

Gerakan-gerakan untuk kebebasan dan kemerdekaan nasional telah mentjapai suatu kepesatan jang tak dapat dihentikan lagi. Bangsa-bangsa dimana-mana tidak hanja sedang berdjuang untuk, tetapi djuga sedang memperoleh pembebasan mereka dari penindasan dan pendjadjahan. Dalam waktu 16 tahun anggota-anggota P.B.B. telah bertambah dari 51 mendjadi 100. Kini ada kesadaran jang bertambah besar bahwa dunia tidak lagi merupakan suatu tempat dimana sesuatu bangsa atau sekelompok bangsa-bangsa dapat berhasrat untuk mendjadjah. Kini ada keinsjafan jang bertambah besar akan kenjataan bahwa tidak ada bangsa jang dapat mendjadjah bangsa lain apapun.

Djuga ada kesadaran jang umum dan meningkat akan kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi didunia ini — kekuatan-kekuatan jang sedang mendobrak dinding kesunjian dan kelalaian jang sudah berabad-abad, dan jang, — ini sekarang mulai di-insjafi, — harus dituruti agar kekuatan kekuatan itu tidak meledak dalam pelaksanaan tudjuannja. Inilah kemadjuan pokok jang telah kita usahakan sesudah perang dunia kedua. Tidak hanja Fasisme Hitler sudah dikalahkan, tetapi djuga proses kearah suatu dasar jang lebih baik bagi suatu dunia damai telah dibina, dan ini sangat berdjauhan dengan keseimbangan dunia sebelum perang. Suatu kemenangan dalam peperangan, bila tidak diikuti dengan suatu dasar jang kuat, suatu ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan bagi semua, keadilan antara dan didalam bangsa-bangsa, tidak akan mendjamin unsur-unsur pokok bagi perdamaian.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Akan tetapi, sebagaimana saja katakan, kita masih didalam tingkat peralihan. Kita masih belum mentjapai tudjuan kita jang terachir. Kita masih mengalami kekatjauan dan keributan jang lazim bagi setiap masa peralihan. Hal-hal ini menimbulkan saat-saat jang berbahaja. Ja, tetapi saat-saat ini tidak usah menjebabkan kita terpaku dengan ketakutan. Hal-hal ini adalah penghalang-penghalang jang wadjar didjalan kearah suatu ketertiban dunia jang baru.

Djanganlah kita menipu diri kita sendiri. Mundurnja kekuatan-kekuatan pendjadjah masa lampau, mundurnja kekuatan-kekuatan kolonial tidak dapat diperoleh tanpa suatu perdjuangan, tidak tanpa dislokasi dan seringkali malah tidak tanpa suatu konfrontasi fisik antara kekuatan-kekuatan sosial jang sedang bangkit dan kekuatan-kekuatan lama dari masa pendjadjahan jang silam.

Maka itu djanganlah kita takut akan saat-saat bahaja dan krisis ini. Karena kita tidak dapat terhindar daripadanja. Tugas kita adalah lebih mengatur tenaga kita untuk mendjamin supaja saat-saat itu tetap terkendalikan dan tidak meledak dengan dahsjat sehingga menimbulkan suatu peperangan dunia.

Selagi kita bertemu disini, kita memang mendapati diri kita sekali lagi dikelilingi dengan krisis-krisis, lepuh-lepuh demam dari suatu dunia jang sedang dalam peralihan menggeliat diantara mereka jang berusaha mempertahankan status quo masa lampau dan mereka jang melantjarkan perubahan kearah suatu ketertiban dunia baru jang berdasarkan kemerdekaan, kesamaan dan keadilan sosial. Djika kita memperhatikan atjara kita jang penuh itu maka tampaklah bahwa krisis-krisis ini terdapat didalam tiga lingkungan hubungan internasional. Dalam lingkungan perdjuangan ideologi. Dalam lingkungan perdjuangan pembebasan. Dalam lingkungan perdjuangan untuk persamaan deradjat dan sosial ekonomi.

Mengenai perdjuangan ideologi, hal ini pertama-tama terbatas kepada Negara-negara besar. Mereka telah memasukkannja sebagai masalah perang dingin didalam urusan internasional. Tetapi bagi

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

bangsa-bangsa jang sedang bangkit dan baru sadja bangkit, persoalan ideologi itu adalah suatu masalah dalam negeri jang masing-masing harus menjelesaikan bagi dirinja sendiri. Ini bukanlah soal mengutip sesuatu ideologi, tetapi soal menemukan bagi tiap-tiap bangsa ideologinja sendiri jang progresif, suatu ideologi jang berguna bagi bangsa sebagai suatu keseluruhan, sintésenja sendiri, sesuai dengan tradisi, keadaan dan kebutuhannja.

Ini, seperti kita ketahui, adalah suatu proses jang berat dan sulit. Kami sendiri telah mengalaminja. Tetapi kami telah bangkit, bertambah kuat dan bertambah segar, dengan suatu ideologi nasional jang progresif jang mengikat rakjat kami mendjadi satu, karena ideologi itu berakar dalam pusaka kami masa lampau dan bersesuaian dengan tuntutan-tuntutan kami sekarang. Dengan ideologi nasional jang progresif ini segala tenaga kami dibebaskan bagi tugas-tugas pembangunan jang mendahsjatkan.

Bagaimanapun djuga didalam proses menemukan diri kami sendiri ini — ja, menemukan diri kami sendiri — kami telah memperoleh suatu peladjaran jang kami anggap sangat penting. Kami telah beladjar bahwa bila kekuatan-kekuatan dari luar mentjoba untuk memberikan tekanan kepada kami dalam sengketa ideologi kami, kekatjauan dan pergolakan berubah djadi permusuhan, kekerasan, peperangan. Tetapi bila kami biarkan sendiri, kekatjauan dan pergolakan akan mengarah kesuatu sintése dan suatu kemadjuan baru.

Kebanjakan Negara-negara baru jang sedang bangkit kini sedang menghadapi proses jang serupa. Djika dibiarkan, mereka akan mentjapai sintése mereka. Djika dibiarkan, mereka akan menemukan ideologi jang dengan sebaik-baiknja dapat memupuk tjita-tjita, harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan rakjat mereka untuk suatu tingkat penghidupan jang lebih baik dan lebih kaja.

Hanja djika persoalan ideologi itu dimasukkan dari luar, djika bangsa-bangsa dengan gigih diseret-seret oleh ideologi-ideologi jang bertentangan, djika mereka tidak diberikan ruang bernafas untuk me-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

nemukan tjara hidup mereka sendiri, maka mereka terpetjah mendjadi dua. Lalu kita mendapatkan dua Djerman, dua Korea, dua Vietnam. Akan tetapi djuga diantara Negara-negara jang terbagi setjara buatan ini terdapat kemungkinan untuk hidup berdampingan, menudju kearah penjatuan kembali mereka atas dasar sintése mereka sendiri jang baru.

Tetapi langkah pertama untuk mentjapai perkembangan jang sedemikian ialah pengakuan akan kenjataan-kenjataan sekarang. Dalam peristiwa Djerman jang chusus, hal itu berarti mengakui adanja dua Djerman. Bersamaan dengan itu Negara-negara besar harus tidak lagi memperlakukan bangsa-bangsa ini, dipetjah-belah bertentangan dengan kemauan mereka sendiri, sebagai suatu medan pertempuran ideologi.

Rakjat-rakjat dari bangsa-bangsa ini harus diberi kesempatan untuk menentukan tudjuan masa depan mereka sendiri, bebas dari tekanan-tekanan atau tjampur tangan dari luar. Dengan kata lain, betul-betul mendjundjung tinggi asas hidup berdampingan setjara damai. Dan apakah jang kami maksud dengan hidup berdampingan setjara damai? Bukan meneruskan status quo, melainkan hak setiap bangsa untuk berkembang menurut tradisi, konsep dan kebutuhannja sendiri.

Sekali lagi saja tegaskan bahwa persoalan ideologi itu adalah persoalan jang harus ditentukan sendiri oleh tiap-tiap bangsa. Perdjuangan ideologi, jang telah dikenal sebagai masalah perang dingin, tidak menjangkut majorita ummat manusia. Itu bukan soal jang paling utama pada waktu ini.

Tetapi masalah jang paling besar sekarang ini ialah tertjapainja suatu ketertiban dunia baru jang didalamnja semua rakjat dan semua bangsa menikmati kemerdekaan, kesamaan dan keadilan sosial. Jaitu penghapusan setjara mutlak dari kolonialisme dalam segala pendjelmaannja. Karena inilah sumber pokok dari sengketa didunia. Di Aldjazair, di Angola, di Kongo, darah mengalir. Disana manusia

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

menderita dan gugur untuk memperoleh hak untuk suatu hari esok jang baru.

Tengoklah kepada kanker-kanker kolonial jang merundung Benua Afrika sadja!

Di Aldjazair, perang kolonial telah memasuki tahun ketudjuh. Rakjat Aldjazair sedang berdjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan mereka, dan akan terus berdjuang sampai kemenangan tertjapai. Inilah kenjataan jang harus diterima oleh Perantjis. Memang, bagi kami sendiri, kami tidak akan berhenti sampai pengatjauan dan pertumpahan darah jang djahat ini, jang dilangsungkan untuk mempertahankan ketertiban kolot jang ada, dihentikan. Kami akan terus menjokong dan djuga memberikan bantuan sebesar mungkin kepada Pemerintah Sementara Aldjazair. Kami hanja berdo'a semoga mereka segera memperoleh kemenangan.

Di Angola, keadaannja hanja dapat digambarkan sebagai suatu keadaan seram jang tidak terperikan. Adalah kewadjiban P.B.B. untuk menjingkap noda hitam ini, kemerosotan kealam biadab ini, kepada pendapat umum dunia, dalam segala kekedjaman dan kebiadabannja. Lebih djauh, P.B.B. ini harus mengambil langkah-langkah jang perlu untuk memaksa Pemerintah Portugal untuk mengachiri operasi pembinasaan, pengatjauan dan penindasan militernja. Pembunuhan-pembunuhan terhadap laki-laki, perempuan-perempuan dan anak-anak jang tidak berdosa harus dihentikan. Perhambaan rakjat Angola harus dihentikan. Mereka mempunjai hak untuk bebas dan merdeka sekarang.

Dan bagaimana dengan keadaan di Afrika Selatan? Disana Pemerintah terus-menerus mendjalankan politik *apartheid*-nja jang kedji itu, jang dengan terang-terangan mentjemoohkan Piagam P.B.B. dan Pernjataan Universil Hak-hak Asasi Manusia. Berapa lamakah praktek jang mendjidjikkan ini dapat berdjalan terus sebelum ia meledak mendjadi suatu tragedi lagi? Tidak puas dengan menimbulkan malapetaka dinegerinja sendiri, Pemerintah Afrika Selatan bahkan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

telah memperluas politik apartheid ini kewilajah Afrika Barat Daja. Dengan kekerasan Pemerintah itu telah mentjegah P.B.B. untuk mendjalankan kekuasaannja jang sah diwilajah tersebut. Sudahlah tiba waktunja untuk mengachiri pembangkangan Pemerintah Afrika Selatan terhadap Organisasi kita ini dan tibalah waktunja untuk membebaskan rakjat Afrika Barat Daja dari tjengkeraman Pemerintah itu.

Djuga ada masalah Kongo. Disini kita menjaksikan, baik agresi kolonial terang-terangan maupun siasat-siasat neo-kolonialisme jang lebih berliku-liku. Penjalah-gunaan prinsip penentuan nasib sendiri disini njata bagi tiap orang. Kekuasaan kolonial lama lebih suka mempertahankan kepentingan mereka dengan tjara menghasut dan menimbulkan gerakan separatis daripada merubah hubungan kolonial jang lama mendjadi suatu hubungan timbal-balik antara dua negara jang berdaulat — Belgia dan Kongo sebagai suatu kesatuan nasional. Achirnja telah diinsjafi bahwa penentuan nasib sendiri untuk memisahkan diri tidak berhasil, dan kesudahannja segala usaha dipusatkan untuk memulihkan keutuhan wilajah Kongo. Tetapi ini baru setelah terdjadi pertumpahan darah dan setelah berlangsung peristiwa-peristiwa jang menjedihkan.

Suatu tragedi karena penderitaan rakjat Kongo sendiri, suatu tragedi karena gugurnja pradjurit-pradjurit P.B.B., suatu tragedi besar karena P.B.B kehilangan salah seorang pendjabatnja jang terkemuka dan setia, jaitu Sekretaris Djenderal, Tuan Dag Hammarskjoeld. Sesungguhnja, karena tjaranja jang berliku-liku itu, neo-kolonialisme telah dan masih merupakan bahaja jang terbesar bagi kemerdekaan dan keutuhan wilajah Kongo.

Peristiwa-peristiwa jang menjedihkan djanganlah berulang. Dan lebih dari itu, peristiwa-peristiwa itu djanganlah dibiarkan membawa hasil bagi kaum neo-kolonialis dan orang-orang sewaannja. Propinsi Katanga harus tetap merupakan bagian jang integral dari wilajah nasional Kongo. Perserikatan Bangsa-Bangsa, jang telah berdjandji untuk memelihara kedaulatan, kesatuan dan keutuhan wilajah Kongo,

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

tidak dapat mengendurkan usahanja sampai Pemerintah Pusat Kongo telah memulihkan kekuasaannja jang penuh dan sah di Propinsi Katanga.

Sebagaimana Konperensi Negara-negara Berpolitik Bebas di Beograd bulan September jang lalu dengan tegas dan djelas menjatakan:

> „..... Adalah kewadjiban masjarakat dunia meneruskan segala usaha didalam kekuasaannja untuk menghapuskan akibat-akibat dan mentjegah setiap tjampur-tangan asing selandjutnja didalam negara Afrika jang masih muda ini, dan memungkinkan Kongo memulai setjara bebas melangsungkan pertumbuhan kemerdekaannja berdasarkan penghormatan atas kedaulatan, kesatuan dan keutuhan wilajahnja".

Ja, setiap langkah kearah kemadjuan haruslah dipelihara dan dilindungi terhadap kolonialisme dan neo-kolonialisme jang masih bertjokol di Afrika dan dibagian-bagian lain didunia. Tabiat dan sikap kolonial masih tetap ada. Terhadap ini kita harus berdjuang untuk mengubah faham-faham kolot kedalam faham-faham revolusioner dan mengubah angan-angan kedalam kenjataan-kenjataan baru.

Ja, kita revolusioner dalam perdjuangan kita untuk kebebasan, tetapi tidak pula kurang revolusioner didalam proses emansipasi, jang djuga merupakan salah satu pokok hakiki dari ketertiban dunia baru.

Ja, kita revolusioner dalam pikiran dan tindakan. Kita harus demikian untuk memadjukan dan mengemansipasikan diri sendiri, baik dalam lapangan sosial maupun dalam lapangan ekonomi, setelah berabad-abad mengalami kelalaian dan pendjadjahan. Kita tidak mengharap bangsa-bangsa lain jang tidak merasakan keharusan dan kebutuhan untuk mengikuti tjara penjelenggaraan revolusioner kita didalam lingkungan nasionalnja masing-masing. Jang kita minta dari semua bangsa didunia ini ialah supaja mereka memandang dunia ini sebagai dunia dalam peralihan, jang bergelora karena perubahan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

revolusioner. Kita minta semua bangsa menerima pandangan revolusioner ini, atau sekurang-kurangnja menundjukkan pengertiannja. Setidaknja, djanganlah merintangi proses emansipasi ini jang mengarah ketertiban dunia baru. Karena untuk kepentingan setiap bangsa didunialah, bahwa peralihan ini harus berdjalan setjara lantjar dan damai.

Untuk kepentingan bersama dari masjarakat bangsa-bangsa dunialah bahwa djurang jang kian melebar antara tingkat penghidupan dan perkembangan ekonomi dari bangsa-bangsa jang telah madju dan bangsa-bangsa jang kurang madju segera diatasi sesuai dengan asas-asas keadilan, sesuai dengan „Budi Nurani Sosial Manusia".

Tetapi untuk melenjapkan sumber ketegangan dan krisis ini, untuk melangkah madju kearah ketertiban masjarakat dunia jang lebih adil dan merata — suatu ketertiban untuk kepentingan dan keuntungan bersama bagi semua bangsa — memerlukan penggunaan tjara-tjara penjelenggaraan jang baru dan berani terhadap kerdjasama ekonomi antar-bangsa. Konsep-konsep statis jang didasarkan atas ketertiban jang kolot tidak mungkin dapat menghadapi tantangan ini. Djika tahun-tahun 60-an ini sungguh-sungguh akan mendjadi "Decade of Development", masa emansipasi ekonomi dan sosial, maka semua rakjat dan bangsa didunia harus menjatukan sumber-sumber manusia dan materialnja untuk kepentingan bersama. Hanja usaha multilateral jang meliputi kerdjasama setjara tulus ichlas dari segenap bangsa didunia, dapat menjelesaikan masalah perkembangan ekonomi dan sosial dari bangsa-bangsa jang kurang madju, suatu masalah jang menentukan seluruh masa depan.

Memang ada tanda-tanda bahwa Negara-negara jang telah madju sadar akan keharusan tjara penjelenggaraan baru itu. Tetapi tindakan-tindakan kearah itu masih ragu-ragu dan meraba-raba. Djalan kemasa depan haruslah tegas, lurus dan djelas. Sepatutnjalah bagi P.B.B. untuk mempetakan djalan ini, meskipun kita semua insjaf bahwa pertama-tama setiap bangsa bertanggung djawab sendiri atas tumbuhnja

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

perkembangan ekonomi masing-masing. Dalam hubungan ini Indonesia sekarang memperoleh kemadjuan pesat dalam rangka Rentjana Pembangunan Semesta 8 tahun, 1961—1968, jang meliputi pembangunan seluruh kehidupan nasional — dalam bidang ekonomi, industri, kebudajaan, pendidikan, sosial. Pembangunan ini terdiri dari 343 projek, dengan anggaran belandja 240 milliard rupiah atau kurang lebih 5½ milliard dollar Amerika.

Djika dalam tahun 1945 P.B.B. merupakan harapan tjemerlang bagi dunia jang telah terpetjah belah dan telah djemu karena peperangan, sekarang P.B.B. haruslah merupakan pematju untuk membangun dunia kembali. Sjarat-sjarat dan tantangan-tantangan sekarang berlainan dari dulu. Bahkan P.B.B. sekarang bukanlah P.B.B 16 tahun jang lalu. Dengan bangkitnja bangsa-bangsa jang baru merdeka di Asia dan Afrika, djumlah keanggotaan organisasi ini mendjadi bertambah dua kali lipat dan akan terus meningkat dari tahun ketahun. Organisasi inipun sesungguhnja berada dalam masa peralihan, dengan bahaja-bahaja dan saat-saat krisisnja.

Sekarang Organisasi ini sedang menghadapi krisis — suatu krisis jang bukan ditimbulkan tetapi toch jang diaksentuasi oleh meninggalnja setjara tragis Sekdjen P.B.B. Dag Hammarskjoeld. Beliau adalah seorang jang dalam kebidjaksanaannja tidak selalu mendapat persetudjuan kami. Tetapi beliau adalah seorang jang kesungguhannja dan kedjudjurannja tidak pernah kami sangsikan. Beliau adalah seorang jang kami hormati setinggi-tingginja. Jang terutama, beliau adalah seorang pengabdi dunia, jang mengabdikan dirinja kepada kehidupan Organisasi dunia ini, dan dalam pengabdiannja ini beliau meninggal dunia.

Ja, kehidupan Organisasi ini! Dan kehidupan memerlukan pertumbuhan dan perubahan. Terutama ia mengharuskan Organisasi ini menghadapi kenjataan-kenjataan jang ada dewasa ini.

Salah satu kenjataan ini ialah adanja RRT — suatu bangsa jang terdiri dari lebih dari 600 djuta orang jang hingga hari ini masih

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

djuga belum diberi kedudukannja jang sah didalam Organisasi ini. P.B.B. didirikan atas prinsip universalita dari keanggotaannja. Prinsip ini akan tetap merupakan tidak lebih dari sembojan belaka selama Tiongkok dan bangsa-bangsa lain masih disingkirkan dari forum internasional ini. Sebagaimana diwaktu jang lampau, kinipun kami akan mendesakkan pembetulan keadaan ini, dengan berpedoman kepada realisme politik dan hasrat mendjadikan P.B.B. ini kuat, universil dan sanggup menunaikan fungsinja jang wadjar.

Kenjataan-kenjataan dewasa ini mengharuskan pula Negara-negara Asia dan Afrika diwakili dengan lajak didalam Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial dan badan-badan utama lainnja dari P.B.B. Kami berpendapat bahwa langkah-langkah positif kearah pengluasan organ-organ ini, sesuai dengan prinsip pembagian geografis setjara adil harus diambil didalam sidang Madjelis Umum sekarang ini.

Achirnja, Sekretariat P.B.B. sendiri harus pula disesuaikan dengan kenjataan-kenjataan dewasa ini. Djabatan Sekretaris Djenderal sudah mendjadi suatu djabatan jang sangat luas — terlalu besar bagi satu orang untuk memangkunja sendiri. Jang mendjadi soal bukanlah penundjukan seseorang jang netral, seseorang pegawai jang setia. Jang mendjadi masalah ialah djabatan itu sendiri, jang sekarang sudah merupakan lebih dari organ administratif semata-mata. Tanggung-djawab Sekretaris Djenderal sekarang meliputi pula penjelesaian-penjelesaian penting sekali, jang kadang-kadang mempunjai akibat-akibat politik. Tidak seorangpun dapat diminta memikul beban seberat ini sendiri, sekalipun sjarat-sjarat keichlasan, kedjudjuran dan ketjakapan ada semua padanja. Karena itu kami berpendapat bahwa Sekretaris Djenderal harus dibantu oleh beberapa penasehat. Ini tidak sadja untuk kepentingan Sekretaris Djenderal itu sendiri, tetapi djuga untuk kepentingan penjesuaian djabatan itu dengan kenjataan-kenjataan dunia dewasa ini. Memang benar Sekretaris Djenderal harus diberi kebebasan penuh dalam memilih penasehat-penasehatnja, tetapi sebaliknja untuk mengimbangi pimpinan Sekretariat, pilihan penasehat-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

penasehat itu djuga harus sesuai dengan pembagian politik didunia dewasa ini.

Marilah kita bersama memiliki pandangan untuk mendjadikan P.B.B. ini suatu alat jang kuat dan bermanfaat untuk membimbing kita dewasa ini kearah kesanggupan-kesanggupan masa depan. Tetapi marilah kita djuga sekarang ini mengakui kemadjuan jang telah ditjapai hingga sekarang.

Madjelis ini jang mempunjai 100 Anggota Negara berdaulat adalah bukti jang njata dari kemadjuan-kemadjuan jang diusahakan kearah kemerdekaan dan kebebasan. Resolusi 1514 jang telah diterima baik oleh Madjelis Umum ke-XV merupakan satu langkah madju lagi dalam memetjahkan masalah pokok jang mengganggu hubungan internasional dewasa ini. Kita telah mentjapai kemadjuan, tetapi masih banjak lagi jang harus kita kerdjakan.

Resolusi Madjelis 1514 masih harus dilaksanakan seluruhnja dan dimana-mana. Kita harus berusaha agar ketentuan-ketentuan dari resolusi jang luhur ini melajani hal-ihwal kebebasan dan keadilan, dan tidak diputar-balikkan oleh kekuatan-kekuatan dari ketertiban dunia lama untuk memenuhi tudjuan-tudjuan kolonial jang putus-asa. Selandjutnja P.B.B. masih harus melaksanakan resolusi-resolusinja mengenai soal Palestina. Nasib para pelarian Palestina merupakan tragedi kemanusiaan jang mengharukan dan mempengaruhi kita semua. Penderitaan orang-orang ini adalah penderitaan kita djuga, dan tanggung djawab kita semua untuk melenjapkannja.

Masalah lain lagi jang masih dihadapi Madjelis ini ialah masalah perlutjutan sendjata, termasuk penghentian pertjobaan-pertjobaan sendjata nuklir. Perlombaan persendjataan, pengumpulan dan pertjobaan sendjata-sendjata untuk penghantjuran besar-besaran jang lebih djahat lagi, adalah perwudjudan fisik dari konfrontasi dan perdjuangan antara kekuatan-kekuatan lama dan kekuatan-kekuatan sosial baru, jang pada chususnja mempengaruhi hubungan antara kedua Negara besar didunia; ini memerlukan penjelesaian segera.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Pada prinsipnja Indonesia menolak setiap pertjobaan sendjata nuklir oleh bangsa apapun — baik jang dilakukan diangkasa maupun dibawah tanah, dibawah permukaan samudera ataupun djauh diruang angkasa luar. Gerakan-gerakan rakjat dari segenap lapisan masjarakat kami telah melahirkan pernjataan-pernjataan menentang pertjobaan-pertjobaan nuklir ini, terutama karena pertjobaan-pertjobaan itu sering-sering dilakukan diluar wilajah negara jang melakukan pertjobaan itu.

Tetapi sungguhpun pertjobaan-pertjobaan ini membahajakan karena mengotori udara jang kita hirup, sungguhpun pertjobaan-pertjobaan ini amoril karena merupakan usaha menjempurnakan alat penghantjuran kemanusiaan, kita tahu pula bahwa pelanggaran pertjobaan-pertjobaan ini sendiri tidaklah tjukup. Bersamaan dengan ini suatu persetudjuan perlutjutan sendjata jang umum dan mutlak dibawah sistim pengawasan internasional jang effektif, harus ditjapai. Karena kami tahu dari sumber-sumber jang lajak dipertjaja, bahwa Negara-negara besar — Amerika Serikat dan Uni Sovjet — telah mempunjai tjukup sendjata dalam persediaannja masing-masing untuk menghantjur-leburkan dunia.

Persediaan-persediaan maut ini harus dihantjurkan sebelum sendjata-sendjata itu menghantjurkan kita. Inilah inti masalahnja. Hanja dengan perlutjutan sendjata jang umum dan mutlak kita dapat mengachiri kegilaan dewasa ini, kembali kedjalan benar, dan menghilangkan antjaman penghantjuran timbal balik jang senantiasa bergantung diatas konfrontasi antara kedua kekuatan dunia jang sedang bertentangan.

Kejakinan kami ialah bahwa hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk perbaikan bukan untuk penghantjuran, untuk kesedjahteraan bukan untuk kesengsaraan, untuk memberi kepada manusia harapan baik bukan untuk menimbulkan ketakutan. Kejakinan kami ialah bahwa keachlian manusia harus digunakan untuk perdamaian bukan untuk peperangan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Maka dalam rangka kejakinan inilah dan dengan hasrat untuk mengusahakan sedapat mungkin peralihan kearah ketertiban dunia baru berdjalan setjara damai, kami, bangsa-bangsa jang berpolitik bebas, telah bertemu pada suatu konperensi di Beograd dari tanggal 1 sampai 5 September tahun ini.

Kami bertemu dengan didorong oleh kepertjajaan bahwa waktu telah mendesak, dan bahwa kami harus berusaha menghilangkan sumber ketegangan dan perselisihan dalam hubungan antar-bangsa dewasa ini. Maka dalam Pernjataan Penutupnja Konperensi tersebut dinjatakan:

„Bahwa untuk menghilangkan sumber sengketa sampai kepada akar-akarnja kolonialisme dalam segala pendjelmaannja harus dihapuskan dan asas hidup berdampingan setjara damai harus diterima dan dipraktekkan; bahwa dengan berpedoman kepada asas-asas ini masa peralihan dan sengketa dapat meletakkan dasar jang kuat bagi kerdjasama dan persaudaraan antara bangsa-bangsa didunia".

Konperensi Beograd sesungguhnja menggambarkan perasaan tangung djawab kami akan usaha meredakan ketegangan internasional dan memelihara perdamaian. Tudjuan kami ialah semata-mata memberi bantuan dengan kekuatan moral kami kearah penglaksanaan ketertiban dunia baru jang berdasarkan kemerdekaan, kesamaan dan keadilan sosial.

Djadi djanganlah mentjoba menilai atau mempertimbangkan Konperensi ini dengan tabiat blok-blok kekuatan. Djanganlah mentjoba memperhitungkan apakah kami, Negara-negara berpolitik bebas, tjondong kekiri atau kekanan, apakah kami mentjela pihak jang satu atau memudji pihak jang lain. Karena kami datang di Beograd bukan untuk mentjela atau memudji, melainkan untuk mendengungkan tjita-tjita bagian terbesar bangsa-bangsa didunia. Nilailah kami dengan ini: apakah Konperensi Beograd mendengungkan harapan-harapan dan tjita-tjita massa jang sedang bergolak disetiap pelosok dunia. Inilah alat pengukur jang objektif atas mana kami akan berdiri atau djatuh.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Demikian pula, itulah alat pengukur guna menentukan berhasil atau gagalnja Madjelis Umum ini. Dan kemenangan tidak akan gampang. Kemenangan membutuhkan kepala dingin dan penilaian jang realistis daripada kekuatan-kekuatan jang ada sekarang didunia dan hubungan timbal-baliknja dalam pertumbuhan sedjarah jang tak ada hentinja.

Tuan Ketua,

Izinkanlah saja beralih kemasalah Irian Barat jang hingga kini masih merupakan perselisihan jang tadjam antara Indonesia dan Belanda dan telah merusakkan hubungan antara kedua negara tersebut. Saja lakukan ini, terutama, untuk mendjawab dan mengulas pernjataan Menteri Luar Negeri Belanda jang terhormat, tanggal 26 September jang lalu jang hampir seluruhnja ditudjukan kepada persoalan Irian Barat. Malah beliau menjarankan, atas nama Pemerintah Belanda, agar Madjelis ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, mentjampuri dan mengulurkan tangannja untuk turut memetjahkan masalah ini — suatu tjampur tangan jang sedemikian lama senantiasa ditentang oleh Pemerintah Belanda.

Sementara pada tahun-tahun jang lampau Pemerintah Indonesialah jang mengadjukan persoalan Irian Barat ini kemuka Sidang P.B.B., jang terachir dalam tahun 1957, jang ditentang dengan keras oleh Pemerintah Belanda, kali ini Pemerintah Belandalah jang datang kepada Madjelis ini untuk penjelesaian, penjelesaian setjara damai dari masalah pokok jang sama.

1. *Apakah sengketa ini, apakah sebenarnja pertikaian Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda ini? Apakah jang mendjadi pokok-pokok pertikaian itu?*

Soal ini adalah sisa masalah kolonial jang menjangkut suatu daerah tertentu dari Indonesia jang tidak terselesaikan tatkala kemerdekaan Indonesia memperoleh pengakuan resminja pada achir tahun 1949. Tetapi, telah disepakati bahwa pokok pertikaian, jakni *status*

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

politik dari Irian Barat, akan diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda dengan djalan perundingan dalam waktu satu tahun. Penjerahan kedaulatan jang sempurna dan tanpa sjarat atas Indonesia telah dilakukan setjara resmi oleh Belanda, dan setjara mutlak sebagaimana dengan djelas dinjatakan dalam perdjandjian jang bersangkutan. Dan apa Indonesia itu, dahulu dan sekarang, dapat kita batja dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1948, dimana perkataan „Hindia Belanda" dirobah mendjadi Indonesia, nama baru jang diterima bagi bekas-djadjahan Belanda itu.

Irian Barat adalah bagian jang tak dapat dipisah-pisahkan dari daerah djadjahan ini dan tentunja bagi Negara Republik Indonesia jang baru itu adalah tetap merupakan satu bagian jang tak dapat dipisah-pisahkan dari wilajah nasionalnja. Irian Barat kini merupakan salah satu dari 23 propinsi Republik Indonesia. Oleh karena itu tidak ada persoalan tentang sesuatu claim teritorial dari Republik Indonesia. Indonesia tidak dapat meng-claim daerahnja sendiri. Kedaulatan atas Indonesia telah diserahkan dengan sempurna dan tanpa sjarat.

Djadi jang hanja perlu dihapuskan ialah penguasaan Belanda dan, pada waktu itu, pemerintahan militer Belanda di Irian Barat, jang ditegakkan kembali oleh Belanda setelah mereka menduduki kembali bagian wilajah Indonesia tersebut dimasa perang kolonial.

Dapat kita mengingat kembali, antara lain, pernjataan jang diutjapkan oleh wakil Belanda, Dr van Royen, dalam Dewan Keamanan P.B.B. pada achir tahun 1948 jang lalu, tatkala persoalan kemerdekaan Indonesia diselesaikan berkat tjampur tangan P.B.B.; wakil Belanda itu mendjelaskan kepada kami dan kepada setiap orang, dalam pernjataannja pada tanggal 22 Desember 1948, jang saja kutip sebagai berikut:

„Sebagaimana telah saja terangkan sedjak semula, pertikaian ini tidaklah mempersoalkan apakah Indonesia akan merdeka atau

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

tidak. Semua pihak setudju bahwa apa jang dahulunja „Hindia Belanda", — saja ulangi: *„Apa jang dahulunja Hindia Belanda"*, — harus mendjadi satu Negara jang merdeka setjepat mungkin".

Pernjataan ini, pengakuan resmi ini, memang sangat banjak membantu dalam mengachiri perang kolonial tersebut. Ia meletakkan dasar persetudjuan bersama untuk perundingan Medja Bundar jang menghasilkan penjerahan kedaulatan Indonesia setjara resmi pada tanggal 27 Desember 1949.

Oleh karena itu kami merasa jakin bahwa kesulitan jang masih tinggal mengenai Irian Barat akan dapat diselesaikan dengan perundingan-perundingan selandjutnja, sesuai dengan djandji untuk membuat kemerdekaan Indonesia itu betul-betul sempurna dan tanpa sjarat.

2. *Apakah alasan-alasan Belanda ketika itu untuk tetap mempertahankan kekuasaannja dan pemerintahan kolonialnja atas bagian wilajah Indonesia tersebut setelah kemerdekaan ? Apakah ini harus diartikan sebagai sjarat jang perlu, walaupun untuk sementara waktu ?*

Kami diberitahu oleh Pemerintah Belanda waktu itu, Tuan Ketua, bahwa alasan-alasannja adalah dua matjam :

a. Pada saat mendjelang penjerahan kedaulatan resmi kepada Indonesia, selapisan jang rupanja penting dalam masjarakat Belanda sangat menentang gagasan akan kehilangan daerah djadjahan mereka jang kaja dan sangat penting itu. Penentangan ini perlu ditenteramkan. Persetudjuan-persetudjuan Medja Bundar akan tetap mendjamin berlangsungnja kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda dinegara Indonesia jang baru merdeka itu hingga taraf jang memuaskan. Dan bagi sisa perasaan prestise kolonial jang masih tinggal itu, kekuasaan kolonial harus tetap dipertahankan. Jang paling gampang kelihatannja pada waktu itu adalah wilajah Irian Barat jang hampir sama sekali belum didjeladjah dan ekonomis belum diusahakan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

jang didiami oleh 700.000 orang. Djumlah rakjat Indonesia seluruhnja pada waktu itu adalah 70 djuta.

Hanja dengan sjarat-sjarat inilah Parlemen Belanda dapat dibudjuk untuk menjetudjui penjerahan kedaulatan kepada Indonesia jang merdeka. Pemerintah Belanda berhasil dalam siasat politik ini, dengan pengertian lebih landjut bahwa dalam waktu satu tahun masalah Irian Barat akan diselesaikan.

b. Alasan lain ialah bahwa banjak Belanda-Indo jang telah lama hidup didjaman kolonial di Indonesia, tidak akan merasa senang lagi hidup dalam Negara Indonesia jang baru merdeka itu. Tempat jang baru bagi kehidupan jang baru — „tempat bernaung", seperti jang mereka namakan, — sebaiknja disediakan bagi mereka meskipun sedjak semula pun agak diragukan apakah Irian Barat dapat memenuhi sjarat bagi maksud tersebut.

3. *Apakah arti persoalan Irian Barat, jang tertjipta itu, bagi Belanda dan Indonesia ?*

Bagi Belanda hal ini mungkin dapat diartikan sebagai suatu kemenangan dalam politik kebidjaksanaan untuk mempermudah, jang disesuaikan kepada sematjam prestise kolonial jang dirasakan perlu pada itu waktu. Dari segi ekonomi, Irian Barat tidak mempunjai arti apa-apa. Demikian djuga tidak dalam segi militer atau strategi. *Tidak pernah*, sepandjang pengetahuan kami, ada tuntutan dari rakjat Belanda untuk mentjaplok Irian Barat atau untuk memisahkannja dari Indonesia.

Sebenarnja, perdjandjian-perdjandjian Medja Bundar masih menjebut Irian Barat sebagai suatu „Residensi" — jakni suatu kesatuan administratif dalam pemerintahan Negara *Indonesia*.

Bagi Indonesia, politik kebidjaksanaan untuk mempermudah dari Belanda ini berarti bahwa seluruh rakjat Indonesia, jang berdjumlah 70 djuta pada saat itu, akan menikmati dengan bebas kemerdekaan dari negaranja, ketjuali jang 1% (kira-kira 700.000 orang) jang tinggal di Irian Barat. Tetapi kami menenteramkan hati kami, mengingat ada-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

nja kenjataan bahwa kepintjangan ini akan dapat diperbaiki segera dengan djalan perundingan dengan Pemerintah Belanda dalam waktu satu tahun. *Tidak pernah* ada tuntutan dari rakjat Irian Barat, — kepada Pemerintah Belanda atau kepada Pemerintah Indonesia — untuk memisahkan diri atau menggabungkan diri kepada salah satu negara lain. Memang apa gunanja?

Sebenarnja penduduk Irian Barat ikutserta sepenuhnja mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Memang benar bahwa untuk sebagian mereka telah ditindas setelah pasukan-pasukan Belanda menduduki kembali daerah itu, namun demikian, perasaan-perasaan mereka sebagai bagian dari Indonesia Raya tidak pernah diragukan.

Pemimpin-pemimpin Irian Barat setempat merasa bahagia bahwa Indonesia, — tanah airnja sendiri (dimana Irian Barat merupakan sebagian daripadanja semendjak berabad-abad) telah mendjadi negara jang merdeka dan berdaulat. Maka mendjadi kewadjiban bagi Indonesia agar tidak mengetjewakan rakjatnja di Irian Barat, dan agar berusaha memulihkan Irian Barat dibawah kekuasaan dan pemerintahan Republik Indonesia setjepat mungkin. Ini adalah persoalan nasional jang amat penting bagi Pemerintah dan rakjat saja.

4. Usaha-usaha Indonesia untuk menjelesaikan persoalan ini dengan Belanda melalui perundingan-perundingan.

Dalam tahun 1950 telah dimulai perundingan-perundingan antara Belanda dan Indonesia untuk menjelesaikan persoalan ini. Tetapi, mereka gagal untuk menjelesaikannja dalam waktu satu tahun. Perundingan-perundingan lebih landjut diperlukan. Tetapi setjara berangsur-berangsur kami dihadapkan kepada suatu pendirian Belanda, jang tidak sadja menundjukkan keengganan, tetapi malah niat buruk untuk menjelesaikan persoalan itu, jang kini telah mendjelma mendjadi pertikaian jang muskil sekali. Mereka mengclaim kedaulatan atas bagian dari daerah Indonesia tersebut.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

jang didiami oleh 700.000 orang. Djumlah rakjat Indonesia seluruhnja pada waktu itu adalah 70 djuta.

Hanja dengan sjarat-sjarat inilah Parlemen Belanda dapat dibudjuk untuk menjetudjui penjerahan kedaulatan kepada Indonesia jang merdeka. Pemerintah Belanda berhasil dalam siasat politik ini, dengan pengertian lebih landjut bahwa dalam waktu satu tahun masalah Irian Barat akan diselesaikan.

b. Alasan lain ialah bahwa banjak Belanda-Indo jang telah lama hidup didjaman kolonial di Indonesia, tidak akan merasa senang lagi hidup dalam Negara Indonesia jang baru merdeka itu. Tempat jang baru bagi kehidupan jang baru — „tempat bernaung", seperti jang mereka namakan, — sebaiknja disediakan bagi mereka meskipun sedjak semula pun agak diragukan apakah Irian Barat dapat memenuhi sjarat bagi maksud tersebut.

3. *Apakah arti persoalan Irian Barat, jang tertjipta itu, bagi Belanda dan Indonesia ?*

Bagi Belanda hal ini mungkin dapat diartikan sebagai suatu kemenangan dalam politik kebidjaksanaan untuk mempermudah, jang disesuaikan kepada sematjam prestise kolonial jang dirasakan perlu pada itu waktu. Dari segi ekonomi, Irian Barat tidak mempunjai arti apa-apa. Demikian djuga tidak dalam segi militer atau strategi. *Tidak pernah*, sepandjang pengetahuan kami, ada tuntutan dari rakjat Belanda untuk mentjaplok Irian Barat atau untuk memisahkannja dari Indonesia.

Sebenarnja, perdjandjian-perdjandjian Medja Bundar masih menjebut Irian Barat sebagai suatu „Residensi" — jakni suatu kesatuan administratif dalam pemerintahan Negara *Indonesia*.

Bagi Indonesia, politik kebidjaksanaan untuk mempermudah dari Belanda ini berarti bahwa seluruh rakjat Indonesia, jang berdjumlah 70 djuta pada saat itu, akan menikmati dengan bebas kemerdekaan dari negaranja, ketjuali jang 1% (kira-kira 700.000 orang) jang tinggal di Irian Barat. Tetapi kami menenteramkan hati kami, mengingat ada-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

nja kenjataan bahwa kepintjangan ini akan dapat diperbaiki segera dengan djalan perundingan dengan Pemerintah Belanda dalam waktu satu tahun. *Tidak pernah* ada tuntutan dari rakjat Irian Barat, — kepada Pemerintah Belanda atau kepada Pemerintah Indonesia — untuk memisahkan diri atau menggabungkan diri kepada salah satu negara lain. Memang apa gunanja?

Sebenarnja penduduk Irian Barat ikutserta sepenuhnja mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Memang benar bahwa untuk sebagian mereka telah ditindas setelah pasukan-pasukan Belanda menduduki kembali daerah itu, namun demikian, perasaan-perasaan mereka sebagai bagian dari Indonesia Raya tidak pernah diragukan.

Pemimpin-pemimpin Irian Barat setempat merasa bahagia bahwa Indonesia, — tanah airnja sendiri (dimana Irian Barat merupakan sebagian daripadanja semendjak berabad-abad) telah mendjadi negara jang merdeka dan berdaulat. Maka mendjadi kewadjiban bagi Indonesia agar tidak mengetjewakan rakjatnja di Irian Barat, dan agar berusaha memulihkan Irian Barat dibawah kekuasaan dan pemerintahan Republik Indonesia setjepat mungkin. Ini adalah persoalan nasional jang amat penting bagi Pemerintah dan rakjat saja.

4. Usaha-usaha Indonesia untuk menjelesaikan persoalan ini dengan Belanda melalui perundingan-perundingan.

Dalam tahun 1950 telah dimulai perundingan-perundingan antara Belanda dan Indonesia untuk menjelesaikan persoalan ini. Tetapi, mereka gagal untuk menjelesaikannja dalam waktu satu tahun. Perundingan-perundingan lebih landjut diperlukan. Tetapi setjara berangsur-berangsur kami dihadapkan kepada suatu pendirian Belanda, jang tidak sadja menundjukkan keengganan, tetapi malah niat buruk untuk menjelesaikan persoalan itu, jang kini telah mendjelma mendjadi pertikaian jang muskil sekali. Mereka meng-claim kedaulatan atas bagian dari daerah Indonesia tersebut.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Sambil berbitjara mengenai „hak menentukan nasib sendiri" bagi rakjat Irian Barat, Pemerintah Belanda seenaknja mengusulkan suatu rentjana undang-undang kepada Parlemennja dalam tahun 1952 untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah Keradjaan Belanda.

Sambil berbitjara tentang pendidikan rakjat Irian Barat kearah hak menentukan nasib sendiri, pemerintahan kolonial Belanda di Irian Barat, dengan didukung oleh kekuatan militernja jang masih mereka pertahankan dibagian Indonesia tersebut, menindas dan menghantjurkan Partai Irian Untuk Kemerdekaan Indonesia, memendjarakan para pemimpinnja atau memaksa mereka untuk melarikan diri „ketempat bernaung jang lebih aman" didaerah-daerah lain di Indonesia.

Mereka membuka kembali kamp konsentrasi „Boven Digul" jang terkenal buruk itu, terkenal sedjak sebelum Perang Dunia Kedua. Dipimpin oleh pembesar-pembesar sipil kolonial lama dan polisi, mereka memulai satu rezim terror untuk men-de-Indonesianisasikan bagian Indonesia tersebut. Mereka mulai mengadjar rakjat djelata Irian Barat dalam bahasa Belanda, dengan tjara-tjara kolonial agar mereka mendjadi warga-warga kolonial jang baik, jang mudah dapat dikuasai. Segala sesuatu telah dikerdjakan untuk mengadjar mereka kearah anti-Indonesia.

Dengan latar belakang ini tidaklah mengherankan bahwa perundingan-perundingan untuk menjelesaikan persoalan Irian Barat dengan Belanda hanja menemui kegagalan. Rupanja Pemerintah Belanda kini mempunjai niatan untuk mempertahankan tjengkeraman kolonialnja atas Irian Barat, dengan maksud untuk memisahkannja untuk selama-lamanja dari Indonesia jang merdeka. Sikap Belanda ini merupakan suatu pelanggaran jang njata tidak sadja terhadap persetudjuan dan pengertian jang telah ditjapai, tetapi djuga terhadap *djiwa* daripada persetudjuan tentang kemerdekaan Indonesia jang ditjapai pada achir tahun 1949.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

5. *1954 — 1957.*

Ketika perundingan-perundingan bilateral dengan Belanda pada achirnja sama sekali gagal, disebabkan penolakan Belanda jang kepala-batu untuk merundingkan pokok-pokok persoalan jang benar-benar penting, kami berpaling kepada Perserikatan Bangsa-bangsa, untuk masih mentjari penjelesaian setjara damai dari pertikaian antara kedua negeri itu. Sengketa tersebut kian hari kian gawat dan mendjadi masalah kolonial belaka. Pemerintah Belanda menentang wewenang Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mentjampuri soal ini, tetapi tak berhasil. Akan tetapi pembitjaraan di Madjelis Umum PBB tidak memberikan hasil sedikitpun. Suatu resolusi jang hanja menjatakan harapan agar perundingan-perundingan landjutan diadakan telah ditentang keras oleh Belanda dan penerimaannja oleh Madjelis ini diblokir oleh mereka.

Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia masih menundjukkan kesabaran dalam mentjari kemungkinan penjelesaian soal tersebut setjara damai, karena soal itu memang sangat penting bagi kemerdekaan rakjatnja.

Dalam tahun-tahun berikutnja, meskipun ada niat-buruk difihak Belanda, Pemerintah Indonesia kembali mentjoba meneruskan tjara penjelesaian setjara damai melalui PBB.

Terlepas dari itu, kami masih mengizinkan Belanda untuk memelihara kedudukan istimewanja dalam bidang ekonomi jang masih tetap mereka pegang sedjak pengakuan kemerdekaan Indonesia pada achir tahun 1949.

Tetapi, kembali kami hanja menemukan penentangan dan resolusi-resolusi Belanda karena penjelesaian setjara damai dari pertikaian itu tidak dapat diterima baik oleh Madjelis Umum PBB. Ketika hal itu terdjadi ditahun 1957, maka kesabaran dan kemauan-baik kami habislah. Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena tidak mampu, atau lebih

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

tepat lagi, karena tidak mau memberikan bantuannja guna menjelesaikan masalah tersebut, tidak memberi Pemerintah saja kemungkinan lain daripada mentjari penjelesaian masalah itu menurut tjara kami sendiri. Dalam dunia sekarang ini, ini berarti menggantungkan diri pada dasarnja kepada kekuatan nasional kami sendiri. Akan tetapi, sungguh menghiburkan, bahwa bagian terbesar dari anggota Madjelis ini menjokong tuntutan kami, tuntutan kemerdekaan bagi bangsa kami itu. Ini memperkuat tekad kami untuk melandjutkan perdjuangan kemerdekan bagi rakjat Irian Barat, dengan mempergunakan segala daja jang ada pada kami.

6. Kesabaran dan kemauan-baik sudah tidak mempunjai tempat lagi dalam hubungan-hubungan jang telah tegang antara Indonesia dan Belanda.

Anggapan Belanda semula, bahwa mereka dapat menguasai kedudukan ekonomi mereka di Indonesia (suatu kedudukan jang memang sangat istimewa), tidak dapat dipertahankan lebih lama. Hal ini memang akan merupakan suatu keadaan jang aneh. Tindakan-tindakan militer dan penindasan jang didjalankan Belanda di Irian Barat, tindakan-tindakan subversif mereka terhadap kebebasan dan keutuhan nasional Republik Indonesia, jang pada hakekatnja telah dimulai oleh mereka sedjak saat permulaan kemerdekaan Indonesia, semuanja ini harus dihentikan. Politik kolonial, jang masih melekat dalam pikirannja, sekalipun setelah tertjapai kemerdekaan Indonesia, harus dilenjapkan buat selama-lamanja dari bumi Indonesia.

Kami mempunjai setiap alasan untuk berpendapat bahwa lambat laun politik kolonial Belanda terhadap Indonesia tidaklah didasarkan lagi atas pertimbangan-pertimbangan untuk memelihara kepentingan-kepentingan Belanda didaerah itu, bahkan djuga tidak lagi atas dasar ukuran prestise nasional, tetapi bahwa sentimen anti-Indonesia jang emosionil dari beberapa orang pemimpin di Nederland semakin sering didjadikan sebagai asas pedoman jang tidak rasionil dalam tjara-penjelenggaraan Pemerintah Belanda terhadap Indonesia.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Oleh karena itulah Pemerintah saja mendjalankan suatu politik konfrontasi total terhadap Belanda, tidak sadja dibidang politik tapi djuga dibidang ekonomi dan militer.

Kami telah mengambil langkah-langkah jang perlu terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi mereka, suatu warisan dari djaman pendjadjahannja dahulu jang masih dipegangnja; kekuatan militernja didalam dan disekitar Irian Barat, suatu pangkalan intimidasi dan penindasan, telah kami hadapi dengan kekuatan militer kami sendiri.

Hubungan-hubungan dengan Nederland telah diputuskan sama sekali. Dalam pada itu, Tuan Ketua, kami merasa gembira karena telah berhasil menggalang kekuatan politik nasional kami, dan djuga karena telah dapat pula memulai dengan suatu rentjana pembangunan nasional semesta guna mempertjepat pembangunan ekonomi dan sosial serta emansipasi bangsa kami. Irian Barat tidak diketjualikan, meskipun perwudjudannja terhalang disebabkan pendudukan Belanda jang masih berlangsung atas daerah itu.

7. Bagaimanakah pendapat umum di Nederland sekarang ?

Kemerdekaan Indonesia senantiasa dikemukakan sebagai sematjam hantu kepada rakjat Belanda. Kami mengetahui bahwasanja tidaklah mudah bagi suatu negara pendjadjah menerima kehilangan daerah djadjahannja, meskipun hal itu adalah demi kepentingan kemerdekakan ummat manusia. Sesungguhnja, kami terpaksa memperolehnja setjara pahit melalui suatu perang kolonial, dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Rasa permusuhan, keketjewaan sudah tentu mungkin ada diberbagai lapisan masjarakat Nederland setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannja.

Kemauan-baik dan pengertian harus dipupuk kembali antara kedua belah pihak untuk membina hubungan-hubungan persahabatan baru antara kedua bangsa itu, tapi sekarang berdasarkan kemerdekaan jang sama-sama dimiliki oleh kedua belah pihak. Akan tetapi persoalan Irian Barat, jang semakin lama semakin muskil djuga, merin-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

tangi usaha-usaha tersebut. Hubungan-hubungan antara kedua Pemerintah semakin memburuk sehingga achirnja semua hubungan, dan tentu pula termasuk hubungan-hubungan ekonomi, terputus sama sekali. Kini banjak orang — mereka jang mempunjai maksud baik — di Nederland menginsjafi apa arti semuanja ini, kepentingan-kepentingan apakah jang sebenarnja terantjam. Mereka menginsjafi sekarang, bahwa persoalan Irian Barat antara Nederland dan Indonesia itu hanjalah membawa kesukaran kepada rakjat Belanda, hanjalah membawa sikap permusuhan dari Indonesia, tidak membawa simpati bangsa-bangsa Asia dan Afrika, dan sebetulnja dari sebagian besar bangsa didunia.

Kehilangan kepentingan-kepentingan jang lebih besar di Indonesia sudah njata sekali. Dan djanganlah kita melupakan kesukaran-kesukaran di Irian Barat sendiri. Ketakutan, kegelisahan dan ketjemasan meradjalela dikalangan penduduk Irian Barat. Tidak sadja dikalangan penduduk pribumi, tapi djuga dikalangan pegawai-pegawai dan para penetap bangsa Belanda. Ribuan orang, laki-laki dan perempuan, jang dipendjarakan atas tuduhan melakukan perbuatan-perbuatan anti-Belanda, adalah bukti-bukti jang njata tentang kegagalan usaha pendjadjahan Belanda di Irian Barat. Sedjak dua tahun jang lampau pegawai-pegawai dan penetap-penetap bangsa Belanda sudah mulai meninggalkan Irian Barat, ada jang kembali ke Nederland dan ada pula jang pindah ke Australia. Hingga bulan Djuni jang lalu sudah ada 13.000 djiwa bangsa Belanda di Irian Barat meninggalkan daerah jang tidak ramah terhadap mereka (tidak ramah terhadap bangsa Belanda, djangan salah!) untuk pindah ke Australia. Lebih dari 1.000 orang Belanda diduga akan berangkat menudju Nederland dalam tahun ini.

Pada saat ini, Tuan Ketua, 400 orang dari mereka itu sedang dalam perdjalanan dari Irian Barat menudju Holland.

Teori „tempat bernaung jang aman" sebagaimana pernah dibajangkan bagi golongan Belanda-Indo ternjata hampa sama sekali.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Djadi persoalan Irian Barat ini, dan sengketa dengan Indonesia, dewasa ini sudah mendjadi satu beban jang maha berat bagi rakjat dan anggaran belandja Belanda. Kesangsian jang hebat terhadap kebidjaksanaan Pemerintah Belanda untuk tetap mempertahankan pendjadjahannja di Irian Barat — dengan mengorbankan kepentingan-kepentingannja jang lebih besar di Indonesia dan didunia pada umumnja —, sudah semakin bertambah. Dan sebagaimana pernah dikatakan kepada kami, kesangsian sudah sedemikian hebatnja sehingga Parlemen Belanda sekarang tidak lagi berkeberatan untuk melepaskan sama sekali kekuasaan Belanda („kedaulatan" Belanda, kata mereka) atas Irian Barat.

Demikianlah, sudah banjak orang di Nederland jang waktu ini berpikir bahwa waktunja sudah tiba untuk mengembalikan sepenuhnja Irian Barat, jang sesungguhnja adalah bagian dari wilajah Indonesia, kepada Republik Indonesia. Sebenarnjalah, rintangan-rintangan jang terdapat ditahun 1949, jang pada waktu itu merupakan dasar bagi Belanda mendjalankan politik kebidjaksanaan untuk mempermudah mereka untuk mempertahankan keuasaan pendjadjahannja di Irian Barat kini sudah tidak ada lagi di Nederland.

Beberapa kalangan di Nederland, diantaranja termasuk tokoh-tokoh terkemuka jang mewakili kepentingan dan pendapat umum di Nederland, sedjak dua tahun belakangan dengan giat berusaha untuk merapati Pemerintah saja dan Presiden Sukarno sendiri malahan, untuk dapat memberikan sumbangan kepada penjelesaian jang memuaskan dari persoalan Irian Barat, sesuai dengan suasana jang telah dan sedang berubah. Mereka itu menjetudjui penjerahan kekuasaan atas Irian Barat, agar tidak sadja memulihkan keutuhan wilajah Republik Indonesia, tetapi djuga untuk memungkinkan pemulihan kembali hubungan-hubungan normal antara Nederland dan Indonesia, terutama hubungan dibidang ekonomi. Dalam hubungan ini diusulkan agar djanganlah sekali-kali penjelesaian sedemikian ditafsirkan sebagai kemenangan bagi salah satu pihak dan kehilangan muka bagi pihak jang lain.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Demikianlah, Tuan Ketua, kami di Indonesia menginsjafi benar-benar akan masalah ini, dan kami akan melakukan segala-galanja untuk bersesuaian dengan Nederland dalam hal ini, sekalipun dengan mengorbankan sebagian dari prestise nasional kami sendiri.

8. *Pendirian Indonesia dan tempat Irian Barat jang wadjar dalam lingkungan Republik Indonesia.*

Pemerintah saja dan Presiden Soekarno sendiri menghargai usaha orang-orang Belanda jang bermaksud baik itu, jang tulus-ichlas dalam pemandangan kami, dan dapat dikatakan mewakili pandangan Belanda jang djudjur dan realistis, jang dianut oleh golongan-golongan penting dalam kehidupan nasional Belanda.

Sepandjang jang menjangkut Pemerintah saja, sebagaimana baru-baru ini dan telah berkali-kali dinjatakan oleh Presiden saja, *djika sekiranja* Pemerintah Nederland menundjukkan — berhubung dengan perobahan suasana — bahwa Belanda sekarang bersedia melepaskan apa jang disebut kedaulatannja atas Irian Barat dan mentjari suatu penjelesaian jang memuaskan dari pertikaian dengan Republik Indonesia, maka Pemerintah saja bersedia mengadakan perundingan-perundingan baru untuk menjelesaikan masalah itu pada akar-akarnja. Pemerintah saja berpendirian bahwa penjerahan pemerintahan di Irian Barat kepada Republik Indonesia, *masih tetap* merupakan penjelesaian jang terbaik guna menghapuskan samasekali kolonialisme di Indonesia demi kepentingan hubungan antara kedua negara. Dengan demikian hubungan normal antara kedua negara akan pulih kembali, disertai dengan segala kemungkinan jang menguntungkan bagi kedua negara. Lagipula, kami akan memberikan sumbangan kami guna tertjapainja keseimbangan dan perdamaian disuatu daerah penting didunia ini.

Akan tetapi, sampai waktu ini, Tuan Ketua, kami tidak mendapatkan tanda-tanda kemauan-baik dan realisme jang demikian dari Pemerintah Nederland. Sementara itu, usaha-usaha kami untuk memperoleh kembali kemerdekaan bagi bangsa kami di Irian Barat, untuk

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

mengachiri kolonialisme didaerah tersebut, tidak dapat dikurangi. Hal itu merupakan soal perdamaian dan keamanan bagi negara dan bangsa kami. Kami bersiap-siap untuk menghadapi hal-hal jang terburuk vis-a-vis Belanda di Irian Barat. Ini adalah tugas kami, tugas nasional kami, untuk mana kami tidak mengenal mundur.

Orang mungkin tidak insjaf, Tuan Ketua, bahwa pada hakekatnja, Irian Barat, sebagai sebagian dari tanah-air saja, *tidak pernah* dipisahkan dari Republik Indonesia, walaupun sudah 16 tahun lamanja Belanda memperpandjang pendjadjahannja didaerah itu dan usaha-usahanja untuk tetap mempertahankannja. Irian Barat *tidak pernah* dipisahkan dari Republik Indonesia, baik setjara politis, sosial maupun setjara konstitusionil.

Tergantung hanja kepada pembatasan-pembatasan jang ditimbulkan oleh keadaan darurat akibat pendudukan Belanda jang masih berlangsung, kami senantiasa memperlakukan Irian Barat sebagai bagian integral dari wilajah negara kami. Irian Barat menempati kedudukannja jang sah dalam Republik.

Irian Barat, sebagaimana telah saja katakan, merupakan satu Propinsi dari Republik Indonesia, salah satu dari 23 Propinsi, jaitu djumlah pembagian daerah administrasi Republik Indonesia.

Memang benar bahwa pemerintahan kami sampai saat ini tidak dapat didjalankan dengan penuh dipulau utama Irian Barat. Tapi kami memang mempunjai suatu pemerintahan Propinsi Irian Barat jang berkedudukan dekat pulau utama Irian Barat itu, tapi masih dalam lingkungan daerah administrasi Propinsi Irian Barat.

Propinsi-propinsi Republik Indonesia mempunjai pemerintahan otonomi penuh. Tiap-tiap Propinsi itu mempunjai dewan-dewan perwakilan daerah, pemerintahannja dikepalai oleh seorang Gebernur jang dipilih dari kalangan rakjat daerah itu sendiri dan bahkan komandan-komandan militer daerahpun dipilih dari penduduk daerah itu sendiri. Asas ini dipakai pula di Propinsi Irian Barat. Irian Barat

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

telah mempunjai wakil-wakilnja terdiri dari rakjat Irian Barat sendiri dalam Dewan Perwakilan Rakjat Indonesia, dalam Dewan Pertimbangan Agung, dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat, — badan kekuasaan tertinggi dari Republik Indonesia — serta badan2 konstitusionil lainnja dari Dewan Perantjang Nasional.

Seorang anak pribumi Irian Barat djuga duduk dalam Delegasi Indonesia kesidang Madjelis Umum PBB jang sekarang. Ja, Tuan Ketua, seorang anak pribumi Irian Barat, jang mewakili Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat dengan penduduk lebih dari 90 djuta djiwa. Sdr. Dimara, — demikianlah namanja — telah mendjalani hukuman selama 7 tahun dalam pendjara kolonial Belanda di Irian Barat, hanja karena ia ingin rakjatnja di Irian Barat menikmati kemerdekaan jang telah diperoleh Republik Indonesia. Dia baru dibebaskan dalam bulan April jang lalu dan saudara itu dapat mentjeritakan kepada tuan-tuan bagaimana situasi sebenarnja di Irian Barat: ketakutan, dan keketjewaan, penindasan dan intimidasi, jang mana semuanja adalah tjiri-tjiri suatu pemerintah kolonial dan pentjemoohan terhadap demokrasi dan penentuan nasib sendiri, jang didengung-dengungkan begitu kerasnja oleh Pemerintah Nederland.

Irian Barat tetap tinggal terkebelakang, dan djurang jang memisahkan antara pembangunan setjara bebas didaerah ini dan daerah-daerah Indonesia lainnja semakin melebar. Lebih dari itu, rakjat di Irian Barat masih diliputi suasana takut, putus asa dan bingung. Ini sadja sudah merupakan suatu masalah kemanusiaan.

Sepandjang jang menjangkut Republik Indonesia, Irian Barat sebagai salah satu propinsi sudah tentu dimasukkan dalam Rentjana Pembangunan Semesta delapan-tahun Republik Indonesia jang kini sedang dalam pelaksanaan. Sekolah-sekolah, rumah-rumah-sakit dan djalan-djalan akan dibuat; industri-industri akan didirikan, sebagaimana djuga halnja didaerah-daerah Indonesia lainnja. Banjak anak pribumi Irian Barat, laki-laki dan perempuan, jang kini beladjar dan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

bekerdja didaerah Indonesia lainnja. Bagi mereka jang tinggal di Irian Barat sungguh diperlukan perhatian dan prioritet istimewa nanti. Hal ini hanja menunggu pembebasan mereka dari genggaman pendjadjahan Belanda. Kami tidak dapat melupakan segi kemanusiaan dari masalah ini. Tiada seorangpun jang lebih merasa bertanggung djawab daripada Pemerintah saja mengenai masa depan dan kesedjahteraan rakjat Irian Barat, jaitu rakjat di Propinsi kami sendiri, bangsa kami sendiri.

Dan djanganlah ada orang jang mengatakan kepada kami, apa jang terbaik bagi mereka, atau mulai menjadjikan dongengannja tentang „hak menentukan nasib sendiri", bila ia sendiri sekali-kali tidak pertjaja akan hal itu.

Dan mengapakah hak menentukan nasib sendiri bagi rakjat kami ini harus ditetapkan oleh orang lain ! Kami telah mendjalankan hak ini enambelas tahun jang lalu. Kami telah memperdjuangkannja, dan kami memenangkannja hanja dengan darah, keringat dan airmata. Kami sekarang bertekad untuk mempertahankan hak ini jang telah kami peroleh dengan demikian getirnja, dengan seluruh kekuatan kami dan dengan segala upaja jang ada pada kami.

9. *Tuan Luns dengan Rentjananja.*

Tuan Ketua, Menteri Luar Negeri Belanda, tuan Luns, sekarang telah datang ke Madjelis ini untuk mengemukakan sebuah rentjana untuk memetjahkan masalah Irian Barat, masalah jang sama jang oleh Pemerintahnja dibiarkan tanpa penjelesaian untuk sebelas tahun lamanja. Sebelas tahun ini telah merusak hubungan antara Belanda dan Indonesia, tanpa menguntungkan siapapun djuga, dan pasti tidak menguntungkan kepentingan rakjat Belanda sendiri. Tahun-tahun itu tidak membawa perubahan kearah perbaikan apapun bagi rakjat Irian Barat sendiri. Ini patut disesalkan sekali. Namun, pemetjahan persoalan ini pada pokoknja tetap mudah. Pada pokoknja ia merupakan persoalan kolonial. Ia tetap merupakan persoalan kebebasan bagi Irian

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Barat dalam rangka kebebasan dan kemerdekaan Indonesia seperti telah saja terangkan sebelumnja. Karena itu pemetjahan jang terbaikpun tetap sama.

Presiden Sukarno, dalam ulasannja, terhadap rentjana tuan Luns, telah menjatakan pada tanggal 27 September, dan ini saja kutip:

„Djalan jang terbaik bagi Belanda ialah menjerahkan kekuasaannja setjepat mungkin langsung kepada Indonesia. Akan tetapi bila Belanda karena berbagai alasan lebih suka mempergunakan perantaraan P.B.B. untuk penjerahan kekuasaan dengan segera kepada Indonesia itu, Indonesia bersedia untuk mempeladjari dengan sungguh-sungguh usul tersebut.

„Bila tidak didasarkan atas perhitungan ini, setiap intervensi P.B.B. hanja akan mendjadikan persoalan ini lebih tadjam dan eksplosif.

„Masalah penjerahan kekuasaan jang mendesak kepada Indonesia telah mendjadi masalah keamanan dibagian dunia ini.

„Tugas kami ialah untuk memelihara keamanan dibagian dunia ini, akan tetapi Belanda dan P.B.B.-pun harus memberikan sumbangannja jang penting untuk mentjapai tudjuan ini".

Marilah sekarang kita memeriksa rentjana tuan Luns itu dengan teliti. Marilah kita tindjau apakah rentjana itu dapat memberikan pemetjahan jang terbaik dari masalah ini, tidak sadja dilihat dari pendirian Pemerintah saja dan keadaan sebenarnja di Irian Barat, tidak sadja demi kepentingan rakjat kami di Irian Barat, tetapi djuga demi kepentingan rakjat dinegeri Belanda, sepandjang pengetahuan kami. Kami jakin pada taraf sekarang ini bahwa masalah ini dapat diselesaikan setjara damai, memuaskan dan menguntungkan bagi semua pihak jang bersangkutan. Setelah melepaskan sisa-sisa kolonialisme mereka jang terachir di Indonesia, Belanda tidak akan merasa tertekan lagi untuk memperkembangkan hubungan-hubungan jang terbaik dengan Indonesia pada chususnja dan dengan negara-negara Asia-Afrika pada umumnja. 700.000 rakjat Irian Barat sendiri achirnja

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

akan dapat menikmati keamanan nasional bersama 90 djuta saudara-saudara setanah airnja dalam Republik Indonesia.

Rakjat Irian Barat achirnja akan dapat mempraktekkan sepenuhnja hak otonomi daerahnja, seperti didaerah-daerah Indonesia lainnja. Republik Indonesia sebagai keseluruhan antara lain, djuga akan mengetjap kenikmatan penjelesaian setjara damai ini.

Bukan sadja perdjuangan untuk kemerdekaan akan disempurnakan, bukan sadja perdamaian dan keamanan diwilajah kami tak akan dibahajakan lagi, tetapi lebih daripada itu, hubungan-hubungan kami dengan negeri Belanda akan dapat dinormalkan, dan karena itu rintangan timbal-balik dalam hubungan antara Barat dan Indonesia akan hilang.

Akan tetapi, Tuan Ketua, satu hal dalam rentjana tuan Luns itu segera menarik perhatian kami. Menurut pendapat saja ia telah membuat dua kesalahan besar:

a. Ia mengemukakan rentjana untuk pemetjahan soal Irian Barat ini seolah-olah tanpa adanja latar belakang sengketa dengan negara saja. Dengan perkataan lain, seolah-olah ini suatu soal de-kolonisasi melulu, seolah-olah ia dapat datang disini dengan tangan jang bersih.
b. Ia mentjoba menggambarkan seolah-olah pemetjahan persoalan ini dengan damai dapat ditjapai *tanpa* ikut-sertanja atau kerdjasama Indonesia.

Karena kedua kesalahan pokok ini, rentjananja — bila diterima — tak dapat dan tak akan menjelesaikan apapun djuga. Ia tak akan menjelesaikan pertikaian — sengketa — dengan Indonesia jang merupakan inti persoalan. Tuan Luns tidak dapat seénaknja menganggap sepi lawannja dalam sengketa ini, jakni Pemerintah Republik Indonesia, dan sesungguhnja, rakjat negara saja. Bila ia mengira ia dapat berbuat demikian, maka sungguhlah ia melakukan suatu kesalahan jang besar! Apa sebenarnja jang diinginkannja? Apa sebenarnja maksudnja? Pemetjahan matjam apakah jang dibajangkannja? Ia mengi-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

nginkan „dekolonisasi" Irian Barat. Apakah ini tidak 16 tahun terlambat, atau setidak-tidaknja 11 tahun terlambat? Tampaknja tidak terlalu progresif bagi kami. Ketika Irian Barat — sebagai bagian dari Indonesia — di-dekolonisasikan oleh Republik Indonesia, maka sebenarnja Pemerintahnjalah, Pemerintah Belanda, jang kemudian meng-kolonisasi kembali daerah ini.

Oleh karena itu, apa jang dinamakan dekolonisasi tuan Luns itu tidak berkesan benar bagi kami. Rentjana tersebut kehilangan dasar morilnja. Diadjukannja rentjana ini mungkin hanja sebagai suatu usaha Belanda untuk keluar dari suatu keadaan jang tak dapat dipertahankan lagi di Irian Barat, disebabkan oleh kepitjikan dan kekedjaman politik kolonial mereka sendiri. Betapapun djuga, bila rentjana ini merupakan suatu usaha jang sungguh-sungguh, untuk meloloskan diri sekarang ini dari kedudukan jang memusingkan Pemerintahnja, Pemerintah saja akan menjambutnja demi kepentingan rakjat kami di Irian Barat jang telah menderita terlalu lama akibat berlarut-larutnja pemerintahan kolonial Belanda dibagian dari Indonesia itu.

Meskipun demikian, politik „meloloskan diri" ini djanganlah berdjiwa anti-Indonesia, dengan maksud mengusahakan pemisahan Irian Barat setjara paksa dari kesatuan nasional Indonesia, meskipun dengan pandji „penentuan nasib sendiri".

Penentuan Nasib Sendiri ?

Fakta-fakta sedjarah mengenai persoalan ini, politik kebidjaksanaan untuk mempermudah dari Belanda dalam soal ini, seharusnja telah memperlihatkan kepada Madjelis ini, bahwa politik Belanda mengenai Irian Barat tidak pernah dan sekarangpun sama sekali tidak berhubungan dengan hak menentukan nasib sendiri, atau lebih tepat lagi, telah senantiasa mengabaikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakjat di Irian Barat. Rakjat Irian Barat tak pernah diminta persetudjuannja, pendapatnjapun tidak, waktu pemerintah Belanda meng-kolonisasi mereka kembali pada tahun 1949, dan pada tahun 1952

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

memasukkan daerah mereka kedalam daerah Keradjaan Belanda. Dalil baru tentang hak menentukan nasib sendiri untuk rakjat Irian Barat ini dipakai Belanda hanja sebagai soal kebidjaksanaan untuk mempermudah sadja, untuk konsumsi internasional. Hal ini telah demikian tepatnja dikemukakan oleh Prof. Mr B. V. A. Roling, seorang guru besar Belanda dalam Hukum Antar Negara dan seorang anggota delegasi Belanda untuk beberapa tahun hingga tahun 1957, dalam bukunja „Irian Barat, Suatu Masalah Dunia", jang diterbitkan dinegeri Belanda dalam tahun 1958.

Marilah kita tengok dari dekat misalnja apa jang dinamakan Dewan Papua jang didirikan oleh Pemerintah Belanda, tentang mana Madjelis ini telah diberitahu.

Dewan ini didirikan di Irian Barat sebagai suatu dewan jang katanja mewakili rakjat. Menurut tuan Luns, Dewan ini merupakan langkah pertama menudju pemerintahan-sendiri.

Dewan Papua, jang baru didirikan pada tanggal 5 April tahun ini, tentu sadja dipimpin oleh seorang pegawai Belanda, jang diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda. Demikian djuga halnja dengan Sekretaris Pelaksana dari Dewan itu. Tak perlu diterangkan lagi, bahwa pekerdjaan dan kebidjaksanaan dewan penasehat ini — jang dalam pada itu terdiri sebagian besar dari orang-orang Belanda dan orang-orang Irian Barat jang pro-Belanda (dibudjuk dengan bermatjam-matjam djalan untuk mendjadi pro-Belanda dan kebanjakan diantara mereka pegawai-pegawai dari pemerintahan kolonial sendiri) — seluruhnja berada dibawah pimpinan Ketua dan Sekretaris Pelaksana orang Belanda itu. Apakah ada hak menentukan sendiri matjam apapun dari rakjat Irian Barat dalam Dewan sematjam itu ?

Djelaslah bahwa Pemerintah Belanda akan merelakan hak menentukan nasib sendiri, — djika memang ada — hanja orang-orang Irian Barat jang dapat dibuat mendjadi pro-Belanda, jang dipimpin dan dibimbing oleh pegawai-pegawai Belanda dan jang sering dipertakuti dengan kekuatan militer Belanda.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Sebenarnja, seluruh pemerintahan dan politik kolonial di Irian Barat hanja dapat bertahan karena adanja kekuatan militer Belanda.

Menarik hati dan menjolok djuga dalam hubungan ini bahwa rentjana tuan Luns itu tak menjebut-njebut penghentian segala aksi bersendjata atau tindakan-tindakan penindasan berupa apapun jang ditudjukan terhadap rakjat djadjahan, seperti jang diharuskan oleh pasal 4 dari Resolusi 1514 (XV), agar supaja memungkinkan mereka untuk melakukan hak mereka untuk menjempurnakan kemerdekaan mereka dengan damai dan bebas dan agar supaja keutuhan wilajah nasional mereka dapat terdjamin. Tuan Luns samasekali dan dengan enaknja mengabaikan pasal ini jang teristimewa dapat dipakai untuk keadaan di Irian Barat ini. Pemerintahan kolonial malah telah sedemikian djauh bertindak hingga mengusir orang-orang Indonesia dari wilajah itu dengan djumlah rata-rata 100 orang sebulan — orang-orang Indonesia jang tidak menjetudjui politik Belanda.

Penentuan nasib sendiri tanpa kebebasan, tentu sadja adalah omong kosong. Karena itu tak mengherankan bagi kami bahwa tindakan pertama dari apa jang dinamakan Dewan Papua itu sifatnja agak aneh. Putusan pertama dari Dewan ini ialah, sebenarnja, sangat bersifat membuka kedok. Putusan tersebut adalah sebuah mosi jang *diusulkan* bila tidak didiktekan oleh Ketuanja orang Belanda itu dan tentu sadja disetudjui oleh Dewan itu sebagai keseluruhannja, untuk mengirim kawat pada Pemerintah Belanda di den Haag menjatakan, atas nama rakjat Irian Barat, kesetiaan jang kekal dari Dewan itu kepada dinasti Oranje (jaitu, kepada Mahkota Belanda) dan perasaan-perasaan pertalian jang kuat dengan rakjat Belanda.

Nah, Tuan Ketua, apakah rakjat Irian Barat itu perlu dididik untuk kemerdekaan atau untuk didjadjah selama-lamanja? Kawat Dewan Papua ini, meski tak mengherankan, benar-benar sebuah bukti jang menjolok dari tabiat kolonial Belanda. Lagi-lagi ini menundjukkan bahwa politik Belanda di Irian Barat adalah asli dan djelas

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

suatu politik kolonial. Dan, boleh saja tambahkan, suatu politik jang agak kuno djuga dalam djaman dekolonisasi ini.

Tak mengherankanlah, karenanja, bahwa orang-orang jang waras pikirannja akan sukar sekali menerima dengan sungguh-sungguh pernjataan-pernjataan Pemerintah Belanda tentang hak menentukan nasib sendiri.

Bila sembojan Belanda tentang „penentuan nasib sendiri" dalam rentjana Pemerintah Belanda jang sekarang ini masih tetap kedengaran menarik bagi beberapa anggota dari Madjelis jang mulia ini, jang saja ragukan sesudah mengetahui sedjarah sebenarnja dari resim kolonial Belanda di Irian Barat, biarlah saja menambahkan tjatatan resmi tentang tindakan-tindakan Pemerintah Belanda di PBB sendiri.

Waktu ditahun 1955 Komite ketiga memasukkan hak Rakjat-rakjat untuk Menentukan Nasib Sendiri sebagai pasal 1 dari rentjana persetudjuan-persetudjuan tentang Hak-hak Asasi Manusia, delegasi Belanda menentangnja.

Tjatatan berikut tentang Delegasi Belanda mengenai soal-soal lain jang mentjakup penggunaan hak menentukan nasib sendiri di Madjelis ini menundjukkan hal sebagai berikut:

Belanda *tidak* menjokong hak ini bagi rakjat Marcko. Belanda *tidak* menjokong hak ini bagi rakjat Tunisia. Ia *tidak* menjokong hak ini bagi rakjat Aldjazair. Belanda *tidak* menjokong hak ini dalam hal Afrika Barat Daja atau daerah-daerah Tidak-Berpemerintahan-Sendiri lainnja. Belanda tidak *pernah* mengeluarkan suaranja untuk pelaksanaan sebenarnja dari hak menentukan nasib sendiri!

Meskipun Belanda mengeluarkan suara pro untuk Resolusi 1514 Madjelis Umum (XV) dalam bulan Desember tahun jang lalu, tjatatan menundjukkan bahwa delegasi Belanda sedjak saat itu tetap menundjukkan keengganan jang sukar dapat dimengerti untuk menjokong hak menentukan nasib sendiri. Dalam bulan April tahun ini, Delegasi

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Belanda tidak menjokong resolusi jang membenarkan hak menentukan nasib sendiri dari rakjat Angola, meskipun resolusi ini didasarkan chusus atas Resolusi 1514 (XV) dan mengusahakan pelaksanaannja dalam soal Angola. Lagi, baru dalam bulan Agustus tahun ini, Delegasi Belanda tidak memberi sokongannja waktu rakjat Tunisia menuntut hak-haknja jang sah dalam soal Bizerta.

Tidak, Tuan Ketua, saja menjesal harus mengatakan bahwa kami tak dapat menerima gagasan tentang hak menentukan nasib sendiri dari Belanda itu dengan sungguh-sungguh. Djanganlah kita ditipu oleh sembojan hak menentukan nasib sendiri jang sekarang diadjukan dengan menjolok itu dalam rentjana tuan Luns mengenai Irian Barat. Sebenarnja ketidakbenarannja telah dibuktikan sebelumnja, baik di Madjelis ini, maupun di Irian Barat sendiri, dan sekarang malahan dinegeri Belanda sendiri.

Ketika masalah Irian Barat diperdebatkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa tahun jang lampau, maka wakil Iraq memberikan tindjauan jang sangat tepat sebagai berikut:

> „..... disamping merupakan suatu dalil jang tidak mengenai pokok persoalan, permainan dengan faham menentukan nasib sendiri ini sebagaimana dilakukan oleh Negara-negara kolonial, tidak lain hanjalah suatu usaha jang munafik untuk memperpandjang kehadiran mereka didaerah-daerah djadjahannja. Sebelum mengambil kedudukan jang sedemikian, maka adalah bidjaksana bagi Pemerintah Belanda untuk menindjau kembali tjatatannja jang negatif mengenai soal penentuan nasib sendiri selama sepuluh tahun belakangan ini".

Dan izinkanlah saja untuk mengingatkan Madjelis ini kepada utjapan wakil jang terhormat dari Federasi Malaya, Dr Ismail, berkenaan dengan segi ini dari soal Irian Barat, pada waktu Madjelis Umum PBB memperdebatkannja ditahun 1957. Dr Ismail menjatakan dengan tegas, bahwa djandji-djandji Belanda tentang

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

penggunaan hak menentukan nasib sendiri — saja kutip — „terdengar hampa ditelinga suatu rakjat djadjahan". Dr Ismail berkata selandjutnja:

„Ketika Abraham Lincoln membebaskan budak-budak di Amerika Serikat, beliau mengambil tindakan demikian dengan tidak menunggu sampai budak-budak bangsa Negro itu menjatakan keinginannja dan mendapat kesempatan untuk menentukan nasibnja sendiri. Abraham Lincoln menghapuskan perbudakan oleh karena beliau memandang perbudakan sebagai suatu kedjahatan terhadap peri-kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa hendaklah mempergunakan ukuran jang sama dalam mempertimbangkan masalah kolonialisme".

Pandangan jang tepat ini mendapat sokongan dari banjak pihak. Malah dinegeri Belanda sendiri tidak sedikit orang — orang-orang jang mempunjai maksud-baik — jang memandang demikian. Profesor Roling, dalam bukunja jang tadi telah saja sebut, menulis mengenai perdebatan masalah Irian Barat disidang Madjelis Umum PBB — dan saja kutip dari halaman 72 dari buku itu sebagai berikut:

> „Dapat dipahami" — saja ulangi „dapat dipahami" — „apa sebabnja banjak diantara delegasi-delegasi, jang tidak bisa menerima dalil-dalil Belanda mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi rakjat Papua setjara sungguh-sungguh".

Seorang tokoh terkemuka dari partai Tuan Luns sendiri, Partai Katholik, jaitu profesor Duynstee dari Universita Katholik di Nijmegen, menjatakan baru sebulan jang lampau dalam pidatonja didepan Perhimpunan Mahasiswa Utrecht, bahwa djandji Pemerintah Belanda untuk memberikan rakjat Irian Barat hak untuk menentukan pilihannja sendiri mengenai status masa depannja — jaitu apa jang disebut hak menentukan nasib sendiri — dan saja kutip:

„Dalam kenjataannja adalah tidak lain daripada suatu permainan dengan kata-kata belaka". Saja ulangi: „Dalam kenjataannja

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

adalah tidak lain daripada suatu permainan dengan kata-kata belaka" Tanda kutip tutup

Dengan istilah jang lebih kasar, Profesor Duynstee menjebutkan apa jang dikatakan pilihan sendiri itu ,,tidak lain daripada suatu penipuan"

Ja, Tuan Ketua, politik Belanda, termasuk siasatnja sekarang jang digariskan dalam rentjana jang diadjukan oleh Tuan Luns, sama sekali tidak mempunjai hubungan apa-apa dengan hak penentuan nasib sendiri bagi rakjat Irian Barat. Dewasa ini, sebagaimana halnja dimasa jang lampau, politik Belanda itu hanjalah merupakan suatu penentuan nasib Pemerintah Belanda sendiri — dengan atau tanpa suatu Dewan Papua.

Apakah jang dapat kita harapkan dari rentjana Tuan Luns?

Rentjana Luns dalam bentuknja sekarang tidak akan dapat menjelesaikan masalah Irian Barat, oleh karena rentjana itu mengenjampingkan latar belakangnja jaitu persengketaan dengan Indonesia. Dalil-dalil mengenai apa jang disebut de-kolonisasi dan ,,hak menentukan nasib sendiri" bagi Irian Barat adalah menjesatkan dan malah mungkin akan merugikan diri sendiri.

Menurut rentjana Luns tersebut Belanda tidak akan melepaskan tuntutan kedaulatannja atas Irian Barat sampai hak rakjatnja untuk menentukan nasib sendiri ,,sudah terdjamin dengan sebaik-baiknja".

Lagi pula, ribuan pegawai-pegawai Belanda di Irian Barat akan tetap tinggal disana untuk masa jang tidak ditentukan. Sudah barang tentu, hal ini adalah tidak lain daripada neo-kolonialisme. Suatu Kongo jang lain lagi! Suatu Katanga jang lain lagi!

Kita katakan semua ini, oleh karena pengalaman pahit jang kita alami sendiri di Indonesia, jaitu dikala Pemerintah Belanda mendjual sembojan ,,penentuan nasib sendiri" diberbagai daerah Indonesia, jang menjaingi hak menentukan nasib sendiri jang telah dinjatakan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

semula oleh bangsa Indonesia sebagai keseluruhan. Hal itu adalah sebagian dari politik divide et impera Belanda: suatu politik jang sudah kita kenal benar-benar.

Dengan kedok menentukan nasib sendiri, Belanda berhasil mendjelmakan, disaat sedang meradjalelanja perang kolonial, beberapa negara-negara bagian dalam wilajah Indonesia sendiri, dengan dikepalai oleh boneka-bonekanja, sebagai tindakan untuk menentang dan merongrong Republik Indonesia.

Ketika politik ini ternjata gagal dan Republik Indonesia berhasil mengatasi pertjobaan-pertjobaan itu, Belanda mengadakan pertjobaan lagi ditahun 1950. Dengan disokong oleh pemberontakan tentara kolonial Belanda di Maluku (Indonesia Timur), Belanda mendirikan apa jang disebut „Republik Maluku Selatan". Sjukurlah, „republik" itu dapat segera dihantjurkan oleh Angkatan Perang Nasional Republik Indonesia.

Apakah mengherankan bahwa Pemerintah saja, jang menginsjafi tindakan-tindakan anti-Indonesia dan propaganda Pemerintah kolonial Belanda di Irian Barat, jakni propagandanja jang telah usang mengenai hak menentukan nasib sendiri, menanjakan dengan sungguh-sungguh kepada dirinja sendiri apakah rentjana Tuan Luns tidak dilantjarkan dengan maksud untuk mengembangkan pembentukan apa jang disebut Irian Barat „jang merdeka" terhadap Indonesia? Hal ini tampaknja tidak bisa masuk akal, tapi kami mempunjai tanggung djawab jang maha berat terhadap bangsa kami, terutama diwaktu sekarang terhadap bangsa kami di Irian Barat, di Propinsi Irian Barat.

Seandainja rentjana Tuan Luns mengandung pikiran-pikiran kearah ini, maka hal itu adalah bertentangan dengan pertumbuhan wadjar bangsa kami, bertentangan dengan logika dan tudjuan jang sebenarnja dari de-kolonisasi untuk mendirikan negara-negara merdeka.

Hak menentukan nasib sendiri tidak boleh dipergunakan untuk memetjah-belah suatu bangsa, tapi hendaklah dipakai untuk persa-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

tuan nasional dan untuk pertumbuhan suatu negara jang kuat dan mantap. Hal ini adalah sangat penting bagi negara-negara jang berdjuang untuk kemerdekaannja dari kolonialisme. Batas dari wilajah negara jang sedemikian ditentukan oleh batas wilajah bekas daerah djadjahan itu sendiri. Ini adalah suatu soal jang sudah djelas dan mudah, jang tidak boleh dipersulit.

Izinkanlah saja dalam hal ini mengutip disini utjapan dari Menteri Luar Negeri Republik Senegal, jang mengatakan dengan tegas:

„Dari mulai saat suatu daerah djadjahan mendapat kemerdekaannja, maka kedaulatan jang baru diperolehnja harus dilaksanakan atas lingkungan wilajah jang dahulunja mendjadi lingkungan wilajah kedaulatan kolonial".

Penglaksanaan kedaulatan seperti inilah terhadap Irian Barat jang ditjoba hendak dikesampingkan dan dihalangi oleh Pemerintah Belanda sedjak 12 tahun terachir ini.

Bangsa-bangsa Asia dan Afrika, jang telah berdjuang melawan kolonialisme untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaannja, akan dapat memahami dengan mudah apa sebenarnja jang terselip dibelakang siasat Pemerintah Belanda; jaitu neo-kolonialisme dan subversi terhadap kebebasan dan kemerdekaan.

Saja pertjaja, bahwa saja dapat berbitjara disini atas nama Negara-negara Asia dan Afrika, mulai dari Dakar hingga ke Manila. Ja, sampai ke Manila. Izinkanlah saja mengutip sebuah tadjuk rentjana mengenai rentjana jang kini diadjukan oleh Tuan Luns, jang dimuat dalam suratkabar Manila Chronicle, jang berpengaruh dan berhaluan nasionalis, pada tanggal 29 September jang lalu. Tadjuk rentjana itu demikian bunjinja:

„Indonesia berhak menuntut Irian Barat, jang termasuk bagian dari wilajahnja, sedang usul Belanda, sudah barang tentu, dimaksudkan untuk mengetjewakan bangsa Indonesia agar Belanda dapat mempertahankan koloninja jang masih ada di Asia. Tapi usul Belanda itu adalah immoril dan lagi tidak asli".

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Tadjuk rentjana itu seterusnja bunjinja:

„Tidak ada alasan untuk pertjaja bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan teperdaja oleh tipu muslihat kolonial itu. Oleh karena Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengalami kesulitan disebabkan keinginan Belgia hendak mempertahankan djadjahannja jang kaja dengan intan di Afrika dengan djalan menondjolkan boneka-boneka untuk menjatakan Katanga — bagian jang sah dari Kongo — sebagai suatu negara merdeka".

„Istimewa bangsa Asia tentu bentji sekali akan tipu muslihat Belanda ini. Oleh karena djika Irian Barat mendjadi Katanga di Asia, maka perdamaian didaerah itu akan selalu terganggu". Demikian 'Manila Chronile' menulis.

Tuan Ketua, marilah kita berdjaga-djaga agar djangan timbul Kongo kedua, Katanga kedua di Asia, jang mungkin terdjadi sebagai akibat dari rentjana Tuan Luns sekarang. Malah rentjana itu mungkin akan membawa akibat jang lebih gawat dan membawa kepada sengketa jang lebih hebat, jang tidak akan terbatas dilingkungan kedua negara kami sadja.

Djalan jang lebih bidjaksana jang harus ditempuh.

Saja pertjaja bahwa Tuan Luns bukanlah sama sekali tidak menginsjafi kemungkinan timbulnja suatu sengketa, suatu sengketa jang lebih gawat, disebabkan masalah Irian Barat, mengingat djalan perkembangan sedjak beberapa tahun terachir. Sesungguhnja, sekiranja saja membatja dengan benar pidato Tuan Luns pada tanggal 26 September itu, Tuan Luns mendasarkan pendahuluan untuk memadjukan rentjananja kepada PBB atas filsafat jang dianut oleh almarhum Sekretaris Djenderal Dag Hammarskjold, jang berpendapat bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa hendaklah dipergunakan sebagai suatu alat jang dinamis tidak sadja untuk mentjari perdamaian, tapi djuga dengan tudjuan menghindarkan timbulnja sesuatu sengketa. Sesuai dengan dasar filsafat ini, maka Tuan Luns,

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

sebagaimana telah dibajangkannja, berusaha mempergunakan rentjananja „sebagai sumbangan untuk melenjapkan suatu perkembangan jang berbahaja". Nah, rupanja ada djuga suatu bidang persesuaian paham antara Tuan Luns dan saja, jaitu bahwa masalah Irian Barat merupakan suatu perkembangan jang berbahaja dan mengandung kemungkinan akan meletus mendjadi suatu sengketa jang sangat gawat, sengketa jang harus dihindarkan. Tapi sajang, rentjana Tuan Luns tidak dan tidak akan bisa menghindarkan timbulnja sesuatu sengketa. Sengketa antara Nederland dan Indonesia akan tetap tinggal dalam keadaan belum terselesaikan. Malah sengketa itu akan bertambah luas. Rentjana itu sama sekali tidak akan dapat menjelesaikan masalah Irian Barat. Rentjana itu tidak akan dapat memberi sumbangan kepada pemeliharaan perdamaian.

Andjuran Indonesia.

Tuan Ketua, izinkanlah saja menutup pidato saja dengan mengemukakan suatu andjuran. Saja memadjukannja sebagai suatu usaha dalam memberikan sumbangan jang tulus ichlas guna menjelesaikan pertikaian Irian Barat, jang sudah terlampau lama mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Belanda, terlampau lama mengganggu perdamaian dan perkembangan setjara damai penduduk Irian Barat.

Pertama. Rentjana Tuan Luns dalam bentuknja sekarang tidak bisa menjelesaikan masalah Irian Barat setjara damai, dan oleh sebab itu tidak bisa menjelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda.

Kedua. Bila Pemerintah Belanda memang sungguh-sungguh berhasrat untuk melepaskan tuntutan kedaulatannja atas Irian Barat dan mengachiri pendjadjahannja atas daerah itu, maka niat ini harus disambut sebagai permulaan dari penjelesaian jang sedjati dari sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Sebenarnja sumber pokok pertikaian antara Indonesia dan Belanda itu akan dapat dilenjapkan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Ketiga. Untuk menjempurnakan penjelesaian itu, hanja memerlukan penjerahan pemerintahan atas Irian Barat setjara tertib dari tangan Belanda kepada Republik Indonesia, dengan berdasarkan semangat kerdjasama antara kedua negara itu dan keinginan bersama untuk me-normalisasikan hubungan-hubungan antara Indonesia dan Belanda.

Keempat. Pemerintah saja tidak akan menaruh keberatan bila Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan bantuannja, djika diperlukan, dalam melaksanakan rentjana jang sedemikian melalui pembentukan sebuah badan chusus atau kekuasaan chusus, jang atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memungkinkan terwudjudnja suatu penjelesaian setjara teratur.

Kelima. Bila rentjana Luns itu didasarkan atas Resolusi 1514 Madjelis Umum (XV), jaitu resolusi jang dimaksudkan dalam rentjana Luns, maka rentjana itu hendaklah memperhatikan setjara wadjar asas jang ditjantumkan dalam pasal 6 dari resolusi tersebut, jang bunjinja sebagai berikut:

> „Setiap usaha jang ditudjukan kearah pelanggaran kesatuan nasional atau keutuhan wilajah sesuatu negara, baik setjara total maupun setjara partial, tidak sesuai dengan tudjuan-tudjuan dan asas-asas Piagam P.B.B.".

Sebaliknja, Republik Indonesia dengan bantuan PBB akan mentaati asas, bahwa bangsa Indonesia setempat di Irian Barat akan memegang tanggung-djawab penuh atas otonomi daerah didaerah tersebut. Ini adalah sesuai dengan adanja propinsi-propinsi otonomi lainnja di Republik Indonesia.

Keenam. Hak menentukan nasib sendiri, jang merupakan suatu asas jang hidup jang didjundjung tinggi oleh Republik Indonesia dan untuk mana bangsa Indonesia telah berdjuang guna mempetoleh kebebasan dan kemerdekaannja, djanganlah disalah-gunakan dalam pemakaiannja dan djanganlah dipergunakan melawan kepentingan-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

kepentingan jang sebenarnja dari rakjat Irian Barat, dengan djalan merongrong kemerdekaan nasional jang telah diperoleh.

Ketudjuh. Bila masalah Irian Barat hendak diselesaikan setjara damai, maka penjelesaiannja harus dilakukan dalam waktu setjepat-tjepatnja.

Kedelapan. Pemerintah Indonesia bersedia untuk menjumbangkan bagiannja dalam usaha PBB untuk menjelesaikan masalah Irian Barat setjepat-tjepatnja menurut garis-garis jang telah dikemukakan tadi, baik dalam arti bantuan personil, teknik maupun keuangan.

Tuan Ketua, saja jakin bahwa tjara penjelenggaraan ini adalah suatu tjara jang konstruktif. Tjara penjelesaian jang telah saja kemukakan adalah penjelesaian terbaik jang dapat dilakukan, untuk mana P.B.B. dapat memberikan bantuannja. Suatu „penjelesaian" sebagaimana dibajangkan oleh rentjana Tuan Luns akan kami tolak dengan keras. Djika Pemerintah Belanda hendak melaksanakan djuga rentjana itu dalam bentuknja sekarang — dalam perkataan lain djika Pemerintah Belanda hendak tetap menjelesaikan masalah Irian Barat tanpa Indonesia, menganggap Indonesia sebagai tidak ada — maka saja dapat menjatakan kepada Madjelis ini dengan segala kesungguhan, bahwa bagi Pemerintah dan bangsa Indonesia tidak ada djalan lain daripada menjelesaikan masalah Irian Barat dengan tjara jang setimbal.

Kami sendiri jakin, bahwa Irian Barat akan dipulihkan kembali kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia. Pada hakekatnja Irian Barat adalah sebagian dari negara kami. Rakjatnja adalah sebagian dari rakjat Indonesia. Djanganlah ada orang jang keliru akan kenjataan ini.

Semoga Tuhan Jang Maha Kuasa memberkati kita dalam perdjuangan untuk kebebasan, keadilan dan perdamaian.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNJATAAN

DR SUBANDRIO

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETUA DELEGASI INDONESIA

KE MADJELIS UMUM KE-XVI P.B.B.

---

9 NOPEMBER 1961.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Tuan Ketua,

Atjara jang sekarang mendjadi *pokok pembitjaraan* adalah sangat penting. Tahun jang lalu Madjelis Umum jang ke-XV telah menerima sebuah Pernjataan jang bersedjarah mengenai kebebasan bangsa-bangsa dan rakjat-rakjat. Pernjataan itu dengan chidmat menjatakan keharusan untuk selekas mungkin mengachiri kolonialisme dalam segala bentuk dan pendjelmaannja.

Tidak perlu rasanja saja uraikan dengan pandjang lebar dihadapan Madjelis ini betapa kolonialisme itu telah mempengaruhi kehidupan ummat manusia. Berdjuta-djuta perkataan telah diutjapkan dalam Madjelis jang mulia ini, jang menggambarkan keadaan dari rakjat-rakjat tak terhitung banjaknja jang telah beratus tahun menanggung siksaan kolonialisme, *pendjadjahan dan penghisapan asing*. Rakjat-rakjat itu telah melalui suatu sedjarah jang penuh dengan penindasan dan kesengsaraan, penghinaan dan penghisapan. Tetapi mereka djuga telah mengalami peperangan dan perdjuangan perkasa untuk kemerdekaan.

Memang, kolonialisme senantiasa *mendjumpai perlawanan*. Semakin kuat kolonialisme dipaksakan, semakin kuat pula perlawanan terhadapnja. Perang kolonial, walaupun *hanja setjara ketjil-ketjilan* dan terbatas pada sesuatu daerah, tak dapat dipisahkan dari sedjarah kolonialisme. Hanja disebabkan keunggulan dalam teknik dan alat-alat fisik sadjalah maka kekuasaan-kekuasaan kolonial dimasa lampau dapat memaksakan pertuanan mereka atas rakjat-rakjat didaerah-daerah jang sangat luas didunia ini.

Daerah-daerah kolonial atau taklukan itu didirikan untuk memuaskan kehendak negara-kolonial tertentu. Tetapi ketika perlawanan terhadap pertuanan dan penghisapan itu mulai tumbuh, ia men-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

djelma dalam bentuk perlawanan nasional dan perdjuangan nasional untuk kebebasan dan kemerdekaan. Seluruh rakjat daerah-daerah jang ditaklukkan itu dipersatukan oleh nasib jang sama dan kepentingan bersama untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme. Nasionalisme inilah, kekuatan terhimpun sesuatu rakjat jang menganggap dirinja inti-pati nasional inilah, jang paling ditakuti oleh kekuasaan-kekuasaan kolonial. Kekuatan terhimpun inilah, didukung pula oleh tjita-tjita manusia akan kebebasan, martabat, kesamaan dan kemadjuan, jang telah memenangkan kemerdekaan nasional bagi banjak daerah taklukan.

Bagaimanapun djua, perdjuangan untuk kemerdekaan nasional sekali-kali tidak mudah. Ia harus mengatasi segala matjam — baik bersifat politik, ekonomi maupun militer — jang akan menghantjurkan gerakan-gerakan nasional untuk kebebasan, jang akan menghantjurkan kekuatan nasional jang terhimpun. Ia telah diperhadapkan kepada politik kolonial "divide et impera", diperhadapkan kepada subversi atau tjampur-tangan terang-terangan untuk mematahkan tekad dan kesatuan nasional.

Bahkan setelah kemerdekaan tertjapai, setelah perdjuangan jang sengit telah dimenangkan, negara-negara kolonial masih mentjoba dengan pelbagai djalan, termasuk penanda-tanganan „persetudjuan-persetudjuan", untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka selama mungkin.

Ini memang bukan sesuatu jang sungguh baru. Banjak anggauta-anggauta Madjelis ini, terutama mereka jang telah mengalami perdjuangan kolonial ini, mengenal tjiri-tjiri kolonialisme ini. Kebanjakan, termasuk Indonesia sendiri, masih menghadapi perdjuangan melawan neo-kolonialisme dinegara mereka sendiri. Oleh karena itu kami anggap sangat penting bahwa Madjelis ini menjelidiki dengan seksama dan bidjaksana masalah kolonialisme ini. Adalah tugas jang berat dan sulit, baik diwaktu lampau maupun diwaktu sekarang ini, untuk menghapuskan kolonialisme dalam segala bentuk

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

dan pendjelmaannja, sebagaimana dikehendaki oleh Pernjataan P.B.B. itu.

Pernjataan ini, jang pelaksanaannja sedang kita perbintjangkan sekarang, merupakan kemenangan moril bagi seluruh kekuatan anti-kolonial. Akan tetapi, negara-negara kolonial — sebagai keseluruhan — tidak menjokong Pernjataan ini, walaupun mereka tidak sanggup berterang-terangan menentang tuntutan kemerdekaan bagi rakjat-rakjat dan bangsa-bangsa jang masih terdjadjah. Ini berarti bahwa pelaksanaan dari Pernjataan ini — dari Pernjataan P.B.B. ini — harus dilakukan dengan segala ichtiar dan moral politik jang ada pada kita. Pelaksanaan itu menghendaki usaha kita jang penuh dan bulat.

Tetapi, dalam pada itu, tidaklah benar untuk mengatakan bahwa Pernjataan ini sama sekali tidak ada pengaruhnja atas sikap Negara-negara kolonial. Kolonialisme, pada achirnja, adalah suatu sikap dan suatu keadaan perasaan. Perdjuangan untuk kebebasan dan martabat manusia dimana-mana sudah barang tentu telah menimbulkan pandangan tentang suatu dunia baru bagi mereka jang pandangannja tentang dunia selama ini terbatas kepada kepentingan mereka sendiri jang sempit. Ia telah memperluas pikiran manusia. Ia telah memadjukan, tidak sadja bangsa-bangsa jang terdjadjah, tetapi djuga negara-negara kolonial dalam tjara berfikir dan sikap mereka. Ini baik. Ini adalah sesuatu jang harus disambut dengan gembira.

Tapi sungguhpun ada jang telah bergerak kearah kemadjuan, namun masih ada beberapa Negara kolonial jang masih tetap menentang proses ini. Setjara membabi-buta mereka tetap mempertahankan kedudukannja dan terus berusaha melawan arus sedjarah. Maka mendjadi tugas Madjelis Umum jang luhur inilah untuk mempertjepat proses emansipasi dan kebebasan ini, demi kepentingan bangsa-bangsa jang didjadjah maupun Negara-negara pendjadjah sendiri. Sebab terhapusnja kolonialisme dari muka bumi sama-sama

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

memberikan kebebasan dan mempertinggi martabat manusia, baik kepada Negara-negara jang mendjadjah maupun kepada bangsa-bangsa jang didjadjah. Inilah, saja kira, arti sesungguhnja dari Pernjataan P.B.B. itu.

Ia berusaha mentjari perbaikan dalam hubungan internasional atas dasar kesamaan dan kebebasan. Ia berusaha mentjari perdamaian dan keamanan atas dasar kemadjuan dan kemakmuran bagi semua bangsa. Sebagaimana kita ketahui semua, masih ada kira-kira 70 djuta manusia — tersebar diseluruh dunia, tetapi terutama di Asia dan Afrika — jang hidup dalam ikatan kolonial. Keadaan sematjam ini harus segera diachiri, sesuai dengan Resolusi 1514 Madjelis Umum ke-XV. Kita tidak bisa menangguhkan lebih lama lagi. Selama masih ada bangsa jang menderita dibawah beban kolonialisme, selama masih ada bangsa — tidak perduli bagaimana taraf kemadjuan sosialnja sekarang — jang dirampas hak-hak asasinja, maka tidak akan ada perdamaian didunia ini. Tiadanja kebebasanlah, *bukan* taraf kemadjuan sosialnja, jang mengantjam perdamaian antara bangsa-bangsa. Kenjataan ini harus ditekankan berkali-kali.

Dalam alam kemerdekaanlah kemadjuan sosial dan politik mereka harus berkembang, dituntun oleh tjita-tjita nasional dan diilhami oleh kemauan untuk membangun suatu bangsa jang kuat dan bersatu. Kami tidak ingin melihat penghapusan kolonialisme sekedar setjara formil belaka. Kami ingin membantu kemerdekaan bagi bangsa-bangsa jang masih terdjadjah dengan sjarat-sjarat jang dapat mendjamin bagi mereka kesempatan seluas-luasnja untuk berkembang setjara politis, sosial dan ekonomis, dengan bekerdja sama dengan P.B.B. Ini adalah, berdasarkan pengalaman kami sendiri, suatu tugas jang sangat penting dan berat.

Itulah sebabnja maka delegasi saja menjokong fikiran pembentukan sebuah panitia untuk melaksanakan Resolusi 1514 Madjelis Umum ke-XV tadi, terdiri dari anggauta-anggauta jang betul-betul mengetahui dan betul-betul mengerti akan tjita-tjita nasional dari bangsa-bangsa jang terdjadjah. Panitia P.B.B. sematjam itu seha-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

rusnja terdiri dari orang-orang jang didjiwai pula oleh semangat jang berkobar-kobar untuk kemerdekaan, seperti halnja pada bangsa-bangsa terdjadjah.

Seperti mungkin disadari oleh Madjelis ini, Kelompok Asia-Afrika, dimana delegasi saja tergolong, dan jang telah menjusun rentjana Deklarasi jang diterima oleh Madjelis Umum ke-XV, kini sedang mempeladjari tjara-tjara pelaksanaannja dan kemungkinan untuk mengadjukan suatu rentjana resolusi kearah itu, tentunja tanpa prasangka terhadap Rentjana resolusi Uni Sovjet jang perlu mendapat perhatian kita jang penuh. Oleh sebab itu saja akan mempergunakan hak saja untuk berbitjara pada kesempatan kemudian jang tepat mengenai semua rentjana resolusi jang akan diadjukan dalam hubungan pokok soal 88 dan 22a.

Intervensi saja pada saat ini chusus ditudjukan terhadap pernjataan jang kita dengar kemarin dari Menteri Luar Negeri Belanda jang mengadjukan dalam perdebatan ini sebuah rentjana resolusi jang menjinggung sebagian dari negara saja, Irian Barat.

Kemarin saja mendengarkan dengan penuh perhatian pidato Menteri Luar Negeri Belanda, dimana ia menerangkan usulnja jang nampaknja sangat murah hati itu untuk men-dekolonisasi daerah Irian Barat, bagian dari Republik Indonesia, dengan mengachiri kekuasaan Belanda disana dan memindahkan kekuasaan kepada rakjatnja segera setelah P.B.B. dapat mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan administratif jang belum dapat dikerdjakan oleh penduduk sendiri pada taraf sekarang ini.

Jang terutama menarik perhatian saja dari pernjataan Tuan Luns ialah bahwa tindakan Belanda ini adalah sesuatu jang agak unik dan baru, jang belum pernah ditjoba oleh suatu Negara pendjadjah.

Tuan Ketua, djika seseorang tidak tahu apa-apa tentang hubungan-hubungan internasional, djika seseorang tidak mengetahui perdjuangan melawan kolonialisme, djika seseorang tidak pernah men-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

dengar tentang perdjuangan kemerdekaan mati-matian jang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap si-pendjadjah, dan djika usul Menteri Luar Negeri Luns ini langsung dapat dipraktekkan terhadap semua koloni-koloni Belanda jang masih ada, seperti Suriname dan Curaçao, maka Tuan Ketua, sajalah jang pertama-tama akan mengutjapkan selamat kepada Tuan Luns dan menjatakan kekaguman saja terhadap sikap kemanusiaan dan anti-kolonialnja itu. Djika memang demikian, maka sudah sewadjarnjalah ia mendapat Hadiah Nobel untuk Perdamaian seperti Tuan Luthuli dari Afrika Selatan.

Akan tetapi, penelitian jang lebih seksama terhadap „kemurahan hati" Belanda itu tidak boleh tidak akan membawa kita kepada kesimpulan jang sama sekali berlainan daripada kesimpulan Tuan Luns itu.

Pertama — dan saja ingin menekankan ini — kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil suatu hadiah Natal jang dianugerahkan kepada kita oleh Belanda. Kami mentjapai kemerdekaan kami dalam suatu peperangan jang hebat dan kedjam, dari tahun 1945 sampai achir tahun 1949. Lebih dari setengah djuta bangsa kami telah djatuh korban dalam perdjuangan kemerdekaan Indonesia itu. Negeri Belanda pada waktu itu lebih unggul dalam kekuatan fisiknja dan ini dipergunakannja dengan kekedjaman jang tak mengenal batas. Pembunuhan-pembunuhan terhadap rakjat djelata hampir-hampir merupakan kedjadian sehari-hari. Benar kami telah menderita sewaktu pendudukan Djepang, akan tetapi apa jang mereka perbuat merupakan suatu gangguan jang tidak seberapa djika dibandingkan dengan kekedjaman-kekedjaman Belanda.

Sebagai tjontoh, Tuan Ketua, Kapten Westerling jang terkenal buruk itu telah sanggup membunuh 40.000 orang penduduk Sulawesi Selatan dalam waktu satu minggu sadja — kebanjakan orang-orang tua, wanita dan anak-anak, karena orang-orang muda jang dapat memanggul sendjata telah lari kehutan untuk mengadakan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

perang gerilja terhadap Belanda. Babak ini dari perdjuangan nasional kami masih segar dalam ingatan kami dan pembunuhan besar-besaran di Sulawesi Selatan itu selalu diperingati tiap tahun sebagai peringatan kepada bangsa kami bahwa kemerdekaan kami diperoleh dengan djalan perdjuangan dan pengorbanan-pengorbanan besar.

Djuga setelah pengakuan kemerdekaan oleh Belanda pada achir tahun 1949, Belanda masih tetap melandjutkan politik kolonial subversif mereka terhadap Republik jang masih muda itu. Mereka mendalangi proklamasi apa jang dinamakan Republik Maluku Selatan sebagai suatu pertjobaan untuk memetjah belah Indonesia. Kami menghantjurkan gerakan separatis ini dengan kekuatan militer kami dalam beberapa hari sadja. Belanda merentjanakan pemberontakan-pemberontakan dimana-mana dan untuk tudjuan ini mereka mengirim Kapten Westerling jang terkenal itu ke Indonesia. Dibawah pimpinan Kapten Westerling telah ditjoba suatu kudeta terhadap Pemerintah Pusat. Kudeta tersebut tidak berhasil.

Setelah kegagalan ini Belanda memusatkan perhatiannja untuk mengeruhkan masalah Irian Barat, dan malah sampai memasukkan daerah sengketa ini dalam Undang-undang Dasarnja sebagai bahagian wilajah Keradjaan Belanda. Dimana pada mulanja pemerintahan pendudukan Belanda atas Irian Barat untuk sementara dipertahankan sebagai suatu politik ketjerdikan untuk memperlunak reaksi didalam negeri Belanda terhadap kehilangannja atas Indonesia, Belanda sekarang mulai mempergunakan wilajah ini sebagai suatu pangkalan untuk menambah kesukaran-kesukaran bagi Indonesia dan mengadakan subversi kedaerah-daerah Indonesia lainnja. Sikap anti Indonesia dari Belanda ini lebih landjut dapat dilihat dalam penolakannja terus-menerus untuk mengadakan perundingan-perundingan bilateral tentang inti-pokok persoalan Irian Barat. Ketika sampai kepada perundingan-perundingan tentang prosedur, mereka sampai sebegitu djauh membiarkan Delegasi Indonesia menunggu hingga 2 bulan lamanja dinegeri Belanda, sebelum mereka sudi menghadiri perundingan tersebut. Hanja untuk menundjukkan penghinaannja

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

terhadap orang-orang Indonesia. Tuan Luns ketika pada Konperensi tahun 1955 di Genewa tiba-tiba meninggalkan Konperensi tersebut untuk beristirahat beberapa minggu dilautan Tengah.

Tuan Ketua, saja menjebut hal-hal ini hanja untuk menggambarkan sentimen anti Indonesia jang keras sekali dari Menteri Luar Negeri Belanda. Dengan segala daja upaja ia akan mempergunakan setiap kesempatan untuk menghina Indonesia dan bangsa Indonesia Dari tahun 1945 sampai 1957 kami telah mengadjukan kepada Madjelis Umum PBB resolusi-resolusi jang lunak sekali, jang hanja meminta andjuran dari Madjelis Umum untuk mengadakan perundingan setjara damai antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Inipun ditolak oleh Tuan Luns, dengan dalil bahwa Irian Barat adalah urusan dalam negeri Belanda. Kemudian, pada tahun 1959 Belanda mengirim kapal induk Karel Doorman ke Indonesia disertai suatu keterangan chusus bahwa pengiriman itu bertudjuan menindas segi-segi tertentu dari politik agresif Indonesia terhadap Belanda. Ini, Tuan Ketua, adalah pengalaman kami dengan Belanda sedjak Perang Dunia kedua, selama masa de-kolonisasi ini.

Sesudah pengalaman-pengalaman ini, tidak seorangpun di Indonesia dan, saja harap, tidak seorangpun dalam Madjelis Umum jang mulia ini akan memandang sikap Belanda sebagai suatu kemurahan hati jang berlimpah-limpah. Saja kira Tuan Luns sendiri patut merasa malu atas pernjataannja tentang gedjala baru dalam politik de-kolonisasi Belanda jang tidak menaruh perhatian itu, djika dihadapkan dengan tindakan-tindakannja sendiri pada masa jang baru lalu. Saja akan kembali lagi kepada pokok ini nanti.

Kedua, djika J.M. Menteri Luar Negeri benar-benar begitu bermurah hati dan progresif dalam memadjukan ummat manusia, mengapa ia tidak mempraktekkan usulnja itu terhadap djadjahan Belanda Curaçao dan Suriname jang setiap saat menanti-nantikan pembebasannja dari perbudakan pendjadjahan ? Sebaliknja, ia menganggap usul ini hanja sesuai untuk dipergunakan chusus terhadap

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

wilajah suatu Negara jang berdaulat dan merdeka, atau paling sedikit terhadap suatu daerah sengketa.

Ketiga, djika Belanda bersikap bermurah hati dalam perdjuangan melawan pendjadjahan, mengapa mereka tidak menjokong perdjuangan rakjat Aldjazair dan Angola jang mengorbankan ribuan rakjatnja dalam perdjuangan jang gagah perkasa untuk kemerdekaan.

Dari tjontoh-tjontoh ini, dapat dilihat bahwa tak nampak sisa sedikitpun lagi dari kemurahan hati J.M. Menteri Luar Negeri Belanda.

Sekarang orang dapat bertanja mengapa Belanda tiba-tiba datang dengan usulnja tentang apa jang disebut „de-kolonisasi" sebagian wilajah Indonesia jang dengan kekerasan diduduki kembali oleh Belanda itu, malahan dengan tambahan daja penarik berupa kesediaan membajar sebanjak 30 djuta dollar setahun. Orang mungkin beranggapan bahwa ini merupakan konsesi jang besar sekali dari pihak Belanda. Tapi, Tuan Ketua, sekali lagi ini tak ada hubungan apa-apa dengan kemurahan hati. Kenjataan zaman sekarang ini achir kelaknja akan memaksa tuan Luns untuk mengachiri politik kolonialnja jang telah usang itu. Tapi, pun dalam hubungan ini, dibandingkan dengan Negara-negara kolonial jang lain, Belanda sudah ketinggalan kereta api dan masih sadja bertjokol didjadjahan-djadjahannja di Curaçao dan Suriname. Dan kenjataan apakah jang memaksa Tuan Luns berlagak bermurah hati itu ?

Pertama, tekanan pendapat umum dunia untuk menghapuskan kolonialisme dimana-mana, dalam segala bentuk dan pendjelmaannja, seperti dinjatakan oleh Resolusi 1514 Madjelis Umum (XV).

Kedua, bahaja bahwa Belanda akan dienjahkan dari Irian Barat oleh kekuatan-kekuatan anti kolonial di Indonesia sendiri.

Ja, Tuan Ketua, berbeda dengan beberapa tahun jang lalu, kekuatan-kekuatan anti-kolonial di Indonesia sekarang ini setjara fisik sanggup mengusir kolonialisme Belanda dari Irian Barat.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Memang, bagaimanapun perasaan kami tentang politik jang didjalankan oleh Jang Mulia Menteri Luar Negeri Belanda, itu namun beliau telah memberikan kami pengalaman jang berisi peladjaran, walaupun barangkali tidak sangat konstruktif. Jaitu, bahwa politik kolonial Belanda hanja dapat dihadapi dan diatasi dengan djalan pemakaian semua kekuatan nasional setjara total, politik ekonomis dan militer. Politik ini kami sebut politik konfrontasi total.

Sajang sekali, kami memang harus membelandjakan sebagian jang tjukup besar dari pendapatan nasional kami pembeli persendjataan, jang sebenarnja dapat digunakan untuk pembangunan nasional dan kesedjahteraan sosial rakjat Indonesia. Tetapi hanjalah melalui politik konfrontasi total ini Belanda mulai menginsjafi bahwa pendudukan mereka setjara illegal dan dengan kekuatan sendjata di Irian Barat dapat pula dihalaukan dengan kekuatan perlawanan Indonesia. Keinsjafan ini, bersama-sama dengan tekanan jang universil untuk de-kolonisasi, telah mentjiptakan suasana jang baik dalam pendapat umum di negeri Belanda untuk melepaskan kekuasaan mereka di Irian Barat.

Tuan Ketua, politik konfrontasi total kami ini oleh Pemerintah Belanda di-tjap sebagai politik paksaan. Tetapi ditindjau dari latar belakang sedjarah perdjuangan kemerdekaan Indonesia, saja harap mendjadi djelas bagi Madjelis Umum jang mulia ini, siapa sebenarnja jang telah menggunakan paksaan dan penindasan, jang dimungkinkan oleh karena kekuatan militer jang lebih unggul dari tahun 1945 sampai 1949. Siapa jang mempergunakan paksaan dan penindasan dalam menduduki kembali Irian Barat dengan kekuatan sendjata ? Siapa jang menggunakan siasat paksaan, penindasan dan intimidasi dalam mengirimkan kapal induk Karel Doorman ke-perairan Indonesia ? Apakah perlu saja teruskan ?

Tuan Ketua, kami dengan segala kerendahan hati, hanja mempersendjatai diri kami sendiri — kadang-kadang dengan kesengsaraan dan kelaparan — untuk mempertahankan kesatuan nasional kami terhadap serangan dan subversif kekuatan kolonial Belanda.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kami telah lebih dari tjukup membuktikan maksud damai kami dari tahun 1954 sampai 1957, ketika kami datang di PBB untuk meminta bantuan. Tetapi resolusi-resolusi kami meskipun disokong oleh sebagian jang terbesar, tidak dapat mentjapai ⅔ majorita suara jang diperlukan. Dengan begitu kami dibiarkan sendiri menghadapi paksaan dan subversi Kekuasaan kolonial. Apa jang harus kami perbuat? Takluk sadja kepada kewenangan politik luar negeri Belanda ? Kami tidak dapat dan tidak mau melakukan itu.

Sembilan puluh djuta rakjat Indonesia mempunjai kebanggaan nasionalnja dan perasaan akan harga dirinja. Mereka telah memproklamirkan kemerdekaannja pada tanggal 17 Agustus 1945, jang telah mereka pertahankan dalam suatu perdjuangan mati-matian. Djika perang anti-kolonial itu dihentikan pada achir tahun 1949, ini hanjalah karena kepertjajaan dan harapan kami pada waktu itu bahwa masalah dengan Belanda selandjutnja dapat diselesaikan dalam suasana kerdjasama dan dengan djalan damai. Kami telah senantiasa berharapan bahwa Belanda akan menerima pelepasan sisa daerah djadjahannja diwilajah Indonesia sebagai suatu kemadjuan dalam hubungan ummat manusia, dan tidak sebagai suatu kemunduran dalam kehidupan nasional mereka.

Dan sekali-kali kami tidak menduga semula bahwa masalah Irian Barat ini, bagian dari wilajah Indonesia jang baru sedikit sekali didjeladjah dan diusahakan, jang didiami hanja oleh 700.000 orang — akan menimbulkan suatu masalah jang demikian gawatnja, sehingga Indonesia akan menghadapi kemungkinan terpaksa mengangkat sendjata lagi untuk menjempurnakan kemerdekaan kami.

Saja tahu bahwa Madjelis jang mulia ini, sampai pada waktu ini, tidak selalu berada dalam suatu keadaan jang dapat mentjegah suatu Negara kolonial untuk menggunakan kekuatan militernja jang lebih unggul terhadap rakjat djadjahan atau bekas djadjahan. Sebaliknja saja mengharap dengan sungguh-sungguh bahwa Madjelis jang mulia ini tidak akan mentjapnja sebagai suatu paksaan, djika suatu

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

rakjat djadjahan atau bekas djadjahan terpaksa harus mengangkat sendjata terhadap kekuatan kolonial jang tjongkak dan agresif.

Tuan Ketua, kami sekarang telah mentjapai suatu taraf dimana Belanda — karena sebab-sebab jang telah saja sebutkan diatas — bersedia untuk melepaskan kekuasaan mereka di Irian Barat. Djika suasana politik jang menguntungkan jang telah membawa pada taraf ini, dipergunakan sebaik-baiknja, dan djika kedua belah fihak mempunjai keinginan ichlas untuk menjelesaikan pertikaian ini, saja kira suatu usul kompromi selalu dapat diketemukan antara kedua belah fihak. Tetapi, sajang bukan begitu halnja sekarang ini. Sebaliknja, Belanda malahan menggunakan suasana jang baik dewasa ini untuk mengenjampingkan Indonesia — jang mempunjai tuntutan-tuntutan jang sah — dan dengan demikian memperburuk hubungan antara kedua negara itu.

Tetapi walaupun andaikata Belanda tidak berkeinginan mengadakan persesuaian dengan Indonesia — dan kami merasakan keras sekali dugaan kami itu mengingat perasaan-perasaan Mr. Luns terhadap Indonesia jang sudah terkenal itu — bahkan tindakan-tindakan mereka dewasa ini di Irian Barat tidaklah seperti apa jang dikemukakan oleh tuan Luns dimadjelis ini.

Dengan timbulnja suasana jang baik dinegeri Belanda untuk melepaskan kekuasaan di Irian-Barat, dengan tiba-tiba sadja bertambah besarlah djumlah rakjat Irian Barat jang diusir dari kampung halamannja. Dalam perdebatan umum baru-baru ini saja pernah mengatakan bahwa djumlah pengungsi rata-rata ada seratus orang setiap bulan.

Djumlah ini, Tuan Ketua, perlu saja koreksi. Dalam perdjalanan saja pulang ke Djakarta bulan Oktober jang lalu saja singgah di Singapura dan disana saja berdjumpa dengan sebelas ratus pengungsi jang dikirimkan dengan kapal dari Irian Barat ke Djakarta. Sekarang ada sebuah kapal lagi, memuat seribu orang lebih, jang sedang dalam perdjalanan ke Djakarta. Kampanje anti Indonesia di Irian Barat,

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

dengan tjara pemeriksaan dari rumah-kerumah, makin hari makin meluas. Hal ini disertai dengan penindasan fisik terhadap mereka jang berani mengeluarkan suara ingin bersatu dengan Republik. Pembesar-pembesar Belanda sudah mulai menaikkan apa jang disebutnja bendera nasional Irian Barat dan memperkenalkan pa jang disebutnja lagu kebangsaan dalam usaha buatan mereka untuk mentjipta lambang-lambang suatu negara Irian Barat jang merdeka. Mereka menukar bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda untuk didjadikan *lingua-franca* di Irian Barat.

Ini semua adalah fakta-fakta njata jang samasekali bertentangan dengan kata-kata lemah-lembut dan ingin damai dari jang mulia Menteri Luar Negeri Belanda, bahwa rakjat Irian Barat bebas untuk menggabungkan diri dengan Indonesia.

Pada hemat kami djika rakjat Irian Barat dibolehkan memilih setjara bebas, maka setidak-tidaknja kampanje anti Indonesia di Irian Barat, pengusiran beribu-ribu rakjat dari Irian Barat, penindasan terhadap rakjat jang ingin menjatukan dirinja dengan Republik Indonesia, hendaknja segera dihentikan. Sudah tentu diperkenalkannja — atau lebih tepat lagi kalau saja katakan pemaksaan — pemakaian apa jang disebut bendera nasional dan apa jang disebut lagu kebangsaan untuk Irian Barat adalah semata-mata dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil apa jang disebut pemilihan setjara bebas kearah suatu tudjuan jang sangat djelas.

Tuan Ketua, baiklah saja tekankan lagi, bahwa djika Belanda berkeinginan mentjari persesuaian dengan Indonesia, djika Belanda berkeinginan menjelesaikan pertikaian mereka dengan Indonesia. Saja akui terlebih dahulu bahwa penjesuaian sematjam itu haruslah merupakan suatu kompromi antara pandangan-pandangan kedua belah pihak. Dapat saja katakan terlebih dahulu bahwa persesuaian demikian itu tidak akan didasarkan seratus persen atas tuntutan-tuntutan Indonesia, dan tidak pula seratus persen atas tuntutan-tuntutan Belanda. Saja tidak melihat alasan, djika kedua belah pihak mengupas masalah

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ini dengan sungguh-sungguh, mengapa tidak bisa ditjapai suatu rumusan terhadap persoalan-persoalan penentuan diri sendiri dan kekuasaan P.B.B.

Tetapi kini apakah jang terdjadi? Menteri Luar Negeri Belanda sama sekali mengenjampingkan adanja Indonesia didalam pernjataannja jang pertama dalam perdebatan umum. Ia mengenjampingkan sama sekali adanja Republik Indonesia dalam rentjana resolusi jang diadjukan oleh Delegasi Belanda. Kemarin kami dapat menghargai sikap hormatnja ketika ia menjebutkan Indonesia sebagai suatu bangsa jang mungkin djuga menaruh perhatian terhadap masalah Irian Barat. Akan tetapi, melihat tindakan-tindakan Belanda di Irian Barat, saja sangsikan apakah menjebut Indonesia setjara sepintas lalu dan terlambat itu memang tulus ichlas, atau hanja suatu usaha untuk menundjukkan suatu tingkat kewadjarannja dimuka forum internasional ini dengan maksud untuk memenangkan suara.

Kami sangka Pemerintah Belanda akan menggunakan suasana politik jang baik dinegeri Belanda itu untuk menjelidiki reaksi-reaksi apa jang mungkin timbul di Indonesia. Kalau hal ini tidak bisa dilakukannja setjara langsung, tentulah bisa ditemukan bangsa mana sadja untuk melakukan penjelidikan-penjelidikan pertama. Dalam hal ini jang mulia Menteri Luar Negeri Belanda menemukan hélatnja dan saja kutip dari pernjataannja: „Indonesia telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Ia malah bertindak sampai sedemikian djauhnja hingga menolak untuk menerima prosedur jang normal dalam hal-hal demikian jakni bahwa negara ketiga harus diizinkan mewakili Belanda di Indonesia" — tanda kutip.

Memang benar, Tuan Ketua, bahwa kami telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan beberapa bulan kemudian, setelah Belanda berusaha mengadakan intimidasi dengan menerobos-kan kapal induk Karel Doorman kedalam perairan teritorial Indonesia, kami mengambil keputusan bahwa sudah tibalah waktunja untuk menghapuskan semua sisa-sisa hubungan dengan Belanda.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Di Indonesia semangat sudah demikian memuntjaknja sehingga sudah mendjadi suatu tuntutan nasional bahwa kami menjiapkan diri untuk mengadakan perhitungan jang terachir dengan Belanda dalam mempertahankan keutuhan nasional kami. Tampaknja Belanda tidak akan henti-hentinja mengganggu Indonesia, mengadakan subversi terhadap Indonesia, mentjoba menghina Indonesia, selama mereka merasa dirinja lebih unggul dari Indonesia dilapangan militer.

Perang kolonial dari tahun 1945 sampai 1949 tampaknja belum tjukup lama bagi Belanda. Pentjiptaan gerakan separatis jang mentjapai puntjaknja dengan diproklamirkannja Republik Maluku Selatan, tampaknja djuga bukanlah perbuatan jang terachir dalam sikap permusuhnja terhadap Indonesia. Sekarang ini mereka bersiap-siap hendak mewudjudkan babak terachir dalam drama Indonesia-Belanda ini dengan pemisahan Irian Barat dari bagian-bagian lain dari Indonesia.

Pada taraf perdebatan sekarang ini, saja tidak bermaksud untuk membahas setjara terperintji rentjana resolusi jang dimadjukan oleh Belanda. Tetapi demi untuk mendjelaskan persoalan-persoalan bagi anggauta-anggauta delegasi jang terhormat jang tidak menghadiri sidang-sidang dalam tahun 1954 sampai 1957, izinkanlah saja menerangkan beberapa fakta.

Pertama, Indonesia tidaklah meng-claim daerah orang lain. Rakjat Indonesia sebagai keseluruhan akan merasa malu djika perdjuangan kami melawan kolonialisme akan merosot mendjadi expansionisme dan mengakibatkan pendjadjahan terhadap rakjat lain. Rakjat Indonesia dibawah pimpinan Presiden Sukarno tidaklah hanja berdjuang untuk kemerdekaan nasionalnja sendiri, tetapi dengan segala kerendahan hati dapat saja katakan bahwa rakjat Indonesia telah djuga senantiasa menjumbangkan bagiannja dalam perdjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa lain di Asia dan Afrika.

Irian Barat, atau jang disebut mereka Niew-Guinea (Barat), adalah bagian dari Hindia Belanda dahulu. Ini adalah satu kenjataan sedjarah. Nama „Hindia Belanda" dalam tahun 1948 setjara konstitu-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

tionil telah dirobah oleh Pemerintah Belanda sendiri mendjadi „Indonesia" dalam Undang-Undang Dasar Keradjaan Belanda.

Tjukup banjak kutipan-kutipan dari pernjataan-pernjataan resmi Belanda dapat dikemukakan untuk menegaskan fakta-fakta bahwa Irian Barat itu bukan sadja merupakan bagian dari Indonesia, tetapi djuga bahwa tidak ada persoalan untuk memisahkan „residensi" administratif Irian Barat dari Negara Indonesia, selama perundingan-perundingan jang diadakan antara Indonesia dan Belanda jang menudju penjelesaian setjara damai itu. Umpamanja sadja, dalam laporannja kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Indonesia di tahun 1948|1949, Pemerintah Belanda menjatakan: „Indonesia terdiri dari sekumpulan pulau-pulau didaerah Chattulistiwa, jang merentang mulai dari dataran benua Asia sampai Australia. Kumpulan jang terpenting adalah Kepulauan Sunda Besar (Djawa, Madura, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dengan gugusan pulau-pulau jang termasuk didalamnja), Kepulauan Sunda Ketjil (Bali, Lombok Sumbawa, Flores, Timur, Sumba, Roti dan pulau-pulau ketjil lainnja). Maluku dan *Nieuw Guinea sebelah Barat* dari 141 deradjat lintang Timur".

Dr. H.J. van Mook, jang ketika itu mendjabat Letnan Gubernur Djenderal Indonesia, dalam suatu konperensi jang diselenggarakan Belanda di Den Pasar (Bali) dalam 1946 mengenai pembentukan dari negara-bagian „Indonesia Timur", menjatakan dengan tegas bahwa „adalah pasti tidak terkandung maksud dari Pemerintah (Belanda) untuk memisahkan Irian Barat dari Indonesia".

Dengan demikian, maka tidak ada sedikitpun keraguan antara semua golongan bahwa keseluruhan Indonesia, — jakni termasuk Irian Barat — akan merupakan wilajah negara Republik Indonesia jang baru merdeka, jang memang adalah wadjar dan masuk-akal. Dalam menegaskan perdjandjian ini, Dr. van Royen, wakil resmi Pemerintah Belanda dalam Dewan Keamanan P.B.B., menjatakan dalam Sidang tanggal 22 Desember 1948 Badan tersebut tentang soal kemerdekaan Indonesia sebagai berikut :

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

„Seperti telah saja terangkan pada permulaan, sengketa ini *bukan* tentang persoalan apakah Indonesia akan mendjadi merdeka atau tidak. *Semua pihak setudju bahwa apa jang dahulu dinamakan Hindia Belanda harus mendjadi satu negara merdeka setjepat mungkin*".

Ini memang mendjadi dasar jang telah disetudjui untuk mengachiri perang kolonial dan pengakuan lahirnja suatu bangsa jang baru: Indonesia (jang mentjakup *seluruh* daerah jang dulu disebut Hindia Belanda).

Kesatuan Indonesia, kesatuan daripada seluruh rakjatnja, tak peduli perbedaan-perbedaan antar-suku dan rasialnja, demikian sedjak dulu telah diakui, djuga oleh Pemerintah Belanda. Dalam laporan resminja tentang Indonesia kepada P.B.B. dalam tahun 1948, Pemerintah Belanda menjatakan:

„Dari sudut suku, penduduk asli (Indonesia) dapat dibagi atas orang-orang Melaju dibagian Barat dan orang-orang Irian di Timur. Karena suku-suku ini telah bertjampur setjara luas sekali, mereka tak dapat dipisahkan lagi dengan batas-batas jang pasti".

Kemudian dalam bulan Desember 1948, Dr. van Royen, wakil Belanda dalam Dewan Keamanan, menerangkan lebih landjut bahwa:

„..... penduduk Indonesia terdiri atas kira-kira tudjuhbelas kelompok etnologis dan bahasa jang terbagi-bagi lagi dalam banjak golongan ketjil ..... *Hidup bersama* dibawah Mahkota Belanda telah mentjiptakan kesadaran *Kebangsaan Indonesia* dan keinginan akan suatu Negara Indonesia".

Semua fakta sedjarah ini diketahui oleh kebanjakan anggauta Madjelis ini dan kemarin wakil jang terhormat dari Saudi Arabia telah menerangkan lagi fakta-fakta ini dengan djelas dan mejakinkan.

Sebenarnja, Tuan Ketua, berbitjara tentang penggolongan etnologis di Asia Tenggara sebagai keseluruhan, ada djuga golongan jang lebih besar dari bangsa Melanesia dibagian Barat dan bangsa Poline-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

sia dibagian Timur. Pembitjaraan tentang penggolongan rasial ini tentu sadja tak ada hubungannja dengan persoalan tentang kemerdekaan Indonesia ini. Jang penting ialah bahwa rakjat Indonesia — baik dari bagian Timur maupun dari Barat, ja, malahan dari bagian manapun tak peduli perbedaan-perbedaan kesukuan apa jang ada, — *telah* sedjak berabad-abad merupakan suatu kesatuan nasional dan suatu kebangsaan Indonesia, seperti telah dibenarkan oleh orang-orang Belanda sendiri.

Lagi pula, saja kira penduduk dari hampir-hampir setiap negara terdiri dari suku-suku jang berbeda dan, sebenarnja, beberapa golongan kesukuan jang sangat berbeda atjapkali tampak. Tak ada sesuatupun jang mengedjutkan tentang hal ini — ini adalah keadaan jang biasa.

Karena itu, Belanda telah berlaku tjurang dengan mentjoba mempergunakan perbedaan-perbedaan etnologis untuk mentjapai tudjuan politik mereka terhadap Indonesia. Mereka mengatakan bahwa rakjat di Irian Barat termasuk type „Negrito"; dan karena itu, ada hubungannja dengan suku-suku di Afrika, dan karena itu pula, mereka harus mendapatkan kemerdekaannja sendiri. Ini bukan hanja suatu pernjataan jang salah, akan tetapi sangat menjesatkan, kalau tidak suatu penipuan. Pertama, apa jang dinamakan orang-orang Indonesia „Negrito" itu terdapat tidak hanja di Irian Barat, tetapi diseluruh bagian Timur Indonesia — jang disebut Maluku — dan malahan djuga di tempat-tempat jang terpentjil di Sumatera dan Djawa. Seperti apa jang dikatakan oleh pernjataan resmi Belanda, jang telah saja kutip. „karena suku-suku (di Indonesia) ini telah bertjampur setjara luas sekali. mereka tak dapat dipisahkan lagi dengan batas-batas jang pasti". Karena itu saja tidak berpendapat, Tuan Ketua, bahwa dalil-dalil jang busuk dan murah dari propaganda Belanda ini akan berhasil menipu siapapun djuga.

Bila seseorang ingin mengemukakan dalil-dalil rasial, hendaknja ditjatat bahwa dipandang dari sudut rasial orang-orang Indonesia

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

sangat rapat hubungannja dengan rakjat Malaya dan Pilipina. Rakjat Malaya dan Indonesia malahan mempergunakan bahasa jang sama. Akan tetapi, saja berani mendjamin, bahwa kami tak mempunjai gugatan territorial apapun terhadap Malaya ataupun Pilipina. Mereka adalah negara-negara jang merdeka dan berdaulat, dan kami bergembira atas hal ini. Malahan dalam hal pulau Kalimantan jang besar itu, jang bagian Utaranja adalah wilajah Inggris, dan djuga dalam hal separuh daripada pulau Timor jang kepunjaan Portugal, kami tak mempunjai gugatan territorial apapun. Karena apa jang kami anggap wilajah Indonesia ialah tidak lain hanja keseluruhan wilajah koloni Hindia Belanda dulu. Karena itu kamipun tidak mempunjai gugatan terhadap pulau Irian bagian Timur, jang dikuasai oleh Australia.

Irian Barat, sebagai bagian dari Hindia Belanda dahulu, tentu sadja adalah wilajah Indonesia. Menamakan hak kami atas Irian Barat sebagai suatu claim teritorial memang merupakan suatu pemutar-balikkan fakta dan sedjarah jang disengadja, dimaksudkan untuk mengeruhkan persoalannja dan membenarkan pendudukan kolonial jang tidak dapat dibenarkan atas wilajah Indonesia itu oleh Belanda.

Tuan Luns telah menjatakan dengan lantangnja hak menentukan nasib sendiri untuk rakjat Irian Barat. Akan tetapi suara-suara jang lantang tak dapat merobah kenjataan-kenjataan sedjarah. Ia mentjoba menjelimuti kenjataan bahwa rakjat Irian Barat telah mempergunakan hak menentukan nasib sendiri mereka — tidak sebagai suatu golongan etnis seperti jang dikehendaki oleh Tuan Luns, — tetapi sebagai sebagian dari bangsa Indonesia jang 70 djuta itu dalam tahun 1945.

Tuan Luns djuga membajangkan seolah-olah rakjat Irian Barat tak pernah berdjuang atau ikut dalam perdjuangan melawan kolonialisme Belanda di Indonesia. Marilah kita lihat kenjataan-kenjataannja. Dalam masa kolonial Belanda, di Irian Barat-lah Belanda mendirikan kamp konsentrasi jang terkenal itu, "Boven Digul", dimana pemimpin-pemimpin politik diasingkan. Ribuan pedjuang kemerde-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

kaan hidup dalam pembuangan dan kesengsaraan didalam kamp konsentrasi itu, dan ratusan mati karena sakit dan karena perlakuan buruk. Djadi, Irian Barat telah dilumuri dengan darah banjak pedjuang-pedjuang kemerdekaan Indonesia. Rakjat di Irian Barat tahu benar-benar apa arti perdjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dan erat hubungan mereka dengan perdjuangan ini.

Maka tatkala kemerdekaan Indonesia di Proklamasikan ditahun 1945, rakjat di Irian Barat dengan segera dan aktif ikut mengambil bagian dalam mempertahankan Republik. Partai-partai politik setempat segera didirikan, dipimpin oleh orang-orang Irian Barat sendiri, seperti P.K.I.I., Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, jang dipimpin oleh Silas Papare. Tetapi ketika angkatan perang Belanda menduduki kembali Irian Barat kebebasan politik ditekan dan pemimpin-pemimpin partai-partai politik dipendjarakan atau diusir dari wilajah tersebut.

Rakjat di Irian Barat tidak pernah ingin dipisahkan dari Indonesia. Ketika Konperensi jang diselenggarakan oleh Belanda di Den Pasar, Bali, akan dibuka pada tahun 1946, pemimpin-pemimpin politik jang masih tinggal di Irian Barat mengirimkan suatu pesanan kepada penguasa-penguasa Belanda pada tanggal 12 Desember 1946 jang menuntut:

a. bahwa Irian Barat djangan dikeluarkan dari Federasi Indonesia dan agar tetap merupakan bagian dari Indonesia.

b. agar suatu golongan jang representatif dari Irian Barat diperbolehkan datang ikut serta dalam Konperensi Den Pasar.

c. bahwa Irian Barat tidak akan didjadjah lagi.

Pesan ini, Tuan Ketua, ditanda-tangani oleh orang-orang di Irian Barat jang namanja sebagai berikut: C.M. Kre, M. Indey dan N. Jouwe.

Tetapi penguasa-penguasa Belanda tidak memperbolehkan seorangpun wakil rakjat di Irian Barat untuk menghadiri Konperensi

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ini. Inilah apa jang dimaksudkan oleh Pemerintah Belanda dengan hak menentukan nasib sendiri bagi rakjat Irian Barat.

Malahan sebenarnja, Tuan Jouwe jang tersebut tadi, sekarang adalah satu dari ketiga orang Irian Barat (Belanda menamakan mereka orang-orang Papua) jang dibawa oleh delegasi Belanda kesidang Madjelis Umum ini.

Boleh saja katakan disini bahwa kami sangat senang bahwa delegasi Belanda telah membawa beberapa orang dari Irian Barat ke Madjelis ini, dan kami harap bahwa, karena pada delegasi kami djuga ada orang-orang dari Irian Barat, orang-orang ini diperbolehkan untuk berbitjara satu sama lain, duduk bersama-sama dan berdjalan-djalan bersama-sama. Kami harap agar Delegasi Belanda akan memberikan kebebasan penuh kepada orang-orang Irian Barat ini untuk bertemu dengan orang-orang Irian Barat jang lain di New York ini, tanpa dimata-matai, tanpa diawasi oleh seorang Belanda. Saja mengatakan hal ini karena, sajang sekali, ketika orang-orang Irian Barat itu setjara kebetulan bertemu disuatu rumah makan dan mereka mulai bertjakap-tjakap setjara sahabat, si-pengawas atau si-pendjaga Belanda dengan segera membajar rekening makanan bahkan tanpa mengidjinkan orang-orang Irian Barat dari delegasi Belanda itu menjelesaikan makan; mereka tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa mereka sendiri, walaupun mereka berasal dari desa-desa jang sama. Bagi kami sendiri, kami memperbolehkan orang-orang Irian Barat dari delegasi Belanda untuk berbitjara dengan orang-orang Irian Barat pada delegasi kami. Kami akan memperbolehkan orang-orang Irian Barat dari delegasi Belanda untuk mentjoba mejakinkan orang-orang Irian Barat pada delegasi kami bahwa mereka harus mendjadi suatu bangsa jang merdeka atau mendjadi bagian Belanda. Kami harap semoga ada kebebasan bergerak dan kebebasan berhubungan antara orang-orang Irian Barat dari kedua delegasi, teristimewa karena mereka berasal dari desa-desa jang sama.

Tuan Ketua, saja dapat mengemukakan banjak tjontoh-tjontoh lagi dari pernjataan-pernjataan pendapat di Irian Barat berkenaan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

dengan keinginannja untuk tetap bersatu dengan Republik Indonesia, berbeda dengan usaha-usaha sembunji Belanda pada waktu itupun untuk mentjoba mempertahankan pendjadjahannja untuk selama-lamanja atas Irian Barat, terutama mendjelang waktu akan diadakannja Konperensi Medja Bundar di Den Haag pada masa pertengahan kedua tahun 1949. Djika perlu, saja akan membeberkan semua fakta-fakta itu.

Pemimpin-pemimpin jang pada masa-masa lampau dan baru-baru ini telah dipendjarakan di Irian Barat, termasuk mereka jang telah dibuang ke-kamp konsentrasi "Boven Digul" jang sekarang masih ada, djuga dapat mengemukakan banjak hal jang menjangkal keterangan Tuan Luns, bahwa rakjat di Irian Barat tidak menjatakan keinginannja untuk merdeka. Ini sesungguhnja suatu penghinaan terhadap ketjerdasan dan martabat bangsa kami di Irian Barat, jang tidak dapat kami terima.

Akan tetapi, tidaklah mengherankan untuk mendengarkan pernjataan-pernjataan sematjam itu dari djurubitjara Pemerintah kolonial Belanda. Mereka tidak pernah mau menerima kenjataan bahwa, bahkan rakjat jang mereka anggap terbelakang dan biadab itu dapat menjatakan keinginannja untuk merdeka. Sahabat-sahabat saja dari Asia dan Afrika, saja rasa, tidak asing lagi, seperti halnja dengan kami, terhadap pernjataan-pernjataan sematjam itu dari pemerintah-pemerintah kolonial.

Berdasarkan alasan-alasan ini, Tuan Ketua, kami harus menolak tanpa keraguan sedikitpun, rentjana usul Belanda seperti sekarang ini. Bukannja mentjari rumusan kompromi, malahan kami melihat J.M. Menteri Luar Negeri Belanda sebaliknja berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan suasana jang baik dinegaranja itu untuk merampungkan sikap permusuhannja terhadap Indonesia, dibawah kedok sidermawan jang bermurah hati memberi kemerdekaan kepada rakjat-rakjat djadjahan, dengan memisahkan wilajah Irian Barat dari bagian-bagian lain Indonesia.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Tiba-tiba, Menteri Luar Negeri Belanda menjatakan dengan chidmatnja bahwa Belanda mempunjai tugas sutji untuk menganugerahkan kedaulatan kepada rakjat setempat di Irian Barat, dan bahwa itu akan dilaksanakan tanpa ragu-ragu lagi. Kami, jang baru sadja mentjapai kemerdekaan kami, mengetahui betul mythos tugas sutji dari kekuasaan-kekuasaan kolonial ini. Akibat dari tugas sutji Belanda di Indonesia ini, selama 300 tahun pemerintahan kolonial berkuasa dibekas Keradjaan-keradjaan Sriwidjaja dan Madjapahit jang mahabesar dan makmur itu, diwaktu Belanda meninggalkan Indonesia hanja ada 500 orang tenaga dokter, 200 ahli hukum dan 50 orang insinjur untuk penduduk jang berdjumlah 70 djuta.

Betapa berbedanja keadaan sekarang dibawah pemerintah nasional sendiri. Sebelum perang, ada kira-kira ¾ djuta orang murid sekolah rakjat — sekarang djumlah itu telah naik mendjadi kira-kira 11 djuta orang. Kami mempunjai 11 universitas dengan lebih dari 50.000 orang mahasiswa dibandingkan dengan hanja 200 mahasiswa Indonesia jang beladjar pada sekolah-sekolah tinggi dimasa sebelum perang. Dan sekarang, apakah jang telah diusahakan oleh Belanda untuk rakjat Irian Barat? Selama 10 tahun belakangan ini menghasilkan tidak lebih dari 3 orang mahasiswa, sedangkan diantara rakjat Irian Barat jang melarikan diri kewilajah kami sudah ada lebih dari 12 orang mahasiswa.

Perbedaan dalam kesempatan ini untuk memperkembangkan kemanusiaan dan martabat merupakan perbedaan jang hakiki dan menentukan antara suatu masjarakat nasional jang merdeka dan suatu masjarakat kolonial. Inilah jang mendorong dan memperkuat lagi tekad kami untuk memerdekakan rakjat Irian Barat dari ketidak-adilan ini, dari tragedi manusia ini.

Bagi Indonesia sedikit-dikitnja satu hal adalah djelas: djika Belanda mewudjudkan djuga pemisahan Irian Barat, djika mereka memproklamirkan kemerdekaan daerah itu seperti halnja dengan proklamasi Republik Maluku Selatan, maka kami akan terpaksa memper-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

gunakan segala upaja jang ada pada kami untuk menghantjurkan proklamasi demikian itu, sekalipun hal ini akan berarti perang dengan Belanda.

Jang akan bertanggung djawab seluruhnja bila keadaan sedemikian terdjadi adalah hanja Belanda sendiri. Setiap bangsa akan bertindak sama seperti Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagian dari wilajah nasionalnja atas hasutan suatu negara asing harus ditentang dengan kekuatan.

Usaha sematjam inilah, jaitu untuk menjalahgunakan Resolusi 1514 Madjelis Umum (XV), jang menimbulkan kekatjauan dewasa ini di Asia dan Afrika. Segera djika timbul pertentangan antara berbagai golongan masjarakat, maka negara-negara asing, terutama bekas negara-negara pendjadjah, selalu berusaha melantjarkan gerakan-gerakan separatis.

Terus terang sadja, tidaklah sulit untuk mentjiptakan atau melantjarkan gerakan-gerakan separatis setelah pendudukan dengan kekerasan berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Ini bukanlah satu gedjala jang terbatas pada negara-negara Asia dan Afrika sadja. Kita telah melihat hal ini terdjadi didaerah Eropah waktu dikuduki oleh Nazi, dalam rangka politik divide et impera.

Saja mengenal benar negeri Belanda, dan djika seandainja Indonesia diberi kesempatan untuk menduduki negeri Belanda untuk masa sepuluh tahun, saja dapat memberi djaminan kepada Madjelis ini bahwa tidaklah sulit bagi kami untuk mendjelmakan tiga negara merdeka dari kesatuan wilajah negara Belanda sekarang, dengan djalan mempergunakan muslihat dari dan dengan menjalah-gunakan Resolusi 1514 Madjelis Umum (XV).

Malah pada saat sekarangpun ada terdapat aliran-aliran dinegara-negara Eropah untuk menarik diri, untuk memisahkan diri dari kesatuan nasionalnja. Pada umumnja perselisihan-perselisihan ini tidak disalah-gunakan oleh kekuatan-kekuatan asing. Maka, da-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

lam hubungan ini, adalah suatu kedjahatan dan sesuatu jang patut ditjela bahwa Negara-negara kolonial sekarang menjalah-gunakan Resolusi 1514 Madjelis Umum (XV) ini hanja dalam pertaliannja dengan bangsa-bangsa Asia dan Afrika.

Bangsa-bangsa ini, Tuan Ketua, sudah tjukup banjak menghadapi kesulitan-kesulitan dalam usaha pembangunan kembali serta pemulihan negara-negaranja. Djika, disamping itu, mereka terpaksa menghadapi suatu politik separatisme jang didjalankan oleh Negara negara kolonial, maka kesulitan-kesulitannja itu akan mentjapai tingkat jang tak bisa dikuasainja.

Kami, di Indonesia, bertekad untuk menghadapi tantangan ini dengan djalan damai jang lebih kami sukai, melalui hubungan-hubungan langsung atau perantaraan langsung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Djika ini tidak mungkin, saja mengharapkan Madjelis ini tidak akan mentjabut hak daerah-daerah djadjahan dan bekas daerah-daerah djadjahan untuk mempergunakan segala upaja jang ada padanja guna menjempurnakan kemerdekaannja.

Dalam hubungan ini, saja tidak akan mengemis sesuatu politik murah-hati dari pihak Belanda, jang sampai sekarang memang tidak pernah memperlihatkan sikap bermurah-hati kepada Indonesia. Sebaliknja, politik mereka senantiasa didasarkan atas pandangan jang sempit dan kelitjikan jang telah mengakibatkan korban setengah djuta djiwa rakjat Indonesia dan penderitaan bagi seluruh bangsa Indonesia sedjak tahun 1945 hingga sampai sekarang.

Jang sungguh ingin saja lakukan ialah berseru kepada pikiran sehat mereka, sekalipun hal itu adalah untuk kepentingan nasionalnja sendiri. Djanganlah mereka meneruskan rasa bentjinja terhadap Indonesia sampai terlalu djauh.

Kami mempunjai rasa kebanggaan nasional sendiri. Dan memang pada kami ada daja-upaja, lebih banjak daripada ditahun 1945, untuk membendung politik agresif dan propokatif Belanda.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Sebagai penutup, Tuan Ketua, saja ingin pula menjerukan kepada anggota-anggota Madjelis ini sekalian, terutama anggota-anggota dari negara-negara Asia dan Afrika, jang seperti Indonesia baru sadja bangkit kembali sebagai negara jang merdeka dan berdaulat. Indonesia sudah terkenal sebagai penjokong jang tegas dari setiap perdjuangan kemerdekaan dimanapun didunia, — kadang-kadang malah atas kerugian kepentingan-kepentingan nasional kami jang langsung. Dengan segala kerendahan hati dapat kami katakan bahwa kami telah memberikan sumbangan kami dalam perdjuangan untuk mengachiri kolonialisme. Perdjuangan kemerdekaan di Asia telah memberi pengaruh terhadap serta memberi sokongan kepada kekuatan-kekuatan anti-kolonial di Afrika. Sebaliknja, perdjuangan jang gigih serta perkasa dari bangsa-bangsa serta pemimpin-pemimpin Afrika untuk mentjapai kemerdekaan nasionalnja merupakan sekutu jang besar guna melenjapkan kolonialisme untuk selama-lamanja, baik di Asia maupun di Afrika.

Dalam perdjuangan bersama terhadap kolonialisme ini, kita tidak pernah terpetjah-belah dimasa lampau dan tidak akan terpetjah-belah dimasa depan. Hanja dengan perasaan dan tekad persatuan inilah kita akan memperoleh kemadjuan dalam tugas jang mendahsjatkan untuk pembangunan dan pemulihan serta konsolidasi bangsa kita. Perbedaan-perbedaan apapun jang terdapat pada pandangan politik kita dibidang dalam-negeri ataupun dibidang internasional, djanganlah kita sampai djatuh kedalam perangkap politik divide et impera negara-negara kolonial. Baik setelah mentjapai kemerdekaan sekalipun, kita masih harus menghadapi usaha-usaha jang berbahaja berupa penetrasi dan subversi dari luar, baik dengan kedok politik, ekonomi ataupun dengan kedok militer. Semuanja ini hanja dapat diatasi bila politik divide et impera kolonial dapat dibendung setjara efektif.

Madjelis ini, sebagai keseluruhan, mempunjai tanggung djawab besar atas masalah Irian Barat. Masalah itu bukanlah suatu masalah

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

dekolonisasi sebagaimana hendak dibajangkan oleh Belanda, tapi terutama sekali, masalah Irian Barat adalah masalah pertikaian antara dua negara jang berdaulat, jaitu Indonesia dan negeri Belanda.

Djika sekiranja Madjelis ini menerima rentjana-resolusi Belanda, jang berarti meng-legalisir pemakaian kekerasan oleh Negara kolonial untuk menduduki kembali sebagian dari wilajah Indonesia, maka itu djuga berarti meng-legalisir hak Indonesia untuk mengusir Belanda dengan kekerasan dari Irian Barat — djadi perang antara dua negara jang berdaulat. Ini bukanlah suatu antjaman; ini bukanlah suatu gemerentjingan pedang. Ini adalah kenjataan-kenjataan jang djelas serta akibat-akibat jang dapat timbul daripadanja.

Bangsa Indonesia sudah djemu akan peperangan. Bangsa Indonesia masih menderita akibat-akibat dari perang kolonial. Tidak adalah jang lebih kami tjintai daripada hidup dan bekerdja dalam suasana damai. Tapi djika dipaksakan kepada kami, djika kami tidak diberi kemungkinan lain daripada melandjutkan perang kolonial untuk menjempurnakan kemerdekaan kami, maka kami tidak akan mundur dari pertanggungan djawab tersebut.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNJATAAN

DR SUBANDRIO

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAN

KETUA DELEGASI INDONESIA

KE MADJELIS UMUM KE-XVI P.B.B.

---

20 NOPEMBER 1961.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Tuan Ketua,

Saja telah minta bitjara lagi dalam perdebatan ini, setelah pernjataan jang diutjapkan oleh wakil Belanda pada tanggal 15 Nopember, untuk memberikan penerangan tambahan jang lebih lengkap, agar supaja para wakil jang terhormat dalam Madjelis ini dapat memperoleh penilaian jang tepat mengenai masalah Irian Barat ini.

Memenuhi permintaan Tuan, Tuan Ketua, saja telah sangat mempersingkat pidato jang saja akan batjakan ini. Sebaliknja, saja merasa terpaksa untuk berbitjara lagi disebabkan karena gawatnja masalah.Persoalan Irian Barat adalah bagian dari masalah kolonial Indonesia. Untuk bagian terbesar, Indonesia telah mentjapai status kemerdekaan. Status kemerdekaan ini telah kami menangkan dengan pahit getir, melalui peperangan kolonial dan dengan banjak pengorbanan manusia.

Keduanja, persoalan Irian Barat merupakan salah satu sumber pertikaian Belanda-Indonesia, disamping banjak sumber lainnja, jang selalu telah disalah-gunakan oleh Belanda untuk mempersulit kedudukan Indonesia, didalam dan diluar negeri.

Seperti telah saja katakan, bahkan setelah pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia, Belanda tidak pernah menjesuaikan dirinja untuk merobah hubungan-hubungan kolonial-lama mendjadi hubungan-hubungan kerdjasama jang lebih menguntungkan dan ikatan-ikatan persaudaraan jang kekal demi kepentingan-bersama.

Saja tidak berniat mengulangi segi masalah Irian Barat ini, apabila wakil Belanda tidak mengambil posisi jang bertentangan dan membahas soal Irian Barat seakan-akan tak ada hubungannja dengan masalah kolonial Indonesia. Untuk memperkuat kedudukannja wakil

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Belanda jang terhormat telah menggunakan beberapa pasal dari tjatatan-tjatatan mengenai latar belakang Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, jang telah diterima segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Singkatnja, wakil Belanda jang terhormat berusaha menimbulkan kesan, bahwa Dr Hatta menjetudjui tidak dimasukkannja Irian Barat kedalam wilajah Indonesia kelak, sedang disamping itu menggambarkan Presiden Sukarno seakan-akan didorong oleh ambisi ekspansionis.

Pertama-tama saja sangat sesalkan, bahwa masalah jang sedemikian gawat ini — suatu masalah jang bahkan dapat memuntjak mendjadi sengketa fisik dibagian dunia itu djika tidak diselenggarakan dengan kesungguhan, kedjudjuran dan diplomasi jang wadjar — telah diperlakukan demikian sembrono dan sambil-lalu oleh wakil Belanda, seolah-olah masalah Irian Barat ini hanja merupakan permainan kata sadja, seolah-olah masalah gawat ini hanja permainan belaka, suatu pameran adu-ketjerdikan.

Barangkali wakil Belanda jang terhormat telah demikian kehabisan dalil-dalil jang sungguh-sungguh dan wadjar dalam mempertahankan perkara Belanda, sehingga ia menganggap adalah pada tempatnja untuk mengutip tjatatan-tjatatan mengenai perundingan-perundingan pribadi antara pemimpin-pemimpin Indonesia pada saat-saat kagelisahan dan kekatjauan sebelum Perang Dunia II berachir.

Sudah barang tentu pembitjaraan-pembitjaraan pribadi ini harus dianalisa dan diartikan sebagai pendapat-pendapat pribadi dari beberapa pemimpin mengenai masalah tertentu. Menggunakan bagian-bagian dari pembitjaraan pribadi ini sebagai dalil melawan politik Indonesia, jang sedjak permulaan Republik, dengan resmi telah dirantjangkan, ditetapkan dan kemudian dilaksanakan, menurut pendapat saja adalah tidak pada tempatnja, dan tentunja, bukanlah suatu pernjataan iktikad jang baik.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Saja tidak akan menjangkal adanja bermatjam-matjam pikiran dan pendapat pribadi dari pemimpin-pemimpin Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, tapi njatalah bahwa keputusan jang terachir ialah, bahwa keutuhan Indonesia seharusnja meliputi seluruh Hindia Belanda, tidak lebih dan tidak kurang. Dapat saja tambahkan, bahwa sebelum proklamasi — malah dimasa sebelum perang — telah terdapat djuga perbedaan-perbedaan pendapat diantara pemimpin-pemimpin Indonesia tentang struktur Negara Indonesia, baik jang berdasarkan unitarisme maupun jang berdasarkan azas-azas federal. Achirnja, keputusan nasional ialah bahwa Indonesia seharusnja mendjadi Negara Kesatuan dengan otonomi daerah sebesar mungkin.

Motto Indonesia „*Bhineka Tunggal Ika*" berarti „kesatuan dalam perbedaan".

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Presiden Sukarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah proklamasi, pemimpin-pemimpin nasional menegaskan, bahwa wilajah Indonesia meliputi seluruh wilajah Hindia Belanda, dan kemudian kami mendapat dukungan rakjat dari seluruh daerah Indonesia, termasuk Irian Barat. Presiden Sukarno dalam sebuah pidato radio dengan sangat tegas menjatakan, bahwa wilajah Indonesia adalah tepat sama seperti dahulu — jakni, meliputi seluruh Hindia Belanda, jang dengan kata-kata populer disebut: dari Atjeh, udjung Utara Sumatra, hingga Merauke, udjung Timur di Irian Barat.

Baiklah saja kemukakan djuga bukti jang tidak dapat disangkal, bahwa kami bukan expansionis atau neo-kolonialis, seperti jang telah disindir oleh delegasi Belanda dan Negara-negara lain didalam dan diluar Madjelis ini. Agak menggelikan hati, bila keadaan tidak demikian tragis, untuk mendengarkan tjeramah dari Negara-negara kolonial tentang arti hak menentukan nasib sendiri.

Seperti saja telah njatakan kepada Madjelis ini, kami mengetahui dari pengalaman-pengalaman dan pengorbanan-pengorbanan pahit,

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

apa artinja kemerdekaan dan apa artinja penentuan nasib sendiri. Bagi kami, perkataan-perkataan ini bukanlah hanja pengertian-pengertian abstrak. Perkataan-perkataan ini bukanlah hanja sembojan atau kalimat-kalimat-bagus untuk mengumpulkan suara. Tidak, perkataan-perkataan ini adalah pendjelmaan djiwa Indonesia. Perkataan-perkataan ini membangkitkan harapan akan kehidupan jang lebih baik, membangkitkan kebulatan tekad dan keberanian dan bahkan pengorbanan-pengorbanan pribadi, bila perlu.

Tidak ada djalan lain bagi bangsa jang bangga dan beradab, jang hingga empatratus tahun jang lalu merupakan salah satu bangsa jang terkaja dan terbesar dibagian dunia itu, kemudian menderita kemerosotan disebabkan penindasan kolonial dan bahkan hingga tahun 1961 ini belum bebas seluruhnja dari dendam dan subversi Nederland.

Kami bukan hanja tidak menuntut daerah-daerah diluar Hindia Belanda dulu, walaupun daerah-daerah tersebut ada dipulau jang sama, tapi — lebih dari itu — ketika Malaya menjatakan kepada kami tentang niatnja untuk bersatu dengan koloni-koloni Inggeris Serawak, Brunei dan Borneo Utara dalam satu federasi, dan kami utjapkan selamat kepada mereka dengan penjatuan ini sehingga setiap orang dapat hidup aman dan merdeka.

Untuk djelasnja, saja dapat menjatakan kepada Madjelis ini, bahwa tiga per-empat pulau Kalimantan adalah wilajah Indonesia, sedangkan sisanja merupakan koloni-koloni Inggeris jang disebut tadi. Dengan sendirinja, dilihat dari sudut etnology dan geografi, bagian Inggeris ini adalah lebih dekat kepada Indonesia, daripada umpamanja, Malaya. Namun demikian kami mengatakan djuga kepada Malaya bahwa kami tidak berkeberatan terhadap penjatuan demikian itu jang didasarkan atas keinginan untuk kebebasan dari rakjat-rakjat jang bersangkutan. Bagi Republik Indonesia, kami tetap berpegang kepada persetudjuan, berdasarkan keputusan nasional kami sendiri, tentang luasnja wilajah Republik Indonesia jang telah pula dibenar-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

kan setjara umum dan resmi oleh wakil Nederland di Dewan Keamanan P.B.B. pada tahun 1948, saja ulangi, dimuka umum dan setjara resmi dibenarkan, bahwa:

„Semua pihak setudju bahwa apa jang dahulunja Hindia Belanda seharusnja mendjadi Negara merdeka setjepat mungkin".

Oleh karena itu, pendapat-pendapat pribadi Ir Sukarno sebelum proklamasi Indonesia, jang telah dikutip oleh Tuan Schuurman, tentang kemungkinan-kemungkinan Negara Pan-Malaya — sebuah federasi atau confederasi jang didukung oleh keinginan rakjat — bukanlah pernjataan keinginan akan expansionisme. Djanganlah dilupakan bahwa sewaktu soal-soal ini dibitjarakan, semasa Perang Dunia Ke-II, ketika saat achir perang belum dapat kami ramalkan, batas-batas Hindia Belanda dulu telah diganti oleh batas-batas daerah-daerah pendudukan Djepang, jang tidak sama satu dengan jang lain. Dalam keadaan demikian, dapatlah dipahami, bahwa pendapat-pendapat pribadi jang berbeda mungkin telah diutjapkan perihal kemungkinan batas-batas Negara Indonesia jang akan lahir.

Bahkan sekarang, memang ada keinginan besar diantara rakjat dari suku Malaya untuk lebih erat bersatu dan menggalang semua kekuatan nasional mereka untuk tudjuan bersama — dibidang politik, ekonomi dan kebudajaan. Jang Mulia Perdana Menteri Malaya, Tengku Abdul Rahman, sangat tjondong pada konsepsi ini.

Saja kira memang sangat sukar bagi Belanda untuk menjangkal bahwa Irian Barat adalah bagian dari masalah kolonial Indonesia. Izinkanlah saja kini mengupas dalil-dalil juridis Belanda, jang bertudjuan menutupi persoalan jang sebenarnja.

Wakil Belanda jang terhormat dengan sangat litjin mulai dengan menjebut pasal 2 Piagam Penjerahan Kedaulatan. Untuk melengkapi uraiannja jang berat sebelah, bolehlah saja sekarang menjebut pasal 1, ajat 1, Piagam Penjerahan Kedaulatan, seperti jang telah disinggung oleh wakil Ghana jang terhormat.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Pasal itu bunjinja : „Keradjaan Belanda menjerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat tanpa sarat dan setjara mutlak dan mengakui Republik Indonesia Serikat tersebut sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat".

Inilah inti Persetudjuan itu : bahwa kedaulatan penuh atas Indonesia telah diserahkan tanpa sarat dan setjara mutlak kepada Republik Indonesia jang baru itu sebagai suatu Negara jang merdeka dan berdaulat.

Memang benar — dan saja tidak mau menjangkal — bahwa ada pasal-pasal lain jang berisi ketentuan-ketentuan lain, tapi ketentuan-ketentuan ini berhubungan dengan pelaksanaan penjerahan kedaulatan atas seluruh Indonesia. Maka dari itu pasal 2 Piagam, jang disebut Tuan Schuurman dan jang mengenai pertikaian sekarang ini mengenai status politik Irian Barat, sama sekali tidak menjebut-njebut tentang kedaulatan, jang menurut pasal 1, telah diserahkan dengan sempurna, tanpa sarat dan setjara mutlak itu.

Seperti telah saja terangkan kepada Madjelis ini, Belanda memerlukan ketentuan-ketentuan ini agar supaja dapat mentjapai dua-pertiga suara majorita didalam Parlemen Belanda jang diperlukan untuk menerima Persetudjuan-persetudjuan Medja Bundar dan untuk perobahan-perobahan jang perlu diadakan dalam Undang-Undang Dasar Belanda.

Pada waktu itu hal ini dapat dimengerti sepenuhnja, baik dinegeri Belanda maupun di Indonesia. Banjak tokoh Belanda jang tidak ber-prasangka terhadap Indonesia memang telah menegaskan dan menerangkan pengertian ini dalam pernjataan-pernjataan umum. Misalnja, tidak lama berselang pada tanggal 13 Nopember jang baru lalu, harian Belanda "De Haagse Courant" mewartakan bahwa Tuan Suurhoff, Ketua Partai Buruh Belanda — Partai Buruh adalah partai kedua dinegeri Belanda — telah mengeluarkan pernjataan sebagai berikut, dan saja kutip :

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

„Tuan Suurhoff tidak akan menjesalkan atau keberatan andaikata New Guinea (Barat) turut serta diserahkan pada waktu penjerahan kedaulatan pada tahun 1949. Tetapi hal ini pada waktu itu tidak mungkin; malah tanpa New Guinea (Barat) pun penjerahan kedaulatan kepada Indonesia hampir-hampir tidak memperoleh majorita dua-pertiga pada waktu itu. Kemudian, Partai Buruh harus mengalah bahwa masalah tersebut dibekukan".

Jang sangat menarik perhatian dalam berita tersebut ialah bahwa walaupun tafsiran ketua Partai Buruh Belanda itu berbeda dengan tafsiran kami, tafsiran tersebut tidak didasarkan atas sesuatu soal prinsipiil melainkan didasarkan atas kebidjaksanaan untuk mempermudah memperoleh kelebihan duapertiga suara.

Selandjutnja politik kebidjaksanaan untuk mempermudah ini djuga telah dibenarkan oleh Prof. Duynstee, seorang anggauta dari partai tuan Luns sendiri, dalam bukunja jang berdjudul : "New Guinea sebagai djembatan antara Nederland dan Indonesia" jang baru diterbitkan dua minggu jang lalu. Saja kutip dari buku jang menarik itu, jaitu dari halaman 183 :

„Djika ditindjau kembali, pemisahan New Guinea dari Indonesia adalah suatu kesalahan. Pada hakekatnja pemisahan itu hanja diperlukan untuk mentjapai kelebihan duapertiga suara bagi Undang-undang penjerahan kedaulatan. New Guinea adalah harga jang harus dibajar agar mendapatkan sokongan Christelijk-Historische Unie dan Partij voor Vrijheid en Democratie, dan jang bagi kedua partai tersebut dianggap perlu untuk pertanggungan djawabnja terhadap anggauta-anggauta dan pemilihan mereka".

Ini telah lama diperhitungkan sebelumnja. Masalah Irian Barat samasekali tidak penting, baik bagi "Katholieke Volkspartij" maupun P.v.d.A., ataupun Kabinet, akan tetapi hanja untuk keperluan mentjapai kelebihan duapertiga suara".

Setelah mendengar keterangan-keterangan authoritatief ini maka teranglah bahwa inti daripada kontrak politik jang termaktub dalam

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penjerahan Kedaulatan antara Indonesia dan Belanda ialah bahwa Belanda akan melepaskan kedaulatannja atas apa jang dahulu dinamakn Hindia Belanda dan bahwa Belanda akan menjerahkan kekuasaannja — dengan sempurna, tanpa sarat dan setjara mutlak — kepada Indonesia jang berdaulat. Bersama dengan itu telah ditetapkan pula beberapa ketentuan ,djuga berdasarkan kebidjaksanaan untuk mempermudah, agar memungkinkan pelaksanaan penjerahan resmi kedaulatan setjara formil kepada Indonesia.

Kita pernah ditanjakan mengapa tidak menjelesaikan soal Irian Barat ini melalui Pengadilan Internasional? Pertama-tama, dan ini agaknja sudah djelas sekarang, karena masalah ini adalah sebahagian dari suatu masalah kolonial jang lebih besar jang belum benar-benar diselesaikan. Masalah Irian Barat ini bukan semata-mata suatu pertikaian antara dua negara jang berdaulat. Pertikaian antara Belanda dan Indonesia mempunjai latar belakang jang lebih mendalam dan Irian Barat dengan sengadja didjadikan pokok pertikaian tersebut. Saja nanti akan menerangkan segi ini lebih landjut.

Kontrak antara Indonesia dan Belanda, seperti tertjantum dalam Piagam Penjerahan Kedaulatan, waktu itu bukanlah suatu kontrak antara dua fihak jang sederadjat, seperti misalnja Amerika Serikat dan Inggeris sekarang. Kontrak itu meliputi suatu penjerahan kedaulatan oleh Belanda, sebagai Negara kolonial, kepada Indonesia, sebagai negara jang baru berdaulat dan merdeka, atas seluruh daerah Hindia Belanda. Ini dinjatakan dengan djelas dalam pasal 1, ajat 1 dari Piagam tersebut. Itulah djiwa daripada kontrak tersebut. Dalam kontrak tersebut tidak disebut-sebut, malah petundjuk-petundjuk pun tidak ada, tentang hak menentukan nasib sendiri bagi rakjat Irian Barat atau mengenai pentjiptaan buatan mendjadi suatu negara merdeka tersendiri.

Terus terang sadja, kami pada waktu itu puas dengan kontrak antara Indonesia dan Belanda ini oleh karena dasar pokok tentang penjerahan kedaulatan telah ditjantumkan setjara sangat terang dan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

djelas. Terus sadja, kami pada waktu itu tidak terlalu mempersoalkan susunan kata-kata ketentuan-ketentuan jang lain dalam Piagam tersebut setelah diberi penegasan-penegasan chusus bahwa segala sesuatu itu hanja merupakan suatu soal kebidjaksanaan untuk mempermudah. Sesudah berulang kali diberi djaminan dan penegasan dari negarawan-negarawan Belanda, seperti Dr J. van Mook dan Dr van Royen, bahwa Hindia Belanda — kemudian dinamakan Indonesia — akan mendjadi bebas dan merdeka sebagai satu kesatuan wilajah dan bangsa, kita merasa puas dengan kontrak tersebut. Pada waktu itu samasekali tidak ada gerakan-gerakan di Irian Barat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebaliknja, — saja ulangi : sebaliknja, — pemimpin-pemimpin setempat telah mengadakan pernjataan-pernjataan umum dan telah mengadjukan permintaan-permintaan resmi kepada tentara pendudukan Belanda dan Pemerintah Belanda agar Irian Barat djangan dipisahkan dari Indonesia.

Kenjataan-kenjataan ini tidak pernah disangkal oleh pembesar-pembesar Belanda manapun. Sebaliknja, pembenaran jang langsung dan tidak langsung telah dinjatakan oleh negarawan-negarawan dan tokoh-tokoh politik Belanda. Rakjat Irian Barat tidak pernah menuntut pemisahan dan malah banjak tokoh politik Belanda sendiri menganggap dalil, bahwa rakjat Irian Barat harus diberikan hak menentukan nasib sendiri jang istimewa dan tersendiri, sesuatu jang tidak masuk akal. Sebagai tjontoh Prof. Gerretson, — jang samasekali tidak dapat dinamakan seorang kawan Indonesia tapi sebaliknja telah senantiasa sangat menentang penjerahan kedaulatan kepada Indonesia — pada salah satu perdebatan umum di Parlemen Belanda pernah mengatakan : „Ditindjau lepas dari perselisihan dengan Indonesia, hal ini", — jakni, pemberian apa jang dinamakan hak menentukan nasib sendiri — „adalah sangat mengherankan, karena kepada rakjat Papua jang masih hidup didalam Zaman Batu diberikan sesuatu jang tidak mau diberikan kepada orang Suriname pada tahun 1953, walaupun rakjat Papua — dan saja ulangi — rakjat Papua tidak pernah minta sesuatupun sedang orang Suriname berulang kali menuntut keras hak itu".

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Saja kutip dari notulen rapat Kamar Pertama dari Parlemen Belanda, tahun 1954|1955, halaman 504.

Saja tidak pertjaja bahwa Pengadilan Internasional adalah tempat untuk menjelesaikan masalah kolonial. Andaikata bangsa Aldjazair datang menghadap pada Pengadilan Internasional, maka putusan hakim mungkin mensahkan kolonialisme Perantjis — sah menurut „hukum internasional" — berdasarkan perdjandjian ini atau itu.

Pada hakekatnja, kolonialisme adalah suatu kontrak politik jang mempunjai kekuatan hukum, tetapi apakah kita harus mempertahankan kolonialisme sebab ia dapat dipertahankan setjara hukum ?

Piagam Penjerahan Kedaulatan adalah suatu kontrak politik tentang penjerahan kedaulatan Belanda dengan sempurna, tanpa sjarat setjara mutlak kepada Republik Indonesia jang baru, sebagai suatu negara jang berdaulat. Ini adalah terang dan djelas. Selain daripada itu ada beberapa ketentuan untuk pelaksanaannja agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan politik dinegeri Belanda pada waktu itu. Selama kontrak politik tentang penjerahan kedaulatan kepada Indonesia dengan sempurna, tanpa sjarat dan setjara belum dilaksanakan sepenuhnja oleh Belanda, selama itupun masalah kolonial Indonesia tetap ada, selama itupun kolonialisme Belanda masih meradjalela di Indonesia. Dan seperti saja telah katakan : kolonialisme sebagai suatu penjakit immoril dan tak berperikemanusiaan, jang menghinggapi hubungan internasional tak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Internasional. Setiap perdjandjian antar bangsa, biarpun berdasarkan dalil rimba dimana si-kuat mentjaplok si-lemah, akan dinjatakan sah oleh Pengadilan Internasional.

Inilah sebabnja mengapa Belanda berhasil menentang suatu resolusi jang diadjukan oleh Indonesia kepada sidang Madjelis Umum sedjak tahun 1954 sampai 1957, jang mengandjurkan kedua pihak untuk membitjarakan masalah Irian Barat guna memperoleh suatu penjelesaian jang damai, oleh karena Irian Barat dianggapnja

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

suatu masalah jurisdiksi dalam negeri. Pendirian kami ialah bahwa setjara prinsipiil kami menolak kompetensi Pengadilan Internasional untuk menjelesaikan masalah kolonial. Ini samasekali tidak berdasarkan katakutan kalau-kalau keputusan Pengadilan tersebut atas Piagam Penjerahan akan menguntungkan Belanda. Singkatnja ialah:

a) Soal Irian Barat adalah bahagian dari masalah kolonial Indonesia.

b) Soal Irian Barat adalah bahagian dari perdjuangan kemerdekaan, sebab:

1. Irian Barat adalah sebahagian dari keutuhan wilajah Hindia Belanda dan, bahkan sebelum permulaan kolonialisme Belanda di Indonesia, Irian Barat adalah sebahagian dari keradjaan-keradjaan Sriwidjaja dan Madjapahit dahulu. Jang belakang ini diterangkan dengan djelas oleh ahli anthropologi bangsa Amerika Raymond Kennedy dalam bukunja jang berdjudul „The Ageless Indies" (New York 1942). Saja kutip dari halaman 84 sebagai berikut :

„..... Keradjaan Besar Madjapahit dengan ibukotanja di Djawa Timur, mendjalankan kekuasaan jang mutlak atas bahagian terbesar daerah Hindia, Pilipina dan Asia Tenggara selama abad ke-14 dan sebahagian besar abad ke-15. Pada zaman inilah peradaban Hindu-Djawa berkembangan diseluruh wilajah tersebut; bahkan sampai pada hari inipun peninggalan dari pengaruh peradaban ini masih terdapat djauh di Utara Luzon dikepulauan Pilipina dan sampai di udjung Timur kepulauan Indonesia ialah di Irian. — misalnja abdjad India kuno, benda-benda dari emas dan logam lainnja, tugu-tugu dari batu dan beraneka ragam hasil peradaban dan bahasa."

2. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mendapat dukungan rakjat dimana-mana di Indonesia, termasuk Irian Barat sendiri, sebagaimana telah dibuktikan oleh pernjataan-pernjataan pemimpin-pemimpin Irian Barat pada waktu itu. Dukungan ini telah dibuktikan lebih landjut oleh pe-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ngorbanan-pengorbanan rakjat Irian Barat sendiri didalam mempertahankan penjataan-pernjataan pendirian mereka sewaktu tentara Belanda menduduki kembali daerah mereka. Apabila Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam hubungannja dengan keutuhan wilajah belum djuga terang bagi wakil Belanda jang terhormat, sekali lagi saja ingin minta perhatiannja kepada sedjumlah besar pidato radio jang diutjapkan oleh Presiden Sukarno segera sesudah 17 Agustus 1945.

3. Irian Barat adalah suatu bagian integral daripada perdjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah ditegaskan lagi dalam utjapan-utjapan resmi tokoh-tokoh terkemuka, negarawan-negarawan dan tokoh-tokoh politik seperti Dr van Royen, Dr van Mook sebelum pengakuan resmi atas kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949.

4. Oleh karena djiwa Piagam Penjerahan Kedaulatan, jang dalam pasal 1, ajat 1 menjerahkan kedaulatan penuh kepada Indonesia, tanpa sjarat dan setjara mutlak.

Memang benar bahwa Piagam sekarang telah dibatalkan, disebabkan pelanggaran jang dilakukan oleh pemerintah Belanda atas semangat dan azas-azasnja. Walaupun demikian, menurut kontrak itu Belanda setjara resmi telah melepaskan kedaulatannja atas Indonesia dan menjerahkan kekuasaan-kekuasaannja kepada Republik Indonesia. Ini adalah suatu kenjataan historis dan politis jang tidak dapat ditjabut kembali oleh Belanda, ketjuali dengan djalan menduduki kembali seluruh Indonesia dengan kekerasan.

Irian Barat, sebagai pokok pertikaian Indonesia-Belanda, njatalah telah disalahgunakan oleh Belanda untuk tetap menghidupkan dendamnja terhadap Indonesia. Memang, sudah sedjak dari mulanja, ditahun 1945, Belanda hanja mempunjai satu tudjuan, jaitu untuk menghantjurkan kemerdekaan Indonesia, dan bila ini tidak mungkin, mengatjaukan dan mengadakan subversi terhadap Indonesia. Sedjak dari tahun 1945 hingga sampai achir tahun 1949, kami berdjuang dalam suatu perang kolonial jang kedjam, dimana Indonesia kehila-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ngan lebih dari setengah djuta djiwa rakjatnja. Semendjak tahun 1949 hingga achir tahun 1957 kami masih sadja memberikan kepada Belanda kedudukan ekonomi jang istimewa di Indonesia, dengan mengadakan perbedaan terhadap negara-negara lain supaja dapat menguntungkan Belanda. Kami memberikan konsesi-konsesi ekonomi kepada Belanda sampai demikian djauh, sampai seorang ahli ekonomi bangsa Djerman, bernama Helbig, menarik kesimpulan dalam bukunja berdjudul „Indonesia", bahwa djumlah pendapatan tahunan Belanda di Indonesia dalam masa setelah tahun 1950 adalah melebihi pendapat tahunannja sebagai penguasa kolonial.

Namun hal ini masih sadja belum tjukup memuaskan bagi Belanda dalam melantaskan dendamnja terhadap Indonesia. Mulai dari saat penandatanganan Piagam Penjerahan Kedaulatan, pada achir tahun 1949, Belanda masih terus sadja melakukan tindakan-tindakan subversi, sebagaimana terbukti dari gerakan-gerakan separatis dan pemberontakan-pemberontakan, jang mentjapai puntjaknja pada peristiwa proklamasi apa jang disebut Republik Maluku Selatan, dibagian timur Indonesia dan berdekatan dengan Irian Barat. Sjukurlah kami telah berhasil mengatasi tindakan subversi Belanda itu dan dengan kekerasan kami telah dapat menghantjurkan apa jang disebut Republik Maluku Selatan itu, jang telah didalangi oleh tentara Belanda itu. Dengan latar belakang semangat permusuhan Belanda jang masih dilandjutkannja inilah, kami mendjadi jakin bahwa seandainja pun tidak ada pertikaian Irian Barat, namun Belanda masih tetap akan mentjari kemungkinan-kemungkinan lain untuk melakukan kekatjauan di Indonesia dengan tudjuan melemahkan kekuatan Indonesia, baik dibidang dalam negeri maupun dibidang internasional. Untuk memungkinkan tertjapainja penjelesaian, baik dalam masalah Irian Barat maupun dalam soal pertikaian Belanda — Indonesia pada umumnja, maka semangat permusuhan dan dendam itu hendaklah dinjahkan lebih dulu. Selama semangat sedemikian masih dipakai sebagai pedoman politik luar negeri Belanda terhadap Indonesia, setiap konsesi dari pihak Indonesia baik besar ataupun ketjil,

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

hanja akan ditafsirkan sebagai tanda-tanda kelemahan dan mungkin hanja akan memperbesar nafsu agresif Belanda terhadap Indonesia.

Sekarang saja akan berpaling kepada soal mengapa kami menolak rentjana-resolusi Belanda. Pertama, saja jakin sudah djelas bagi setiap orang, bahwa Irian Barat adalah bagian dari masalah kolonial Indonesia dan bahwa dalam rangka ini Irian Barat merupakan sumber sengketa Belanda-Indonesia. Hal ini dengan sendirinja berarti, bahwa suatu penjelesaian dalam masalah Irian Barat merupakan bagian jang penting dari penjelesaian jang lebih luas dari pertikaian Belanda-Indonesia. Saja akan melangkah lebih djauh lagi. Saja mengharapkan sungguh-sungguh mudah-mudahan penjelesaian masalah ini akan dapat pula membuka bab baru dalam hubungan antara Belanda dan Indonesia, suatu bab dimana Belanda akan dapat menerima kemerdekaan Indonesia setjara tulus-ichlas dimana Belanda tidak lagi menanam rasa dendam dan permusuhan terhadap Indonesia, dimana Belanda telah dapat melupakan djaman gemilangnja dimasa lampau sebagai pendjadjah Hindia Belanda, dimana Belanda tidak akan berkeberatan mengadakan kerdjasama setjara terhormat dengan Indonesia demi keuntungan-bersama.

Ingin saja tegaskan pula hal ini. Kami, seperti djuga Belanda, menganggap kesedjahteraan dan kemadjuan rakjat Irian Barat sebagai hal jang sangat penting. Kami memandang satu hal jang sangat penting untuk mengabdi kepada kepentingan bangsa Indonesia pada umumnja. Betapapun orang berkata bahwa kami belum memiliki sepenuhnja sjarat-sjarat jang diperlukan untuk mendjalankan suatu pemerintahan moderen, betapapun jang dikatakan orang tentang kekurangan kami akan keahlian tehnis dan pengetahuan ilmiah untuk memimpin perusahaan-perusahaan ekonomi dan industri, namun orang tidak dapat menjangkal bahwa dibidang sosial dan kebudajaan Indonesia telah mentjatat kemadjuan jang mendahsjatkan. Dibidang pendidikan, telah diakui oleh UNESCO sendiri, bahwa kemadjuan jang ditjapai Indonesia dibidang ini terhitung salah satu jang

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

terbaik didunia diantara negara-negara jang belum lama memperoleh kemerdekaannja dari pemerintahan kolonial atau setengah-kolonial.

Delagasi Australia dan delegasi Belanda senantiasa menjebut njebut bahwa rakjat Papua masih setengah telandjang atau boleh dikatakan hampir tidak berpakaian samasekali, dan hal ini mungkin benar untuk lebih dari 90% dari penduduk jang hidup disana dibawah pendjadjahan Belanda. Akan tetapi dibagian wilajah Indonesia lainnja, terutama dibagian pedalaman Kalimantan dan Sulawesi, kami memulai ditahun 1950 hampir dengan keadaan jang sama. Akan tetapi sekarang setidak-tidaknja kami telah mentjapai tingkat dimana kami telah dapat memberikan pakaian jang wadjar untuk seluruh penduduk kami, sekalipun mutunja bukanlah jang terbaik. Djika saja boleh menarik kesimpulan jang sederhana, maka dalam djangka waktu jang pendek selama kemerdekaan nasional kami, kami mungkin masih banjak bisa beladjar dalam hal keahlian teknis serta pengetahuan ilmiah Negara-negara kolonial; tapi dalam hal penjelenggarakan dibidang sosial dan ketekunan untuk menaikan tingkat sosial dan kebudajaan bangsa kami, saja rasa Negara-negara kolonial, seperti negeri Belanda, harus mengakui kekurangan mereka. Bagi kami, rakjat Irian Barat, seperti djuga halnja dengan warga Indonesia lainnja, tidaklah hanja sekedar untuk didjadikan objek penjelidikan anthropologi sadja. Kami menganggap mereka sederadjat dengan kami, dan ini bukanlah hanja karena pertimbangan-pertimbangan bersifat ethis; mereka adalah sederadjat dengan kami sebagai manusia sosial.

Djadi djanganlah negara-negara kolonial membangga-banggakan diri, sekalipun dengan keahlian-keahlian teknik jang dimilikinja dan modal jang sangat besar jang ada padanja, untuk merasa lebih unggul dalam penjelenggaraan sosialnja terhadap penduduk pribumi, dan mengira bahwa penjelenggaraan mereka itu malah melebihi lagi ketjakapan pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar sesama bangsa penduduk pribumi itu sendiri.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Belanda dewasa ini membanggakan sumbangannja sebanjak $30 djuta setahun. Idzinkan saja mengatakan kepada Tuan-tuan bahwa hanja sebagian ketjil sekali dari uang itu dipergunakan untuk kepentingan kesedjahteraan rakjat Irian Barat jang berdjumlah 700.000 djiwa itu. Biaja pertahanan Irian Barat ditahun 1959 ditaksir berdjumlah kira-kira $ 10 djuta. Ditahun 1960 djumlahnja ditaksir kira-kira dua kali sebanjak itu karena pengeluaran-pengeluaran tambahan dalam persendjataan guna mempertahankan politik agresif Belanda disana terhadap Indonesia.

Bagian penting lainnja dari djumlah $ 30 djuta itu dipakai pula untuk pembajaran gadji pegawai-pegawai Belanda di Irian Barat jang tinggi bajarannja dan untuk pemasukan banjak barang-barang lux dari negeri Belanda. Maka orang dapat menarik kesimpulan, betapa sedikit sisa jang tinggal dari uang itu untuk dipakai untuk kepentingan rakjat Irian Barat sendiri. Hal ini adalah sangkalan serta-merta daripada dongengan mission sacré Belanda terhadap rakjat Irian Barat. Kemadjuan-kemadjuan ketjil jang ditjapai disana dibidang kesedjahteraan sosial rakjat bukanlah hasil usaha-usaha pemerintahan kolonial Belanda, tapi terutama adalah hasil kegiatan-kegiatan misionaris-misionaris.

Setelah mengemukakan fakta-fakta ini, maka hal terpenting jang terkandung dalam pikiran kami ialah bahwa suatu penjelesaian sengketa Indonesia-Belanda merupakan kepentingan utama bagi kesedjahteraan dan kemerdekaan rakjat Irian Barat sendiri. Oleh karena inilah maka kami sangat heran sekali mengapa Pemerintah Belanda tidak berusaha sedikit djuga untuk merundingkan dengan kami, langsung atau tidak langsung, mengenai suatu penjelesaian masalah Irian Barat, terutama karena pemetjahan soal ini adalah sangat penting artinja bagi rakjat Irian Barat sendiri.

Menteri Luar Negeri Luns jang terhormat mengatakan pada tanggal 8 Oktober 1961, bahwa ia tidak dapat mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia lebih dahulu karena Indonesia telah memutus-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

kan hubungan-hubungan diplomatik dengan Belanda... dan karena Indonesia hanja dapat menerima satu penjelesaian — penjerahan Nieuw Guinea Belanda kepada Indonesia tanpa merembukkannja lebih dahulu dengan rakjat Papua. Menteri Luar Negeri Luns jang terhormat itu tidak berusaha menjelidiki apakah, setelah pendapat umum dinegeri Belanda memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Belanda untuk melepaskan kekuasaan Belanda atas Irian Barat, mungkin sekali Indonesia mempunjai penjelenggaraan lain terhadap masalah Irian Barat ini. Penjelidikan-penjelidikan sedemikian dapat disalurkan melalui sesuatu negara lain, sekalipun telah terputusnja samasekali hubungan-hubungan diplomatik antara kedua negara itu.

Ditindjau dari sudut lain, dari sudut sengketa Belanda-Indonesia jang tiada habis-habisnja, kami bangsa Indonesia dapat mengharapkan segala matjam hal dari pihak Belanda. Nista atau penghinaan akan didjalankannja, asal sadja dapat melukai Indonesia. Demikian pula soal "menentukan nasib sendiri" bagi rakjat Irian Barat dewasa ini dipergunakan sebagai alat politik luar negeri Belanda untuk menghantam Indonesia dan tidak dipergunakannja sebagai alat untuk membawa kemerdekaan dan kegembiraan bagi rakjat Irian Barat sendiri.

Apa alasan saja untuk berbitjara demikian ? Saja berbitjara demikian, karena achir2 ini pendapat umum dinegeri Belanda dan iklim politik disana pada umumnja telah berubah mendjadi lebih tjondong untuk melepaskan "kedaulatan"-nja atas Irian Barat. Sebagian dari pendapat umum ini menginsjafi kebaikannja untuk menjerahkan setjara langsung kekuasaan Belanda itu kepada Republik Indonesia. Wilajah Irian Barat didiami oleh 700.000 djiwa, jang perasaan anti-kolonial-nja makin lama makin bertambah besar. Irian Barat tidaklah memberikan harapan akan hari-depan jang menguntungkan bagi kalangan perdagangan dan industri Belanda. Bahkan industri minjaknja pun suatu industri jang sering dibanggakan oleh Belanda, telah menghadapi kegagalan dan achir-achir ini telah menghentikan segala usaha-usahanja. Peneguhan serta penambahan kekuatan pertahanan

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia, iklim internasional jang mengadakan desakan bagi pengwudjudan dekolonisasi — semua faktor-faktor ini telah mendjadikan Irian Barat suatu pos kerugian total bagi negeri Belanda, tanpa penghasilan-penghasilan jang menguntungkan baik politik maupun ekonomi.

Sebagai akibatnja, rintangan terhadap penjempurnaan kemerdekaan Indonesia, jang dikemukakan oleh Belanda sedjak tahun 1950 sudah tidak ada lagi. Dan sudah mendjadi kenjataan, bahwa pendapat umum dinegeri Belanda adalah kuat — malah lebih kuat lagi pada waktu ini — menghendaki transformasi masalah Irian Barat ini mendjadi suatu djembatan guna meng-normalisasi-kan hubungan antara Belanda dan Indonesia.

Tuan Suurhoff, Ketua Partai Buruh Belanda, dalam suatu pernjataan jang dimuat oleh suratkabar "Haagse Courant" tanggal 13 Nopember jang lalu, dan jang djuga telah saja sebut-sebut tadi, mengatakan :

"Memorandum Belanda (mengenai Irian Barat) jang telah diedarkan di New York baru-baru ini menundjukkan suatu perbaikan dalam politik Pemerintah Belanda. Hal ini disambut baik oleh Partai Buruh. Kemungkinan-kemungkinan tampaknja dibuka untuk mengikut-sertakan pihak Indonesia dalam pelaksanaan rentjana Luns. Kemungkinan ini senantiasa mendjadi tudjuan Partai Buruh dalam usaha-usaha internasionalisasinja".

Inilah inti dari utjapan tuan Suurhoff mengenai rentjana Luns. Dan ini merupakan suatu semangat jang berbeda. Bagaimanapun baik-buruknja tuntutan masing-masing, tuan Suurhoff dan pendapat umum dinegeri Belanda pada umumnja menganggap penjelesaian pertikaian Indonesia-Belanda sebagai suatu keharusan demi kepentingan Indonesia dan Belanda serta djuga demi kepentingan rakjat Irian Barat sendiri. Atas dasar semangat ini, atas dasar kemungkinan untuk memberi dan menerima, maka penjelesaian terhormat, menurut hemat saja, terletak dalam kemampuan kedua belah pihak. Mottonja

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

dengan demikian akan berbunji : Irian Barat sebagai djembatan antara Belanda dan Indonesia.

Apakah rentjana Luns djuga didasarkan atas semangat ini ? Reaksi Indonesia, baik setjara naluri, maupun sesudah meneliti setjara seksama, adalah tegas bahwa rentjana Luns ini tidak mengandung semangat berdamai ini; malahan lebih dari itu, berisikan penuh dengan muslihat kolonialisme dan perasaan anti-Indonesia.

Ketika tuan Luns menjampaikan pidato pertamanja dimuka Madjelis pada tanggal 26 September jang lalu, ia begitu sadja mengenjampingkan Indonesia dalam usaha menginternasionalisasikan penjelesaian masalah Irian Barat. Pada waktu tuan Luns menjampaikan rentjana resolusi guna apa jang dinamakan dekolonisasi, ia menganggap seolah-olah Indonesia tidak ada. Hanja sesudah reaksi kami jang keras dan bertambahnja tekanan masjarakat dinegeri Belanda, maka delegasi Belanda mengedarkan memorandumnja jang memang menjebut Indonesia djuga.

Setelah memutuskan untuk melepaskan apa jang mereka namakan kedaulatannja atas Irian Barat, pemerintah Belanda sesungguhnja sekarang mendapat kesempatan untuk melaksanakan maksudnja dengan berbagai tjara.

Pertama, untuk memakai penjerahan kekuasaan ini sebagai alat guna mentjapai penjelesaian terhormat dari pertikaian Indonesia-Belanda, atas dasar kesedjahteraan rakjat Irian Barat, dan bersamaan dengan itu untuk mentjiptakan semangat kerdjasama antara kedua negara kami.

Atau, kedua, untuk mempergunakan politik penjerahan kedaulatan ini se-efektif-efektifnja sebagai sendjata melawan Indonesia, terutama sekali diforum internasional ini, tanpa — saja ulangi, tanpa — menjerahkan kekuasaannja kepada rakjat Irian Barat sendiri.

Sajang, pemerintah Belanda sampai dewasa ini telah memilih kemungkinan terachir, terutama sekali berlagak sebagai seorang

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

pemuka "dekolonisasi". Jang penting dalam pikiran mereka ialah mendjadikan Indonesia sebagai terdakwa diforum internasional ini. Mereka ingin menjeret Indonesia kemuka hakim. Apa jang dinamakan penentuan nasib sendiri untuk rakjat Irian Barat hanja merupakan soal kedua bagi pemerintah Belanda. Karena adalah suatu kemenangan besar dibidang politik luar negeri Belanda bilamana dapat menghina Indonesia sekarang, menghina Indonesia untuk 10 a 15 tahun berikutnja dan djangan sekali-kali memberikan kesempatan untuk memerdekakan setjara damai daerah Irian Barat jang telah dipisahkan daripadanja.

Dapat saja katakan bahwa usul Belanda setjara sepintas lalu mungkin sangat menarik. Akan tetapi, setelah mengetahui latar belakang dan ketidak djudjuran politik luar negeri Belanda terhadap Indonesia chususnja dan sikap keras kepala terhadap daerah-daerah djadjahan lainnja seperti Suriname dan Curacao, maka segera mendjadi djelas bahwa rentjana resolusi Belanda tidak mengandung kedjudjuran dan keichlasan. Bertentangan dengan rentjana resolusi jang maksudnja untuk memperoleh dukungan internasional, politik jang didjalankan oleh Belanda di Irian Barat sendiri memperlihatkan tjorak jang berlainan sekali. Politik itu tetap bersifat kolonial dan anti-Indonesia, penuh dengan akibat-akibat jang membahajakan.

Pertama sekali, semua pemimpin dan orang-orang di Irian Barat, jang tidak setudju dengan politik kolonial Belanda serta tafsirannja mengenai penentuan nasib sendiri, jang berarti separatisme, pemisahan dari Indonesia, dienjahkan dari daerah Irian Barat sebanjak 1000 orang sebulan. Jang lain dimasukkan pendjara, termasuk djuga kamp konsentrasi jang terkenal kebiadabannja jaitu "Boven Digul"

Kedua, Belanda baru-baru ini mempertontonkan kepada rakjat apa jang dinamakan bendera nasional dan lagu kebangsaan jang ditjiptakan — tidak mengherankan — oleh seorang Belanda. Hal ini menjebabkan pada tanggal 27 Oktober 1961 reaksi jang demikian hebatnja diantara penduduk di Sorong dan Hollandia sehingga ha-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

rus dibajar dengan kematian dan luka-lukanja anggota polisi Belanda. Rakjat memakai panah sebagai sendjata utama. Mengenai kedjadian ini, suratkabar Belanda "Algemene Handelsblad" tanggal 15 Nopember menulis:

> „Bendera" — jaitu insiden jang ditimbulkan oleh pengibaran bendera nasional . . . — membangkitkan perasaan tidak enak bahwa Gubernur Platteel tidak menjalurkan kekuatan-kekuatan ini pada waktunja dan sekarang disapu oleh arus setjara tak berdaja. Orang mengharapkan bahwa pemimpin-pemimpin Papua jang bertanggung djawab mempunjai realisme dan kelembutan jang tjukup besar disamping akal budi dan nasionalisme jang dapat difahami. Kalau tidak, maka dalam pertarungan Irian Barat pasti kita akan kalah, tidak di Den Haag atau di New York, tetapi di Hollandia" . . . jaitu di Irian Barat.

Disatu pihak, penguasa-penguasa kolonial mentjoba mempertontonkan lambang-lambang kemerdekaan Irian Barat; mereka mentjoba mempertontonkan „lagu kebangsaan" dan „bendera nasional" jang mereka buat sendiri. Dipihak lain mereka masih tetap membatasi dan menekan kekuatan penduduk Irian Barat jang sebenarnja, sebagaimana dipaparkan didalam surat terbuka oleh E.J. Boney, seorang anggota Dewan Irian jang begitu-digembar-gemborkan, kepada Perdana Menteri Belanda. Surat ini — jaitu surat terbuka — tertanggal Hollandia, 12 Nopember 1961, dalam terdjemahannja berbunji sebagai berikut:

„. . . . . Sesuai dengan harapan-harapan penduduk Nederlands Nieuw Guinea sebuah Dewan Nieuw Guinea telah dibentuk oleh Pemerintah Belanda dan pemerintah Belanda di Irian Barat sebagai langkah jang sangat penting dalam rangka pendemokrasian susunan konstitusionil dari Nederlands Nieuw Guinea. Harapan-harapan jang ditjurahkan kepada Dewan ini, jang pada mulanja sangat tinggi, sebagaimana terbukti dari perhatian besar terhadapnja, pada achir-achir ini telah terus menurus diketjewakan, karena beberapa anggota

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

bangsa Belanda, diikuti setjara setia oleh beberapa anggota Papua, memperalat Dewan ini untuk memaksakan kedudukannja kepada anggota-anggota lainnja.

„Pada mulanja diharapkan bahwa Dewan Irian akan merupakan suatu badan jang dapat melajani kepentingan-kepentingan penduduk Irian Barat dan akan memungkinkan suara-suara para wakilnja didengar oleh penguasa-penguasa dalam kebebasan penuh.

„Pada mulanja diharapkan pula bahwa ketua badan ini akan memutuskan sama sekali hubungan lamanja dengan para penguasa. Dewasa ini ada dua anggota bangsa Belanda, salah satu diantaranja ialah Ketua, dan beberapa satelit Papua, jang bersikap diktatorial dan memaksakan pendapatnja kepada Dewan, dengan akibat bahwa sebagian besar dari anggota-anggota Papua jang tidak mempunjai tjukup pengetahuan dan pengalaman tidak mempunjai waktu untuk membentuk pendapatnja sendiri setjara bebas. Mereka dipaksa turut besekongkol dengan segolongan jang ketjil ini dengan tjara-tjara jang tidak djudjur....."

Selandjutnja surat itu berbunji :

„Segala sesuatu jang diusulkan oleh Dewan Irian dalam bentuk mosi, resolusi, dan sebagainja, bukanlah atas inisiatif anggota-anggota Papua. . . . . "

Ini betul-betul sangat mendjelaskan. Baiklah saja ulangi alinea ini:

„Segala sesuatu jang diusulkan oleh Dewan Irian dalam bentuk mosi, resolusi, dan sebagainja, bukanlah atas inisiatif anggota-anggota Papua . . . . . "

Inilah apa jang dinamakan oleh Pemerintah Belanda didalam Madjelis jang luhur ini, mempersiapkan bangsa Papua untuk demokrasi dan pemerintahan sendiri. Kebanjakan didalam Madjelis ini, saja tahu betul, sudah pernah berkenalan dengan propaganda kolonial dan kenjataan-kenjataan didalam daerah-daerah kolonial.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Selandjutnja saja disini mempunjai surat lain, djuga ditulis oleh seorang anggota Dewan Irian. Surat inipun surat terbuka,djuga ditudjukan kepada Perdana Menteri Belanda, jang isinja meminta agar dalam menjelesaikan masalah Irian Barat, Indonesia diikutsertakan. Dinjatakan didalam surat itu bahwa penduduk Irian Barat tidak mungkin dapat menjelesaikan masalahnja tanpa ikutsertanja Indonesia.

Keadaan di Irian Barat kian memburuk. Telah ditjapai tingkat demikian rupa, sehingga suatu pemilihan untuk dewan daerah sebuah desa bernama Gag, pada tanggal 3 Nopember jang lalu harus diselenggarakan diatas kapal perusak „Overijsel" dibawah pengawasan kapal-kapal patroli polisi. Seluruh penduduk dipaksa naik kapal itu untuk ikutserta dalam pemilihan. Kita dapat menarik kesimpulan kita sendiri mengenai sifat pemilihan sematjam itu, terutama dalam rangka penentuan nasib sendiri jang dibajangkan dalam rantjangan resolusi Belanda.

Maka djelaslah bahwa rantjangan resolusi Belanda tidak memberikan sesuatu jang konstruktif, melainkan semata-mata bertudjuan meneruskan siasat litjin Belanda terhadap Indonesia. Sekarang bahkan kami diminta untuk mengakui prinsip menentukan nasib sendiri bagi Irian Barat, seakan-akan Irian Barat itu suatu wilajah kolonial jang terpisah djauh dari Indonesia disalah satu tempat di Afrika, Amerika atau Eropa, tanpa ada hubungannja dengan Indonesia tanpa ada hubungannja dengan perdjuangan kemerdekaan Indonesia, tanpa ada hubungannja dengan persengketaan antara Nederland dan Indonesia. Saja kira tidak ada seorangpun dapat mengharapkan agar kami menerima hal sematjam itu. Apapun jang akan terdjadi, sudahlah djelas bahwa Irian Barat mempunjai tali hubungan jang kuat dengan penduduk lainnja dari Indonesia. Penduduk Irian Barat telah ikutserta dalam perdjuangan untuk kemerdekaan nasional jang diproklamirkan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Penduduk Irian Barat telah pula mengorbankan djiwanja didalam perdjuangan ini. Sedjak dari

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

mulanja mereka ikutserta dalam gerakan diseluruh Indonesia bagi kemerdekaan, jang kemudian ditindas oleh tentara pendudukan Belanda di Irian Barat. Disamping itu kamp konsentrasi terbesar di Asia Tenggara, „Boven Digul" terletak di Irian Barat dan merupakan lambang nasional bagi perdjuangan Indonesia untuk kemerdekaan. Disinilah, didalam tempat pembuangan jang tak kenal ampun ini kebanjakan dari pemimpin-pemimpin kita — dari segala pelosok di Indonesia termasuk Irian Barat. — telah mengalami masa gemblengan-nja bagi kepimpinan nasionalnja dibawah kesengsaraan dan siksaan jang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata.

Djika Belanda menggunakan apa jang dinamakan rentjana dekolonisasinja jang tertjantum didalam rantjangan resolusinja itu dalam hal Curacao dan Suriname, jang masih tetap dibawah Mahkota Belanda dan sedang berdjuang untuk kemerdekaannja, djika Belanda menjokong sepenuhnja prinsip menentukan nasib sendiri bagi Aldjazair, Anggola dan wilajah-wilajah Afrika lainnja, maka antara Nederland dan Indonesia tidak akan ada perselisihan pendapat. Tetapi djika dalam mentjari penjelesaian bagi masalah Irian Barat, Belanda mengenjampingkan Indonesia seakan-akan Indonesia tidak berarti dalam arti politik, ekonomi maupun militer, maka kemarahan bangsa Indonesia hanjalah wadjar, dengan akibat-akibatnja jang djauh.

Beberapa kalangan mungkin akan berkata bahwa kita adalah emosionil dalam masalah ini. Tetapi bagaimana 'kan tidak ? Perdjuangan kemerdekaan adalah perdjoangan jang sutji dan benar. Perdjuangan kemerdekaan membangkitkan harapan bagi masa depan, bagi hidup jang lebih baik, bebas dari pemerasan dan penghinaan. Saja tahu, bahwa bagi Belanda perdjuangan ini merupakan hanja satu medan perang bagi intrigue kolonial, hanja merupakan permainan didalam mana tudjuannja adalah untuk mentjoba menundukkan rakjat terdjadjah atau jang pernah didjadjah dengan memakai kekerasan sendjata dan mengerahkan pengaruh internasional mereka jang

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

telah ada, dalam pertarungan ketjerdasan dan adu hak-hak legalistis. Sjukurlah, kita telah beladjar dari pengalaman jang pahit dimasa lampau ..... baik dibidang mental dan dalam hal penggunaan kekerasan. Kita tidaklah setolol seperti dalam tahun 1950.

Kini kita mempunjai kejakinan dalam menghadapi sekongkolan kolonial Belanda dalam segala seginja : Kedjudjuran Belanda dalam proses dekolonisasi ini dapat diukur dari sikap mereka terhadap Indonesia Merdeka. Selama mereka belum menjesuaikan diri kepada kemerdekaan Indonesia, Belanda tidak akan merobah tjiri-tjirinja sebagai suatu Negara kolonial.

Saja kira bahwa wakil Belanda jang terhormat hanjalah salah mengutjap sadja sewaktu mengatakan bahwa Belanda akan melepaskan kedaulatannja atas satu-satunja daerah djadjahannja jang masih tertinggal, jakni Irian Barat. Tetapi saja dapat mengingatkan beliau kepada posisi kolonialnja jang sebenarnja di Suriname dan Curaçao Saja sarankan beliau untuk membatja karangan dalam harian Nieuw *Suriname* baru-baru ini, jang djuga telah dimuat oleh harian Belanda Algemene *Handelsblad* tanggal 10 November 1962 jang lalu. Tuan Pengel, Ketua Partai Nasional Suriname, — partai terbesar di Suriname, — menuntut „Suriname harus segera mendjadi merdeka sepenuhnja. Penundaan lebih landjut akan hanja membawa akibat-akibat jang tidak diingini".

Ulasan-ulasan ini menegaskan kejakinan bahwa Belanda tidak djudjur dalam penjelenggaraannja terhadap masalah kolonial.

Mengenai utjapan-utjapan wakil Australia, saja telah mendjawabnja sewaktu saja pergunakan hak saja untuk mendjawab pada hari jang sama. Kami telah mengetahui kedudukan Australia dalam soal ini. Hanja jang mengherankan saja dalam ulasan-ulasan jang dikemukakan oleh wakil Australia ialah bahwa beliau kini, dalam masalah Irian Barat ini, telah bergerak dari tempat penonton ketempat pemain. Kita hanja berharap bahwa ini tidak berarti bahwa dia akan mengurangi pentingnja Indonesia sebagai masalah keamanan bagi

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Australia, dan bahwa ditempat Indonesia dia sedang menggantikan Irian Barat sebagai djaminan keamanan jng terbaik bagi Australia.

Djuga, hal jang tidak dapat saja pahami ialah utjapan wakil Australia bahwa dia tidak menjetudjui pembitjaraan-pembitjaraan bilateral. Sedjauh saja ketahui, hal ini berlawanan dengan ketegasan-ketegasan jang telah diberikan oleh J.M. Perdana Menteri Australia, Menzies kepada Presiden Sukarno, Djenderal Nasution dan kepada saja sendiri.

Saja akan meninggalkan mimbar ini, tetapi saja tidak akan melakukan ini tanpa memadjukan beberapa usul jang konstruktif dalam mentjari penjelesaian jang terhormat dari pertikaian Indonesia-Belanda jang berlarut-larut ini.

Pertama, haruslah ada kemauan-baik jang djudjur dan tekad dari kedua belah pihak untuk mentjiptakan semangat kerdja-sama baru. Tanpa ini, setiap konsesi dari Indonesia, — ketjil maupun besar, — akan disalah-tafsirkan sebagai tanda kelemahan.

Kedua, djika tjara penjelenggaraan dasar ini diterima oleh kedua belah pihak, djika djiwa saling mendekati dan saling menjesuaikan diterima oleh kedua belah pihak, maka kesediaan Belanda untuk melepaskan „kedaulatannja" dan kekuasaannja di Irian Barat dapat dipergunakan sebaik-baiknja — pertama, bagi kemakmuran rakjat Irian Barat sendiri; kedua, bagi penjelesaian pertikaian Indonesia-Belanda; dan ketiga, bagi pemulihan kembali kerdjasama bersahabat antara Belanda dan Indonesia.

Ketiga, kita mengakui dan menerima segala sesuatu jang telah diperbuat Pemerintah Belanda sedjak 1950 terhadap Irian Barat sedjauh mana hal ini dilakukan demi kesedjahteraan rakjat Irian Barat dan ikut menjumbang kepada persahabatan antara Indonesia dan Belanda.

Keempat, dengan dienjahkannja penghalang bagi penjerahan kekuasaan sepenuhnja di Irian Barat, Belanda berada dalam keduduk-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

an untuk menebus djandji-djandjinja jang resmi maupun tidak resmi. bahwa bekas Hindia Belanda merupakan satu kesatuan nasional. Djandji-djandji inilah, jang diberikan sesudah tahun 1950 dan djaminan-djaminan sebelum tahun 1950, termasuk arti sebenarnja dari „penjerahan kedaulatan jang sempurna kepada Indonesia", pastilah tidak akan sukar bagi kedua belah fihak untuk dipertemukan lagi tafsirannja dan perumusannja, asal sadja kedua belah pihak sungguh-sungguh bertekad untuk mentjari penjesuaian dengan sjarat-sjarat jang terhormat.

Kelima, bagi maksud jang tertjantum diatas tadi kami dalam prinsipnja tidak berkeberatan mengadakan perundingan bilateral, sebagaimana disarankan oleh beberapa anggota Madjelis ini dan sebagaimana baru-baru ini diadjukan oleh wakil India, Khrisna Menon, dalam suatu usul resmi.

Keenam, djika bagi satu penjelesaian terhormat tersebut dibutuhkan suatu waktu peralihan tertentu, dimana Perserikatan Bangsa-bangsa harus memainkan peranan, Indonesia akan memberikan kerdjasama dan bantuan sepenuhnja.

Ketudjuh, kedua belah pihak hendaknja djangan memulai tindakan-tindakan atau usaha-usaha jang dapat ditafsirkan sebagai suatu tjara penjelenggaraan unilateral jang menimbulkan purbasangka dalam pemetjahan masalah ini dalam rangka wadjar.

Tuan Ketua, saja mengutjapkan terima kasih atas kesediaan Tuan dalam memberikan lagi kesempatan berbitjara bagi saja.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Api nan tak kundjung padam



Departemen Penerangan

Pertj. Negara d/h. De Unie — 3048-12-'61 (10.000 buku)

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA